



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025 – 2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya untuk mendukung pencapaian cita-cita dan tujuan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah diperlukan rencana pembangunan daerah jangka panjang tahun 2025-2045 yang menghasilkan sasaran pokok dan arah kebijakan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum pada semua pihak yang terlibat dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045 maka diperlukan pengaturan tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Provinsi Jawa Tengah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Sasaran Pokok adalah gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

Pasal 2

RPJPD merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045 dalam bentuk visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Dokumen RPJPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum dan Kondisi Daerah
 - BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis
 - BAB IV : Visi dan Misi Daerah
 - BAB V : Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok
 - BAB VI : Penutup
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III PELAKSANAAN RPJPD

Pasal 4

- (1) RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi dan program Gubernur.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Gubernur dan calon Wakil Gubernur.
- (3) Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (4) RPJPD menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RPJPD Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok dalam kurun waktu Tahun 2025 – 2045.
- (5) RPJPD menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan lainnya.
- (6) Pelaksanaan RPJPD memperhatikan:
 - a. konsistensi perencanaan;
 - b. kerangka pengendalian dan evaluasi;
 - c. manajemen risiko; dan
 - d. komunikasi publik,dalam pencapaian visi, misi, dan sasaran pokok pembangunan daerah.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditindaklanjuti dalam *Roadmap* atau Peta Jalan.
- (2) *Roadmap* atau Peta Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD secara berkala.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJPD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya:
 - a. bencana alam;
 - b. guncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran Daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.
- (3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
- (4) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai 1 Januari 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd
SUMARNO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH:(9-221/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa baik mulai dari tingkat pusat hingga daerah dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan nasional diawali dengan proses perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang wajib disusun baik mulai dari tingkat pusat maupun daerah. Perencanaan pembangunan tersebut terangkai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Telah selesainya perodesasi dari Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 mendorong pelaksanaan penyusunan RPJPD periode selanjutnya yaitu Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJPD periode Tahun 2025-2045 dilakukan guna memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah kebijakan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Hal ini merupakan amanat yang tercantum di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan untuk masa 20 (dua puluh) tahun ke depan yang mencakupi kurun waktu mulai dari Tahun 2025 hingga Tahun 2045. Pelaksanaan RPJPD terbagi dalam beberapa tahapan perodesasi pembangunan perencanaan jangka menengah daerah 5 (lima) tahunan.

RPJPD digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program Gubernur. Untuk selanjutnya RPJMD sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD tersebut merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sehubungan dengan hal tersebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 menjadi sangat penting bagi pembangunan di Jawa Tengah. Oleh karena itu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 perlu untuk ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*roadmap* atau peta jalan” merupakan dokumen penjabaran dari sasaran pokok termasuk di dalamnya penjabaran pembiayaan alternatif.

Yang dimaksud dengan “*roadmap* atau peta jalan” disusun dalam kurun waktu 2 (dua) tahun setelah peraturan ini ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 159

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003



Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045 Provinsi Jawa Tengah



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	I-1
	1.1. LATAR BELAKANG	I-1
	1.2. DASAR HUKUM	I-3
	1.3. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN	I-4
	1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	I-6
	1.5. SISTEMATIKA	I-6
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
	2.1.1 Geografi	II-1
	2.1.2 Demografi	II-12
	2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-14
	2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-14
	2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II-18
	2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH.....	II-20
	2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-20
	2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-25
	2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-30
	2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi	II-37
	2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM	II-38
	2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025	II-43
	2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN PRASARANA SARANA PELAYANAN PUBLIK	II-44
	2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH	II-51
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
	3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
	3.2. ISU STRATEGIS DAERAH	III-12
	3.2.1. Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah Sebelumnya	III-12
	3.2.2. Tantangan Pembangunan Daerah	III-13
	3.2.3. Isu Strategis Daerah	III-16
BAB IV	VISI DAN MISI DAERAH.....	IV-1
	4.1. LOGFRAME PEMBANGUNAN JAWA TENGAH 2025-2045 ...	IV-1
	4.2. VISI DAERAH.....	IV-3
	4.3. MISI DAERAH	IV-9
BAB V	ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK	V-1
	5.1. ARAH KEBIJAKAN	V-1
	5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029	V-1
	5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034	V-2
	5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039	V-4
	5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045	V-5

5.2. SASARAN POKOK	V-14
5.2.1. Sasaran 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif	V-16
5.2.2. Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan	V-21
5.2.3. Sasaran 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	V-29
5.2.4. Sasaran 4. Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	V-31
5.2.5. Sasaran 5. Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	V-33
5.2.6. Sasaran 6. Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	V-34
5.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH	V-37
BAB VI PENUTUP.....	VI-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Lainnya	I-5
Gambar 2.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023	II-2
Gambar 2.2	Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2023	II-6
Gambar 2.3	Tren Kenaikan Suhu Udara Rata-rata Tahunan Provinsi Jawa Tengah	II-6
Gambar 2.4	Tren Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2022	II-7
Gambar 2.5	Kontribusi Sektor Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (%)	II-7
Gambar 2.6	Peta Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah	II-9
Gambar 2.7	Prakiraan Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2030 dan 2045 <i>Business as Usual</i> (BAU).....	II-10
Gambar 2.8	Prakiraan Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2030 dan 2045 <i>Business as Usual</i> (BAU).....	II-11
Gambar 2.9	Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Jiwa)	II-13
Gambar 2.10	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2024 (Persen).....	II-15
Gambar 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2005-2023 (Persen).....	II-17
Gambar 2.12	Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2023 (Persen).....	II-17
Gambar 2.13	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2005-2023 (Persen).....	II-18
Gambar 2.14	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023.....	II-19
Gambar 2.15	Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 1975-2023 (Persen).....	II-20
Gambar 2.16	Kontribusi Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2010-2023 (Persen).....	II-21
Gambar 2.17	Peta Potensi Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	II-22
Gambar 2.18	Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-22
Gambar 2.19	Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Ton/Tahun)	II-23
Gambar 2.20	PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2010–2023 (Juta Rupiah).....	II-23

Gambar 2.21	Klasifikasi Tingkat Kemandirian Desa Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Persen).....	II-24
Gambar 2.22	Skor Pilar 12 Indeks Daya Saing Daerah – Kapabilitas Inovasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023....	II-25
Gambar 2.23	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2023	II-26
Gambar 2.24	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023	II-27
Gambar 2.25	Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun).....	II-28
Gambar 2.26	Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Yang Diluluskan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Persen).....	II-29
Gambar 2.27	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah)	II-30
Gambar 2.28	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2023 (Juta Rupiah).....	II-30
Gambar 2.29	Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023	II-38
Gambar 2.30	Kejadian Konflik Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-38
Gambar 2.31	Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2023	II-39
Gambar 2.32	Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023	II-40
Gambar 2.33	Skor Pilar 1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) – Kapasitas Institusi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023	II-41
Gambar 2.34	Piramida Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	II-45
Gambar 2.35	Pertumbuhan Ekonomi dan Persebaran Infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah	II-52
Gambar 2.36	Dinamika Perubahan Wilayah Pengembangan (WP) di Provinsi Jawa Tengah	II-53
Gambar 4.1	<i>Logframe</i> Pembangunan Jawa Tengah 2025-2045.....	IV-2
Gambar 4.2	Visi Pembangunan Jawa Tengah 2025-2045	IV-3
Gambar 4.3	Sasaran Utama Visi Pembangunan Jawa Tengah 2025-2045	IV-8
Gambar 4.4	Misi Pembangunan Jawa Tengah 2025-2045	IV-9
Gambar 5.1	Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.....	V-7
Gambar 5.2	Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.....	V-16
Gambar 5.3	Arah Pengembangan Wilayah WP Bregasmalang	V-39

Gambar 5.4	Arah Pengembangan Wilayah WP Petanglong	V-40
Gambar 5.5	Arah Pengembangan Wilayah WP Kedungsepur.....	V-41
Gambar 5.6	Arah Pengembangan Wilayah WP Jekuti	V-42
Gambar 5.7	Arah Pengembangan Wilayah WP Banglor	V-43
Gambar 5.8	Arah Pengembangan Wilayah WP Subosukawonosraten.....	V-44
Gambar 5.9	Arah Pengembangan Wilayah WP Gelangmanggung	V-45
Gambar 5.10	Arah Pengembangan Wilayah WP Wonobanjar	V-46
Gambar 5.11	Arah Pengembangan Wilayah WP Keburejo	V-47
Gambar 5.12	Arah Pengembangan Wilayah WP Cibalingmas	V-48

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2030 dan 2045	II-12
Tabel 2.2	Hasil Asesmen Kompetensi Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023	II-27
Tabel 2.3	Indeks Pelayanan Transportasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023	II-33
Tabel 2.4	Potensi dan Kendala Pembangunan Daerah Jawa Tengah.....	II-42
Tabel 2.5	Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045	II-46
Tabel 2.6	Proyeksi Kebutuhan Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	II-46
Tabel 2.7	Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	II-47
Tabel 2.8	Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	II-48
Tabel 2.9	Proyeksi Timbulan Sampah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	II-49
Tabel 2.10	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	II-49
Tabel 2.11	Pembakuan Tipe SD/MI, SLTP/MTs, SMU	II-50
Tabel 2.12	Proyeksi Kebutuhan Sekolah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	II-51
Tabel 3.1	Keterkaitan Gambaran Kondisi Daerah Dengan Permasalahan Pembangunan Daerah	III-11
Tabel 3.2	Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah	III-12
Tabel 4.1	Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target Provinsi Jawa Tengah 2025-2045	IV-8
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	V-7
Tabel 5.2	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	V-19
Tabel 5.3	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	V-27
Tabel 5.4	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	V-30

Tabel 5.5	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	V-32
Tabel 5.6	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.....	V-34
Tabel 5.7	Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	V-36

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH TAHUN 2025-2045

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Provinsi Jawa Tengah terletak di tengah Pulau Jawa berbatasan dengan tiga provinsi, Provinsi Jawa Barat sebelah barat, Provinsi Jawa Timur sebelah timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, dengan luas daratan ±3.433.732 Ha atau ±25 persen dari luas Pulau Jawa. Secara administrasi Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan, dan 7.810 desa.

Pembangunan Jawa Tengah selama dua puluh tahun dilaksanakan berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2005-2025, yang dijabarkan dalam empat tahapan RPJMD. Saat ini RPJPD Tahun 2005-2025 telah memasuki tahap akhir dan akan berakhir pada tahun 2025. Berdasarkan hasil evaluasi, rata-rata capaian kinerja pembangunan daerah dalam mewujudkan visi pembangunan RPJPD Tahun 2005-2025 tercapai sebesar 97,52 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Dalam upaya menjaga keberlanjutan kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah, dan sejalan dengan berakhirnya tahapan RPJPD Tahun 2005-2025, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus menyusun dan menetapkan RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 juga memperhatikan amanat kebijakan Pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

Secara substansi, penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan beberapa hal, antara lain: 1) penyelarasan visi, misi, arah pembangunan, dan indikator utama pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045, 2) keberlanjutan dari isu strategis dan kebijakan pembangunan daerah yang telah tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yang dinilai masih relevan di Jawa Tengah hingga tahun 2045, 3) hasil evaluasi capaian indikator kinerja RPJPD Tahun 2005-2025, 4) isu-isu strategis yang berkembang, dan 5) regulasi yang berlaku saat ini. Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, serta memperhatikan prinsip dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Rencana pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan yang dituangkan dalam RPJPD Tahun 2025-2045 ini diarahkan untuk menjawab berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, serta tantangan megatren yang saat ini memengaruhi dinamika pembangunan daerah. Permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah tersebut antara lain menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dan penyelenggaraan penanggulangan bencana; masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat; terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat; daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal yang ditunjukkan dengan belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan, rendahnya daya saing tenaga kerja, dan belum optimalnya riset dan inovasi; ketimpangan ekonomi antarwilayah; belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia; belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah; belum optimalnya kondusivitas wilayah; serta belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi termasuk penerapan demokrasi substansial.

RPJPD Tahun 2025-2045 juga disusun dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Selain itu, Jawa Tengah juga diberikan peran sebagai penumpu pangan dan industri nasional sampai dengan tahun 2045. Dalam rangka mendukung cita-cita besar menjadi Indonesia Emas 2045 tersebut serta dalam upaya menjawab berbagai permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah Jawa Tengah maka ditetapkan visi pembangunan Jawa Tengah 2025-2045 yaitu Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan. Pencapaian visi Jawa Tengah 2045 tersebut dilakukan melalui delapan misi pembangunan daerah, enam sasaran pokok, tujuh belas arah pembangunan, empat puluh lima indikator utama, dan dilaksanakan dalam empat tahapan pembangunan daerah.

Proses penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 1) persiapan penyusunan RPJPD meliputi *brainstorming* dengan masyarakat, penjaringan masukan melalui media sosial, *focus group discussion* dengan pakar, praktisi dan akademisi, dan hasilnya menjadi bahan penyusunan rancangan awal RPJPD; 2) konsultasi publik rancangan awal RPJPD; 3) konsultasi rancangan awal RPJPD ke Pemerintah Pusat; 4) penyusunan rancangan RPJPD; 5)

Musrenbang RPJPD; 6) reviu APIP; 7) pembahasan Raperda RPJPD bersama DPRD; 8) evaluasi raperda RPJPD kepada Kementerian Dalam Negeri; dan 9) penetapan peraturan daerah RPJPD. RPJPD Tahun 2025-2045 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan program pembangunan daerah selama dua puluh tahun ke depan.

1.2. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 147);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 150);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 155);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.

1.3. HUBUNGAN ANTARDOKUMEN

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. RPJPD merupakan perencanaan yang bersifat makro yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan

pembangunan jangka panjang daerah. Proses penyusunan dokumen RPJPD dilakukan dengan pendekatan teknokratik, *top-down*, *bottom-up*, partisipatif, dan politis, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Dan secara substansi, penyusunan dokumen RPJPD menggunakan pendekatan holistik, tematik, integratif, dan spasial.

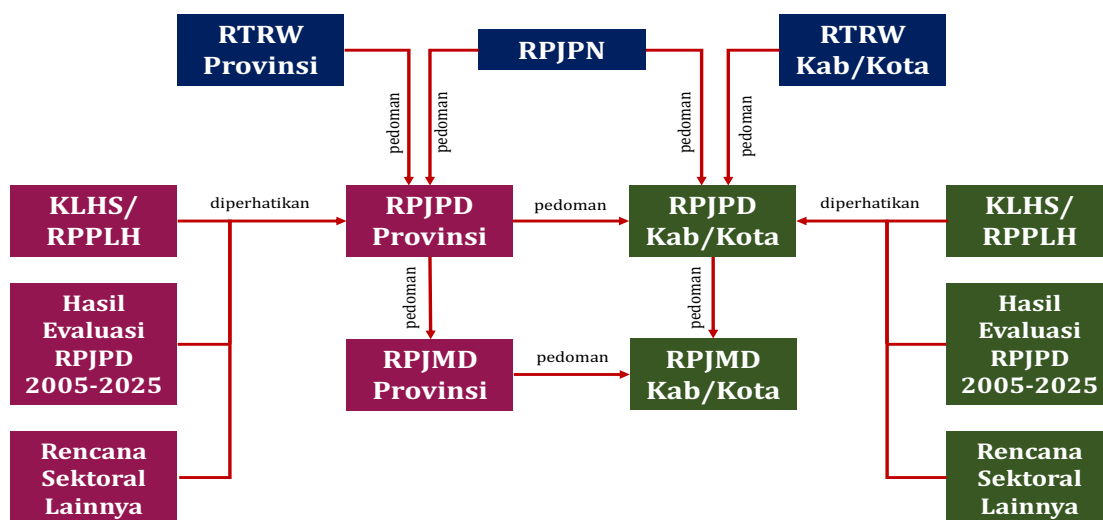
Dokumen RPJPD Tahun 2025–2045 disusun selaras dan berpedoman pada:

1. RPJPN Tahun 2025–2045, meliputi keselarasan dalam visi, misi, arah pembangunan, dan indikator kinerja utama pembangunan;
2. RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044, meliputi keselarasan dalam arahan rencana tata ruang utamanya struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis daerah.

Penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 juga memperhatikan:

1. Hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, terutama pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD, meliputi substansi isu strategis, dan arah kebijakan;
3. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan lainnya.

RPJPD Tahun 2025–2045 akan dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah pada setiap jangka waktu 5 (lima) tahunan yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan. Dokumen perencanaan provinsi baik RPJPD, RPJMD, dan RKPD menjadi acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.



Gambar 1.1.
Keterkaitan RPJPD Dengan Dokumen Lainnya

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut.

a. Maksud

Maksud penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 adalah merumuskan cita-cita pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan ke dalam visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, dan indikator utama pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW Provinsi Jawa Tengah.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 adalah:

1. Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2025-2045;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD; serta
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA

Dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika RPJPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik, dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum kondisi daerah dengan memperhatikan kondisi tantangan pembangunan serta hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah periode sebelumnya.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Memuat cita-cita pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah 2045 yang dituangkan dalam visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

Memuat tentang empat tahapan arah kebijakan, sasaran pokok pembangunan daerah disertai indikator utama pembangunan daerah tahun 2025-2045, serta arah pengembangan wilayah Jawa Tengah.

BAB VI PENUTUP

Memuat kaidah pelaksanaan dan harapan berkenaan dengan pelaksanaan RPJPD Tahun 2025–2045 serta menggarisbawahi tentang pentingnya RPJPD bagi pembangunan daerah Jawa Tengah selama tahun 2025-2045.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Geografi

Jawa Tengah terletak antara 5°40'–8°30' Lintang Selatan dan 108°30'–111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa) yang memiliki luas daratan ± 3.433.732 ha atau ±25 persen dari luas Pulau Jawa. Letak Jawa Tengah di tengah Pulau Jawa berbatasan dengan tiga provinsi, Provinsi Jawa Barat sebelah barat, Provinsi Jawa Timur sebelah timur, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan. Provinsi Jawa Tengah secara administrasi memiliki 29 kabupaten, 6 kota, 576 kecamatan, 753 kelurahan, dan 7.810 desa.

Klimatologi, iklim Jawa Tengah termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Suhu udara di Jawa Tengah berdasarkan data tahun 2023 berkisar antara 26,7°C sampai dengan 30,4°C. Tempat-tempat yang letaknya berdekatan dengan pantai mempunyai suhu udara rata-rata relatif tinggi. Untuk kelembaban udara rata-rata bervariasi, dari 67 persen sampai dengan 87 persen. Curah hujan tertinggi sebesar 2.799 mm³ dan hari hujan terbanyak sebanyak 161 hari.

Topografi Jawa Tengah meliputi ketinggian 0-100 m di atas permukaan laut (dpl) di sepanjang pantai utara (53,3 persen), 100-500 m dpl di bagian tengah (27,4 persen), 500-1.000 m dpl (14,7 persen), di atas 1.000 m dpl (4,6 persen) di bagian tengah. Jawa Tengah dengan topografi yang berbeda-beda menjadi potensi keindahan alam sebagai destinasi wisata seperti wilayah di Kabupaten Wonosobo yang dikenal sebagai wilayah tertinggi di Jawa Tengah atau wilayah pesisir seperti Kabupaten Jepara.

Geologi, jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi organosol, alluvial, planosol, litosol, regosol, andosol, grumosol, mediteran, latosol, podsolik, dan didominasi jenis tanah latosol, aluvial, serta gromosol, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburan cukup tinggi.

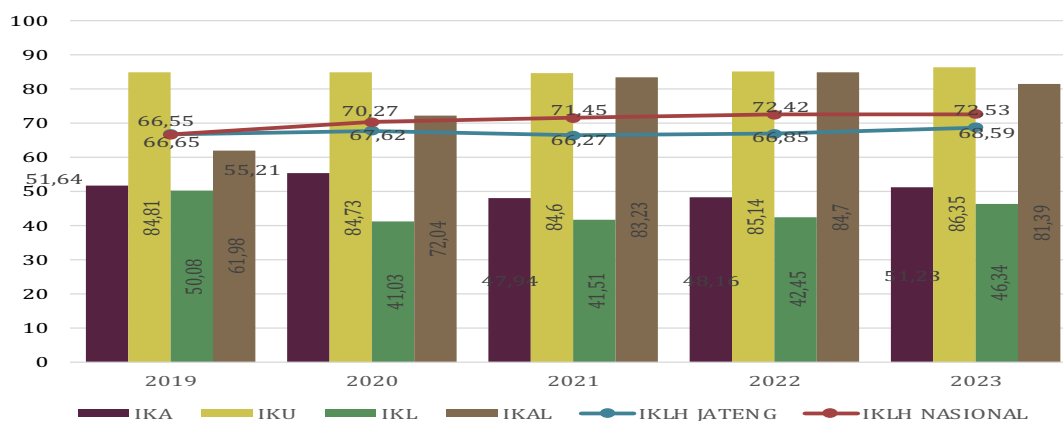
Secara **fungsional ekologis** berdasarkan wilayah sungai, daerah aliran sungai (DAS), dan cekungan air tanah (CAT), wilayah Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut. Wilayah sungai di Jawa Tengah terbagi menjadi 10 wilayah yaitu Cimanuk Cisanggarung, Jratun Seluna, Bengawan Solo, Progo Opak Serang, Serayu Bogowonto, Citanduy, Pemali Comal, Bodri Kuto, Wiso Gelis, dan Kepulauan Karimunjawa. DAS di Jawa Tengah cukup banyak dengan 18 DAS di antaranya menjadi DAS prioritas untuk dipulihkan daya dukungnya dengan luas ±2.334.700,35 ha atau sekitar ±71 persen dari total luas Jawa Tengah meliputi DAS Serayu, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Progo (Jawa Tengah, DIY), DAS Bengawan Solo (Jawa Tengah, Jawa Timur, DIY), DAS Citanduy (Jawa Barat, Jawa Tengah), DAS Bodri, DAS Bogowonto (Jawa Tengah, DIY), DAS Garang, DAS Serang, DAS Babakan, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Comal, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Luk Ulo, dan DAS Wawar Medono. Penyebab utama kerusakan DAS di Jawa Tengah antara lain alih fungsi/perubahan tata guna lahan (dari semula

kawasan lindung/konservasi atau areal resapan air menjadi fungsi lain misalnya pemukiman, pertanian semusim, kawasan industri, yang akan mengurangi kapasitas DAS), peningkatan luasan kawasan terbangun untuk memenuhi dinamika pertumbuhan penduduk, serta kesadaran masyarakat yang perlu ditingkatkan dalam pelestarian DAS misalnya terjadinya pencemaran air sungai karena aktivitas pembuangan sampah dan limbah ke sungai.

Wilayah Jawa Tengah juga memiliki potensi CAT sebanyak 31 CAT, terbagi menjadi 6 CAT dalam wilayah satu kabupaten/kota, 19 CAT lintas kabupaten/kota, dan 6 CAT lintas kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah dan provinsi lain. Potensi air tanah bebas CAT lintas provinsi sebesar 411,15 juta m³/tahun, CAT lintas kabupaten/kota sebesar 6.575,64 juta m³/tahun, dan CAT dalam kabupaten sebesar 355,20 juta m³/tahun. Merujuk pada Surat Keputusan (SK) Gubernur Jawa Tengah Nomor 544/29 Tahun 2024 tentang Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada CAT di Wilayah Sungai Pemali Comal Dan Bodri Kuto, serta berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, bahwa kewenangan pengelolaan CAT diatur sesuai dengan kewenangan wilayah sungai. Dari 31 CAT yang ada di Jawa Tengah hanya 4 CAT yang menjadi kewenangan Provinsi Jawa Tengah yaitu CAT Kendal, CAT Subah, CAT Pekalongan-Pemalang, dan CAT Bumiayu.

Penggunaan lahan di Jawa Tengah berdasarkan data tahun 2021 didominasi oleh pertanian baik lahan basah maupun pertanian lahan kering dengan rincian lahan basah totalnya mencapai 47,96 persen dari total wilayah. Untuk lahan terbangun saat ini mencapai 19,39 persen atau seluas 665.708 ha. Selain itu lahan dengan tutupan vegetasi hutan mencapai 18,86 persen dari total wilayah.

Keberlanjutan pembangunan didukung dengan terjaganya sumber daya alam dan lingkungan hidup. Gambaran kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup ditunjukkan dengan indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**. Terjadi kecenderungan peningkatan IKLH Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu 2019-2023 sebesar 1,94 poin, dan pada tahun 2023 IKLH Provinsi Jawa Tengah mencapai 68,59. Meski terus mengalami peningkatan, kondisi IKLH Provinsi Jawa Tengah masih berada di bawah IKLH nasional setiap tahunnya, dengan capaian terendah pada komponen Indeks Kualitas Lahan (IKL) dikarenakan peningkatan alih fungsi atau perubahan tata guna lahan.



Sumber: KLHK, 2024

Gambar 2.1.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Berdasarkan surat Sekretaris Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.1/B/02/2024, terdapat perubahan metode perhitungan IKLH sehingga konversi capaian IKLH Jawa Tengah pada tahun 2023 menjadi 75,34. Hal ini akan menjadi *baseline* dalam penyusunan target yang berlaku mulai tahun 2025. Capaian komponen IKLH setelah dikonversi dengan metode perhitungan baru tersebut meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) sebesar 68,31, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 84,51, Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 59,32, dan Indeks Kualitas Air Laut sebesar 81,39.

Keanekaragaman hayati di Jawa Tengah meliputi ekosistem, spesies dan genetik secara langsung dapat memberikan manfaat ekonomi dan ekologi. Keberadaan ekosistem mangrove, padang lamun, terumbu karang yang terjaga dengan baik dapat meningkatkan stok hasil perikanan tangkap serta melindungi garis pantai. Sedangkan adanya hutan hujan tropis dapat memproduksi hasil hutan (kayu dan nonkayu) sekaligus menstabilkan fungsi hidrologi. Di Jawa Tengah terdapat 110 spesies flora dan 121 spesies satwa yang dilindungi berdasarkan P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, dan beberapa di antaranya tergolong satwa dan flora endemik yang terancam punah seperti penyu hijau, owa Jawa, trenggiling, macan tutul, dan elang Jawa, serta flora endemik seperti bunga bangkai raksasa, sarangan, edelweis dan kantung semar. Selain itu, beberapa daerah di Jawa Tengah memiliki sumber daya genetik flora dan fauna lokal unggul sebagai potensi sumber pangan bernilai ekonomi tinggi, seperti tanaman hortikultura antara lain kelapa genjah entog, durian Sambeng, nanas madu Belik, dan ternak seperti sapi peranakan ongole Kebumen, kambing peranakan etawa galur Kaligesing, dan domba Batur. Namun demikian kelestarian keanekaragaman hayati di Jawa Tengah sangat tergantung dari pemanfaatan berkelanjutan dan pengurangan ancaman melalui penggunaan varietas/jenis unggul, pengembangan potensi bioprospeksi pangan dan farmasi, serta rehabilitasi dan konservasi habitat.

Jawa Tengah memiliki kawasan hutan/hutan negara seluas ±767.026,21 ha (termasuk Taman Nasional Laut seluas ±117.033,97 ha) dan hutan rakyat seluas ±682.425,64 ha, sehingga luas keseluruhan hutan di Jawa Tengah seluas ±1.332.417,89 ha. Hutan di Jawa Tengah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan lingkungan baik manfaat ekologi, ekonomi dan sosial.

Sementara hutan mangrove di Jawa Tengah pada tahun 2023 seluas 15.089 ha mangrove eksisting dan 44.784 ha potensi habitat mangrove eksisting yang penutupan lahannya telah berubah. Dengan demikian lahan yang dapat dikembangkan untuk mangrove secara total mencapai 59.873 ha di mana sebesar 15.089 ha atau 25,2 persen dalam bentuk ekosistem mangrove, sedangkan 74,8 persen kondisinya dalam bentuk lahan terbuka dan tambak.

Kondisi kualitas lingkungan hidup juga digambarkan dari tingkat pencemaran, baik pencemaran air, udara, maupun akibat sampah. Kualitas air di Jawa Tengah dominan berada pada kategori tercemar ringan dengan nilai indeks pencemaran pada tahun 2023 sebesar 3,39. Dari 25 sungai di Jawa Tengah yang dilakukan pemantauan seluruhnya berada pada status tercemar ringan-sedang. Sebanyak 24 sungai berada dalam kondisi cemar ringan dan 1 sungai berada pada status cemar sedang yaitu Sungai Palur. Sementara itu tingkat pencemaran air laut dalam

kondisi baik dengan nilai indeks kualitas air laut tahun 2023 sebesar 81,39. Demikian juga tingkat pencemaran udara di Jawa Tengah dinilai masih dalam kategori baik, yang ditunjukkan dengan indeks kualitas udara tahun 2023 sebesar 86,35.

Sedangkan **kondisi persampahan** di Jawa Tengah digambarkan dengan data timbunan sampah di Jawa Tengah, pada tahun 2023 telah mencapai 6.338.109,37 ton per tahun atau turun 0,40 persen dibandingkan tahun 2022. Pengelolaan sampah di Jawa Tengah baik pengurangan maupun penanganan pada tahun 2023 baru mencapai 3.912.331,17 ton per tahun (61,73 persen), dengan rincian pengurangan sampah sebesar 1.321.899,86 (20,86 persen) dan penanganan sampah sebesar 2.590.431,31 (40,87 persen). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi peningkatan upaya pengurangan dan penanganan sampah di Jawa Tengah. Meski demikian capaian pengolahan sampah yang meliputi komponen pengolahan sampah organik dan daur ulang materi (*material recovery*) masih rendah yaitu 16,51 persen pada tahun 2022.

Selanjutnya, kondisi **ketahanan pangan** Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan indikator Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mulai dilakukan pengukurannya oleh Badan Ketahanan Pangan Nasional mulai tahun 2019. IKP merupakan indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Indeks ketahanan pangan Jawa Tengah menunjukkan tren yang positif dari tahun ke tahun sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019, indeks ketahanan pangan Jawa Tengah sebesar 78,85, dan pada tahun 2023 menjadi 84,80, yang mengindikasikan wilayah dengan tingkat ketahanan pangan kategori baik. Selanjutnya, ketahanan pangan pada level individu diukur dengan indikator *Prevalence of Undernourishment (PoU)* atau prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur oleh BPS Pusat mulai tahun 2019. Kondisi PoU Jawa Tengah mengalami perbaikan cukup signifikan yang ditunjukkan dari penurunan nilai PoU yaitu sebesar 11,61 persen pada tahun 2019 menjadi 10,44 persen pada tahun 2023. Hal ini artinya jumlah populasi penduduk yang mengonsumsi pangan di bawah jumlah minimum kebutuhan energi semakin menurun.

Gambaran kondisi **ketahanan energi** di Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan porsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi di Jawa Tengah yang terus mengalami peningkatan. Capaian persentase pemanfaatan EBT dalam bauran energi di Jawa Tengah terus meningkat dari 7,01 persen pada tahun 2014 menjadi 15,98 persen pada tahun 2023. Kondisi tersebut didukung dengan wilayah Jawa Tengah yang memiliki banyak potensi energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif pengganti energi fosil. Sumber energi terbarukan yang banyak dikembangkan di Jawa Tengah berupa energi surya, terjunan air, panas bumi, *bioethanol*, *biofuel*, biomassa, biogas, dan gas rawa. Selain itu juga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam pemanfaatan sumber EBT dengan mengembangkan dan memanfaatkan energi baru terbarukan.

Selain kegiatan pembangunan infrastruktur EBT, upaya lain yang dilakukan di Jawa Tengah adalah mewujudkan kemandirian energi dengan melibatkan peran aktif masyarakat antara lain melalui pengembangan Desa Mandiri Energi (DME). Capaian kinerja DME di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2023 sejumlah 2.422

desa, yang kemudian berdasarkan tingkat pemanfaatan energi baru terbarukan dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni DME Inisiatif dengan kondisi eksisting sejumlah 2.238 desa, DME Berkembang dengan kondisi eksisting sejumlah 159 desa, dan DME Mapan sejumlah 25 desa. Desa mandiri energi di Jawa Tengah ini dimaksudkan untuk mendorong partisipasi pemerintah desa dan masyarakat secara luas dalam melaksanakan transisi energi dan pengembangan teknologi baru berbasis energi baru terbarukan menuju kemandirian energi di Jawa Tengah.

Pada sektor pertambangan, praktik baik pertambangan di Jawa Tengah terus didorong melalui penilaian dan penghargaan *Good Mining Practice* (GMP) pada pemegang Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Provinsi Jawa Tengah telah meningkatkan kualitas pengelolaan pertambangan yang berdampak terhadap pengelolaan lingkungan hidup sekitar yang lebih baik. Di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023 persentase GMP mengalami peningkatan dari 54,82 persen tahun 2018 menjadi 89,79 persen tahun 2023. Praktik pengelolaan pertambangan baik terus didorong mengingat potensi mineral dan batuan di Jawa Tengah yang cukup tinggi dan tersebar di 35 kabupaten/kota agar pemanfaatannya tidak merusak lingkungan. Potensi mineral dan batuan dapat digunakan sebagai bahan konstruksi pembangunan, baik untuk proyek infrastruktur Jawa Tengah maupun proyek strategis nasional yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Perkiraan kebutuhan material untuk proyek strategis nasional di Jawa Tengah adalah sebesar ± 113 juta m^3 , akan tetapi Jawa Tengah hanya mampu memenuhi ± 31 juta m^3 . Potensi mineral dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya sehingga diharapkan penambangan yang dilakukan tidak berdampak besar pada kerusakan lingkungan hidup.

Jawa Tengah merupakan daerah yang **rawan bencana**. Berdasarkan data sejarah **kejadian bencana** menunjukkan bahaya yang ada di Jawa Tengah meliputi banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, serta epidemi dan wabah penyakit. Selain bahaya yang telah tercatat, Jawa Tengah juga memiliki potensi bahaya kegagalan teknologi kelas rendah hingga tinggi dan potensi bahaya likuifaksi kelas sedang hingga tinggi. Dalam tujuh tahun terakhir Indeks Risiko Bencana (IRB) Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan menurun dari 149,11 atau kategori tinggi pada tahun 2017 menjadi 109,01 atau kategori sedang pada tahun 2023. Tren penurunan IRB sejalan dengan meningkatnya kapasitas daerah Provinsi Jawa Tengah dalam penanggulangan bencana yang diukur dari Indeks Ketahanan Daerah (IKD). IKD Provinsi Jawa Tengah menunjukkan tren positif yaitu sebesar 3,52 pada tahun 2019 menjadi 3,70 pada tahun 2023.

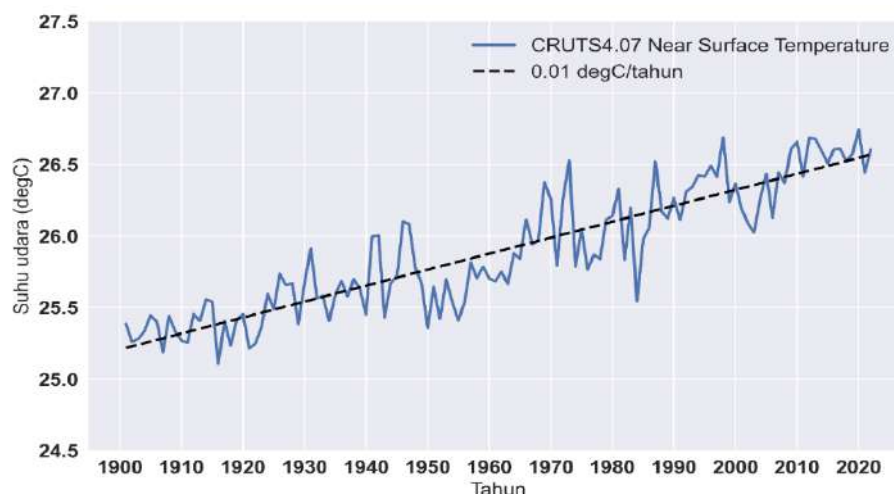


Sumber: BNPB, 2024

Gambar 2.2.

Indeks Risiko Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2023

Selain itu, adanya fenomena perubahan iklim secara global juga berpengaruh terhadap kondisi sumber daya alam bahkan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Fenomena pemanasan global di mana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Di Jawa Tengah, tren kenaikan suhu dalam kurun waktu panjang menjadi indikasi adanya perubahan iklim. Berdasarkan pengamatan data historis suhu udara rata-rata yang dimiliki yaitu selama periode 1901-2022 menunjukkan suhu udara rata-rata di Jawa Tengah telah mengalami peningkatan dengan laju sekitar $0,01^{\circ}\text{C}$ per tahun selama periode historis. Dengan kata lain di Provinsi Jawa Tengah telah terjadi peningkatan suhu udara rata-rata lebih kurang sebesar 1°C selama pengamatan 120 tahun terakhir.



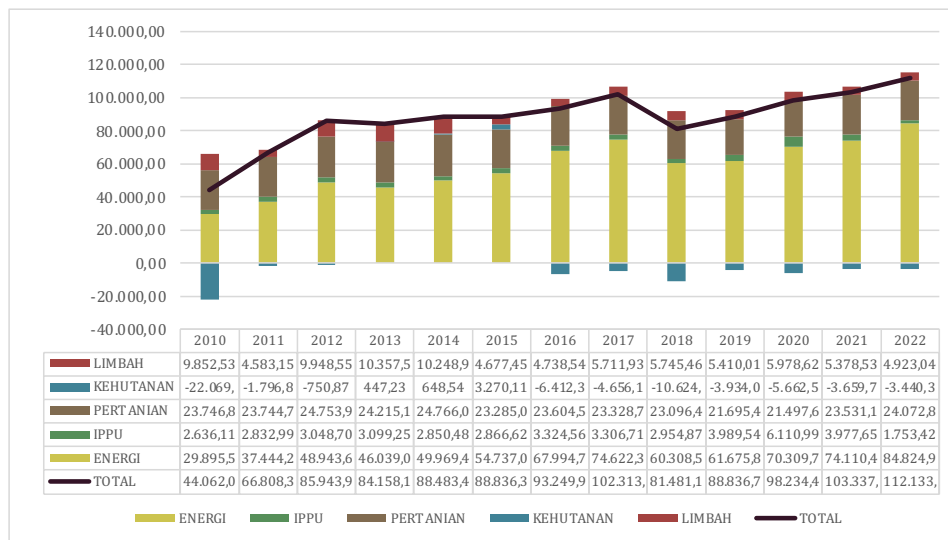
Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.3.

Tren Kenaikan Suhu Udara Rata-Rata Tahunan Provinsi Jawa Tengah

Terjadinya perubahan iklim berkaitan dengan emisi gas rumah kaca (GRK). Emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 sebesar 112.133,9 GgCO₂eq meningkat signifikan dari tahun 2010 sebesar 44.062,09 GgCO₂eq dengan peningkatan sebesar 68.071,81 GgCO₂eq selama kurun waktu 12 tahun. Pada tahun 2022, sektor energi menjadi penyumbang terbesar emisi GRK di Jawa Tengah dengan total emisi sebesar 84.824,93 GgCO₂e (75,65 persen dari total emisi GRK), disusul sektor pertanian sebesar 24.072,82 GgCO₂e (21,46 persen), dan sektor limbah sebesar 4.923,04 GgCO₂e (4,39 persen).

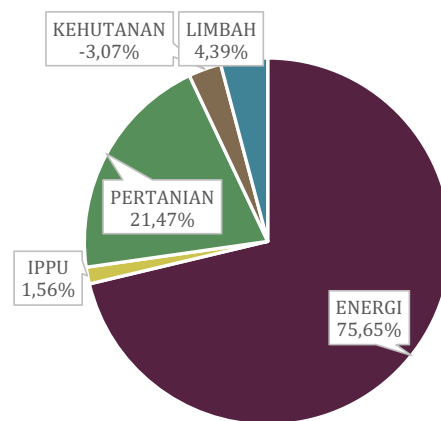
Peningkatan emisi GRK pada periode 2010-2022 tersebut didominasi oleh peningkatan emisi pada sektor energi. Selama periode tersebut, sektor energi meningkat 283,74 persen dari 29.895,59 GgCO_{2e} pada tahun 2010 menjadi 84.824,93 GgCO_{2e} pada tahun 2022. Emisi GRK sektor energi ini didominasi oleh pembakaran bahan bakar di pembangkit listrik dan transportasi yang terus meningkat. Pembakaran pada pembangkit listrik menyumbang lebih dari 44 persen, sedangkan transportasi menyumbang lebih dari 14 persen dari total emisi GRK di Jawa Tengah. Pada sektor pertanian, emisi GRK didominasi oleh lepasnya gas metan (CH₄) dari budidaya padi dan lepasnya gas N₂O dari pengolahan tanah. Lebih dari 14 persen total emisi GRK di Jawa Tengah diakibatkan oleh budidaya padi dan 8 persen akibat lepasnya gas N₂O. Sementara itu, emisi dari sektor limbah didominasi oleh limbah cair domestik yang menyumbang sekitar 3 persen dari total emisi GRK Jawa Tengah.



Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Gambar 2.4.

Tren Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2022



Sumber: Laporan IGRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Gambar 2.5.

Kontribusi Sektor Terhadap Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 (%)

Secara akumulasi, total capaian penurunan emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga tahun 2023 mencapai 11,6 juta ton CO_{2e} (status data final). Angka ini merupakan kinerja penurunan emisi GRK yang dilaporkan oleh provinsi, kabupaten/kota dan pihak nonpemerintah di Jawa Tengah. Capaian

penurunan tersebut berasal dari 3.953 kegiatan. Dari sisi intensitas emisi, saat ini intensitas emisi GRK di Provinsi Jawa Tengah sebesar 2,43 ton CO₂eq/milyar, mengindikasikan bahwa setiap satu milyar rupiah dari aktivitas pembangunan yang dilakukan di Jawa Tengah berpotensi menghasilkan emisi GRK sebesar 2,43 ton CO₂eq. Sementara itu, capaian penurunan pada periode tahun 2021-2023 berdasarkan data yang telah dilaporkan melalui Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon (AKSARA) yaitu sebesar 1.934.671,81 ton CO₂eq.

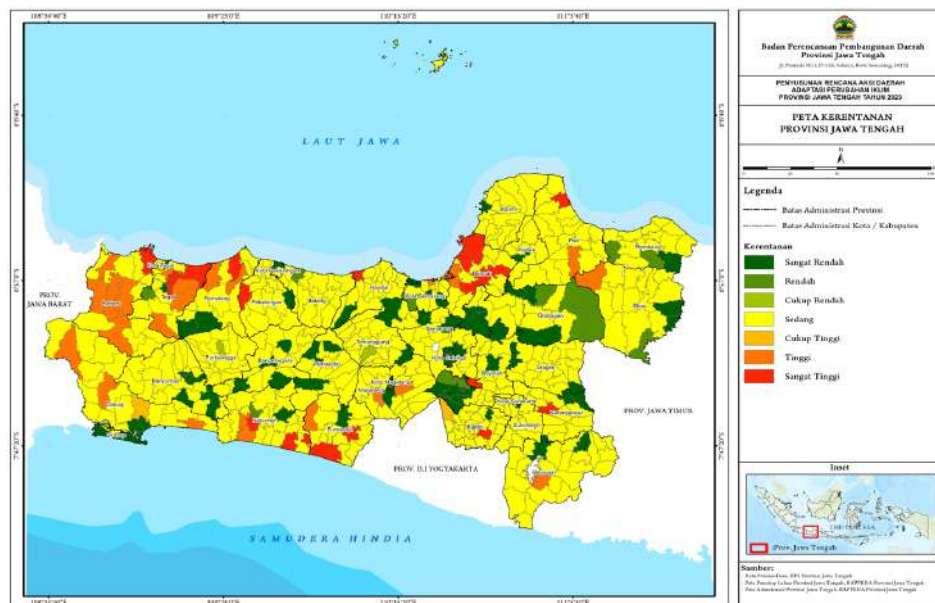
Beberapa sektor berperan dalam penurunan emisi GRK di Jawa Tengah selama periode 2021-2023 di antaranya air limbah, *blue carbon*, energi, *industrial process and production use* (IPPU), kehutanan dan lahan gambut, persampahan, pertanian, dan transportasi. Dari delapan sektor tersebut, penurunan emisi paling tinggi berasal dari sektor persampahan sebesar 419.650,72 ton CO₂eq atau 21,69 persen, sektor kehutanan dan lahan gambut sebesar 405.096,18 ton CO₂eq atau 20,94 persen, dan sektor energi sebesar 366.154,31 ton CO₂eq atau 18,93 persen. Sedangkan kontribusi paling rendah adalah *blue carbon* sebesar 16.028,52 ton CO₂eq atau 0,83 persen.

Perubahan iklim berdampak terjadinya bencana. Risiko bencana yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah juga disebabkan oleh adanya perubahan iklim seperti curah hujan yang tinggi, kenaikan muka air laut di wilayah Pantai Utara Jawa, dan cuaca ekstrem. Dampak dari perubahan iklim sangat dirasakan oleh wilayah Pantai Utara Jawa terutama Tanjung Emas, Demak, Pekalongan yang merupakan wilayah terdampak rob. Adanya pertumbuhan industri di Pantai Utara Jawa Pekalongan, Batang, Demak, Kota Semarang juga akan memperparah kondisi rob di wilayah tersebut. Sehingga perlu adanya kebijakan terkait pembatasan kegiatan industri di wilayah pesisir Pantai Utara Jawa. Dampak lain adanya perubahan iklim yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah meliputi:

- Terjadinya kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh pemanasan global menyebabkan kerusakan tambak di daerah pesisir;
- Ekosistem laut, pesisir dan pantai memburuk;
- Peningkatan intensitas cuaca ekstrem, memanasnya cuaca yang menyebabkan terjadinya kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, gagal panen, dan gelombang tinggi, serta meningkatnya penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) dan malaria;
- Pemanasan global mempengaruhi keanekaragaman hayati, perubahan distribusi, jumlah populasi, kepadatan populasi dan kebiasaan flora dan fauna.

Berdasarkan *Indonesian Journal of Oceanography* (2021), terjadi peningkatan nilai muka air laut sejak tahun 1993 sekitar 37,545 mm per tahun. Tren kenaikan tercepat muka air laut di Laut Jawa mencapai nilai 72,313 mm pada tahun 2015-2016, sedangkan tren paling lambat terjadi pada tahun 2002-2005 sekitar 16,7 mm. Perubahan tren muka air laut yang ekstrem terjadi pada tahun 1996-1998 dan pada tahun 2010-2016 dikarenakan terjadinya fenomena El Nino dan La Nina. Kenaikan muka air laut akan berdampak pada terjadinya intrusi air laut atau rob. Penyebab peningkatan kenaikan muka air laut, khususnya pada Provinsi Jawa Tengah, dipengaruhi oleh perubahan iklim serta amblesan tanah dampak dari penyedotan air tanah. Hasil kajian kerentanan iklim Jawa Tengah menyebutkan bahwa dari 576 kecamatan di Jawa Tengah terdapat 23 kecamatan (4 persen) di

Jawa Tengah berada pada kategori kerentanan sangat tinggi dan 24 kecamatan (4 persen) berada pada kategori kerentanan tinggi. Sedangkan mayoritas kecamatan berada pada kategori kerentanan sedang sebanyak 442 kecamatan (77 persen).



Sumber: Dokumen Rencana Aksi Adaptasi Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.6.

Peta Kerentanan Terhadap Perubahan Iklim Provinsi Jawa Tengah

Selanjutnya, terkait dengan **daya dukung dan daya tampung** di Jawa Tengah digambarkan dengan kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) diproyeksikan akan meningkat dimasa mendatang. Kelangkaan pangan disebabkan oleh penambahan jumlah penduduk, meningkatnya kualitas hidup manusia, dan berkembangnya industri yang memanfaatkan lahan produktif. Sementara itu, krisis air bersih menjadi fenomena yang disebabkan penanganan lingkungan dan aset alam yang tidak terkendali. Pengelolaan sumber-sumber air bersih yang tidak terkendali menyebabkan terjadinya penurunan kualitas dan ketersediaan sumber air bersih.

Daya dukung air mengalami tren penurunan menuju kelangkaan pada sejumlah wilayah di Jawa Tengah dengan rasio daya dukung air pada tahun 2022 sebesar 0,95 dan diperkirakan menjadi sebesar 0,74 pada tahun 2045. Apabila dilihat dari distribusi wilayah, dari total wilayah Jawa Tengah status daya dukung dan daya tampung air pada tahun 2022 yang sudah terlampaui mencapai 47,55 persen dan yang belum terlampaui sebesar 52,45 persen, dengan defisit sebesar 1.686.637.322,01 m³/tahun. Sedangkan pada tahun 2045, status daya dukung dan daya tampung air diproyeksikan terlampaui mencapai 58,57 persen dan yang belum terlampaui sebesar 41,43 persen dari total wilayah Jawa Tengah dengan defisit sebesar 8.889.581.166,53 m³/tahun. Berdasarkan pemetaan daya dukung dan daya tampung air Jawa Tengah, pada tahun 2022 terdapat 20 kabupaten/kota dengan status agregat daya dukung dan daya tampung air terlampaui, dan diproyeksikan akan bertambah menjadi 26 kabupaten/kota pada tahun 2045.



Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.7.

**Prakiraan Daya Dukung Air Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029 dan 2045
Business as Usual (BAU)**

Konservasi air tanah juga terus diupayakan di tengah tingginya eksploitasi air tanah baik oleh sektor industri, pertanian maupun rumah tangga. Air tanah memiliki peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat Provinsi Jawa Tengah. Kondisi yang belum seimbang antara pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dan ketersediaan air baku yang belum memadai mengakibatkan potensi air tanah semakin terancam. Pengelolaan air tanah saat ini berbasis Cekungan Air Tanah (CAT) pada Wilayah Sungai (WS) karena prinsip pengelolaan sumber daya air harus ada keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Air tanah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dari ekosistem dan berinteraksi dengan air permukaan.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah bahwa pemanfaatan air tanah yang berlebihan dapat berdampak pada terjadinya *land subsidence* atau amblesan tanah. Kondisi tersebut saat ini telah terjadi di Jawa Tengah terutama pada wilayah pesisir pantai utara Jawa Tengah. Mengacu pada hasil evaluasi zona pemanfaatan dan konservasi di CAT Jawa Tengah tahun 2023, CAT Semarang-Demak dan CAT Pekalongan-Pemalang terdapat zona rusak. Dan kejadian *land subsidence* juga tercatat terjadi di kabupaten/kota di wilayah pesisir pantai utara di antaranya Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak. Amblesan tanah yang terjadi bervariasi dengan laju penurunan 1-20 cm per tahun berdasarkan hasil pengukuran geodetik, geo-hidrologi, geoteknik, dan lain-lain. Meskipun demikian, kejadian *land subsidence* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu dikaji secara komprehensif untuk mengetahui faktor utama yang berperan dengan mempertimbangkan kondisi geologi permukaan maupun bawah permukaan. Baik disebabkan oleh faktor antropogenik (aktivitas manusia) seperti pengambilan air tanah yang berlebihan, efek pembebanan (*loading effect*), maupun faktor penyebab lain yang sifatnya non-antropogenik, yaitu kompaksi alamiah dari jenis tanah lunak dan efek *tectonic subsidence* akibat dari pergerakan patahan bumi. Hampir semua kota di pesisir utara Jawa Tengah terbentuk di atas tanah aluvial yang rapuh.

Kondisi air tanah di Jawa Tengah saat ini ditunjukkan dengan Indeks Ketersediaan Air Tanah yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun, yaitu dari sebesar 3,06 pada tahun 2018 menjadi 3,76 pada tahun 2023. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen dalam hal konservasi air tanah dengan menjaga ketersediaan air tanah (indeks batas minimum aman konservasi air tanah di atas 1,67). Capaian ketersediaan air tanah diintervensi melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian

pemanfaatan air tanah sesuai kewenangan serta pembangunan sarana prasarana/infrastruktur konservasi air tanah.

Selanjutnya, berdasarkan proyeksi pertumbuhan populasi penduduk dan juga ketersediaan lahan pertanian yang dikendalikan melalui RTRW Provinsi Jawa Tengah, diperkirakan daya dukung pangan pada tahun 2045 masih belum terlampaui atau surplus. Meskipun belum terlampaui, namun rasio daya dukung dan daya tampung pangan tahun 2045 diproyeksikan tetap menurun sebesar 16,75 persen dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu menjadi sebesar 1,87 pada tahun 2045 dari sebesar 1,97 pada tahun 2022. Selain itu daya dukung pangan juga semakin menurun dikarenakan meningkatnya alih fungsi lahan pangan ke penggunaan lain. Hal tersebut diperparah dengan adanya dampak dari perubahan iklim yang berakibat meningkatnya serangan hama, penyakit, dan kekeringan yang dapat mengakibatkan gagal panen. Daya dukung pangan juga dipengaruhi oleh ketersediaan dan pasokan air yang juga semakin menurun terutama akibat persaingan dengan penggunaan lain. Kondisi ini memberikan dampak buruk bagi Jawa Tengah khususnya pada ketersediaan dan keterjangkauan atau akses pangan. Selain itu, menurunnya keanekaragaman hayati juga berdampak pada penurunan keragaman sumber pangan.

Daya dukung pangan Jawa Tengah pada tahun 2045 diproyeksikan memiliki total ketersediaan 5.998.603,24 ton beras dan kebutuhan mencapai 3.210.938,94 ton beras, sehingga kondisinya masih surplus sebesar 2.787.664,30 ton beras. Apabila dilihat berdasarkan wilayahnya dari hasil pemetaan dengan sistem grid, terdapat 18,80 persen wilayah dengan daya dukung pangan sudah terlampaui dan 81,20 persen wilayah dalam kondisi daya dukung pangan belum terlampaui. Kondisi daya dukung pangan di setiap kabupaten/kota berbeda sesuai kondisi wilayah tersebut terutama penggunaan lahan dan jumlah penduduk. Apabila dilihat di masing-masing kabupaten/kota maka seluruh kota daya dukung pangannya terlampaui.



Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.8.

Prakiraan Daya Dukung Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029 dan 2045 *Business as Usual (BAU)*

Lebih lanjut rincian status daya dukung dan daya tampung air dan pangan di Jawa Tengah pada tahun 2022, 2029, dan 2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.
Proyeksi Status Daya Dukung dan Daya Tampung di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2029 dan 2045

Uraian	2022	2029	2045
Air			
Ketersediaan Air (m ³ /tahun)	31.032.527.608,75	29.400.411.285,16	27.150.972.550,94
Kebutuhan Air (m ³ /tahun)	32.719.164.930,76	35.772.943.813,21	36.040.553.730,01
Selisih (m ³ /tahun)	-1.686.637.322,01	-6.372.532.528,05	-8.889.581.166,53
Status	Terlampau	Terlampau	Terlampau
Rasio (ketersediaan/kebutuhan)	0,95	0,82	0,75
Pangan			
Ketersediaan Pangan Beras (ton/tahun)	5.508.531,00	6.998.603,24	5.998.603,24
Kebutuhan Pangan Beras (ton/tahun)	2.792.243,71	2.977.399,72	3.210.938,93
Selisih (m ³ /tahun)	2.716.287,29	3.021.203,52	2.787.664,31
Status	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui	Belum Terlampaui
Rasio (ketersediaan/kebutuhan)	1,97	2,01	1,87

Sumber: KLHS RPJPD Provinsi Jawa Tengah, 2023

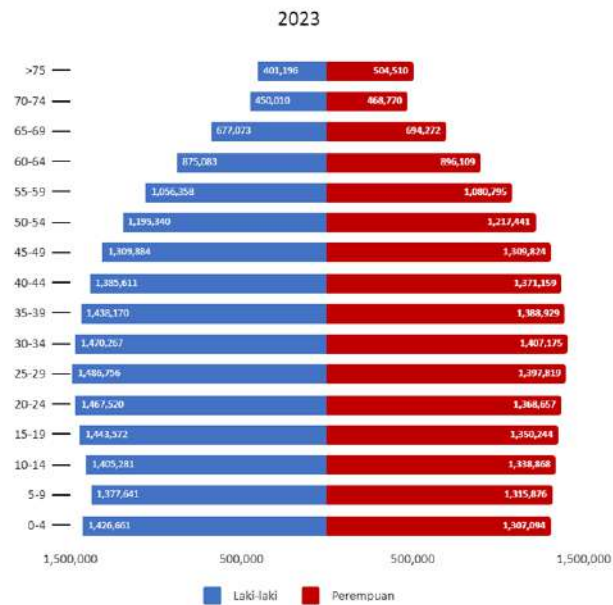
Selain air dan pangan, kebutuhan akan energi juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan penduduk, laju perkembangan industri, serta semakin tingginya arus lalu lintas barang dan jasa, menyebabkan tingginya tingkat kebutuhan energi. Dengan semakin berkurangnya sumber-sumber energi dan belum efektifnya upaya diversifikasi sumber energi, diperkirakan minyak dan gas bumi menjadi sumber daya strategis yang semakin diperebutkan. Di sisi lain porsi EBT dalam bauran energi Jawa Tengah sebesar 15,98 persen (2023). Hal ini menunjukkan masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil.

Sementara itu, jika mencermati data intensitas energi primer di Provinsi Jawa Tengah menggambarkan angka yang cukup baik jika dibandingkan dengan capaian Nasional. Capaian intensitas energi primer Provinsi Jawa Tengah (2023) yaitu sebesar 91,02 Setara Barel Minyak (SBM)/milyar rupiah. Sedangkan capaian intensitas energi primer nasional pada tahun 2023 sebesar 132,6 SBM/milyar rupiah. Artinya untuk menghasilkan satu milyar rupiah Jawa Tengah harus mengonsumsi 91,02 SBM. Sedangkan nasional untuk menghasilkan satu milyar rupiah harus mengonsumsi 132,6 SBM. Berdasarkan data tersebut menandakan bahwa konsumsi energi Jawa Tengah lebih efisien jika dibandingkan dengan konsumsi energi nasional. Energi pada dasarnya memiliki harga yang mahal karena cadangan yang ada akan semakin menipis. Namun karena adanya subsidi dari Pemerintah Pusat, masyarakat merasa bahwa energi sangat murah dan belum memiliki pola pikir untuk berhemat energi. Sehingga perlu adanya program konservasi energi agar energi dapat dimanfaatkan secara efisien dan mengurangi potensi krisis energi.

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2010-2023 mengalami peningkatan. Tahun 2010, jumlah penduduk Jawa Tengah sebanyak 33.382.657 jiwa, dan tahun 2023 sebanyak 37.540.962 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,16 persen. Berdasarkan data tahun 2023, kepadatan penduduk tertinggi di Kota Surakarta sebanyak 11.277 jiwa/km², dan terendah di Kabupaten Blora sebanyak 461 jiwa/km².

Komposisi penduduk Jawa Tengah tahun 2023 berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 50,25 persen laki-laki dan 49,75 persen perempuan, dengan rasio jenis kelamin sebesar 101,03. Berdasarkan kelompok umur didominasi oleh penduduk kelompok umur produktif dengan angka ketergantungan sebesar 44,12 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 44 orang penduduk usia non produktif.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.9.

Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 (Jiwa)

Saat ini, Jawa Tengah berada pada masa bonus demografi. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Jawa Tengah didominasi oleh Generasi Z, Generasi Milenial, dan Generasi X. Proporsi Generasi Z sebanyak 25,31 persen dari total populasi, Generasi Milenial sebanyak 24,93 persen dari total populasi, dan Generasi X sebanyak 22,53 persen dari total populasi Jawa Tengah. Seiring dengan membaiknya kualitas hidup masyarakat, usia harapan hidup masyarakat Jawa Tengah juga semakin meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk lansia. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa Jawa Tengah ke depan harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju *ageing population*.

Kondisi demografi Jawa Tengah didukung dengan kinerja kependudukan yang digambarkan dari beberapa indikator kependudukan antara lain *Total Fertility Rate* (TFR), *modern Contraceptive Prevalence Rate* (mCPR), *Unmetneed KB*, dan *Age Specific Fertility Rate* (ASFR). TFR Jawa Tengah pada tahun 1971 sebesar 5,33 menurun menjadi 2,04 pada tahun 2023 yang menggambarkan kebijakan pengendalian penduduk berhasil bahkan melampaui replacement level 2,1. Namun kondisi ini juga sekaligus menjadi peringatan jika TFR terus menurun akan menjadi ancaman bagi keberlangsungan sumber daya produktif Jawa Tengah di masa yang akan datang.

Pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) di Jawa Tengah berpengaruh terhadap keberhasilan pengendalian penduduk di Jawa Tengah. Capaian mCPR Jawa Tengah selama tahun 2014-2023 tercatat terus menurun, pada tahun 2014

sebesar 78,57 menjadi 65,70 pada tahun 2023. *Unmentneed* KB juga semakin menurun, dimana pada tahun 2014 sebesar 10,56 menjadi 8,6 pada tahun 2023. Demikian juga dengan capaian ASFR pada kelompok umur 15-19 tahun yang terus membaik sejak tahun 2017 yang sebesar 38 menjadi 17,3 pada tahun 2023.

Karakteristik penduduk Jawa Tengah dikenal beragam. Berbagai macam suku tinggal di wilayah Jawa Tengah dengan segala perbedaan yang cukup beragam. Suku terbanyak yang tinggal di Jawa Tengah adalah suku Jawa yang mendiami sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Suku lainnya antara lain suku Sunda Priangan yang sebagian besar tinggal di wilayah perbatasan dengan Jawa Barat (Cilacap dan Brebes), suku Cina yang cukup banyak tinggal di Kota Semarang, suku Batak, Madura, Arab, Betawi, Melayu, dan suku lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Dari kepercayaan atau agama, sebagian besar penduduk Jawa Tengah memeluk agama Islam, diikuti dengan agama Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya. Di wilayah Jawa Tengah juga tercatat ada sebagian kecil penduduk yang menganut penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beberapa wilayah tercatat memiliki kelompok penduduk tersebut antara lain di Kota Semarang dan Kabupaten Wonogiri.

Jawa Tengah juga masih memiliki kelompok masyarakat adat yang masih memiliki dan berpegang pada hukum adat. Terdapat beberapa kelompok masyarakat adat yang masih eksis di Jawa Tengah salah satunya adalah kelompok masyarakat adat *sedulur sikep* atau yang juga dikenal dengan “Wong Samin”. Masyarakat adat tersebut masih mempertahankan dan menjalankan ajaran Samin yang mengembangkan ajaran hidup dilandaskan pada nilai-nilai kesetaraan/kesamaan (egaliter), kejujuran/pols, kesederhanaan, dan kearifan dalam bingkai filosofi kebersamaan dan gotong royong. Kelompok masyarakat adat lain yang masih eksis antara lain masyarakat adat kampung dan hutan Jalawastu Brebes yang memiliki adat istiadat *ngasa* dan hukum adat, masyarakat Kalang yang memiliki ritual Kalang Obong, dan masyarakat Bonokeling Banyuman yang memiliki adat istiadat *unggah-ungghahan* dan *jamasan* pusaka serta hukum adat.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

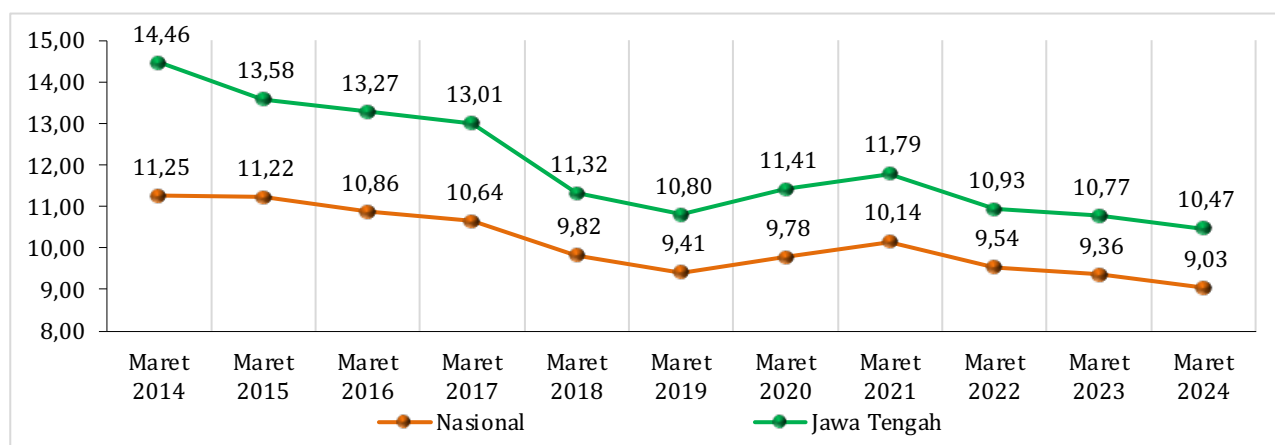
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

Kondisi kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah antara lain digambarkan dengan **kondisi kemiskinan** termasuk kemiskinan ekstrem. Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Tengah pada periode Maret 2014-2024 cenderung mengalami penurunan dari 14,46 persen pada tahun 2014 menjadi 10,47 persen pada tahun 2024. Sedangkan untuk kondisi kemiskinan ekstrem, terjadi penurunan sebesar 0,86 persen dari 1,97 persen pada tahun 2022 menjadi 1,11 persen pada tahun 2023.

Secara absolut dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah penduduk miskin pada tahun 2024 turun sebanyak 1.132,12 ribu jiwa dari 4.836,45 ribu orang menjadi 3.704,33 ribu jiwa, sedangkan dibandingkan dengan tahun 2023 turun 87,11 ribu jiwa dari 3.791,50 ribu jiwa. Berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk perkotaan tahun 2024 sebanyak 1.835,51 ribu jiwa menurun sebanyak 109,78 ribu jiwa dari tahun 2014 yang sebanyak 1.945,29 ribu jiwa, namun meningkat

13,38 ribu jiwa dari tahun 2023 yang sebanyak 1.821,66 ribu jiwa. Di perdesaan, jumlah penduduk miskin tahun 2024 sebanyak 1.868,82 ribu jiwa menurun sebanyak 1.022,35 ribu jiwa dari tahun 2014 yang sebanyak 2.891,17 ribu jiwa, dan menurun sebanyak 101,02 ribu jiwa dari tahun 2023 yang sebanyak 1.969,84 ribu jiwa.

Jika dibandingkan dengan nasional, kondisi angka kemiskinan Jawa Tengah berada di atas nasional. Namun dari sisi relevansi, kecenderungan perubahan angka kemiskinan Jawa Tengah pada periode 2014-2024 sejalan dengan angka kemiskinan nasional.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.10.

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2024 (Persen)

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). GK adalah nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan nonmakanan yang dipergunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. GK Jawa Tengah pada tahun 2024 sebesar Rp507.001 per kapita per bulan, meningkat 6,16 persen dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp477.580 per kapita per bulan, dan meningkat sebesar 85,68 persen dibandingkan tahun 2014 yang sebesar Rp273.056 per kapita per bulan. GK tahun 2024 meliputi GK makanan sebesar Rp383.285 per kapita per bulan (75,60 persen) dan GK bukan makanan sebesar Rp123.716 per kapita per bulan (24,40 persen).

Karakteristik rumah tangga miskin Jawa Tengah ditunjukkan antara lain kepala keluarga wanita, status pekerjaan, sumber penghasilan utama, serta jenjang pendidikan tertinggi kepala keluarga. Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) tahun 2022, jumlah penduduk miskin sebanyak 3.803,49 ribu jiwa (desil 2 persentil 14). Karakteristik rumah tangga miskin menurut data regsosek tahun 2022 tersebut, wanita yang menjadi kepala keluarga sebanyak 37,26 persen, status pekerjaan kepala keluarga yang tidak bekerja sebesar 40,76 persen, lapangan usaha utama kepala keluarga (pada sektor pertanian tanaman padi dan palawija) sebesar 32,11 persen, serta jenjang pendidikan tertinggi kepala keluarga yang tamat SD sebesar 55,88 persen dan yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 24,02 persen.

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan adalah indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. P1 Provinsi Jawa Tengah pada tahun periode tahun 2014-2024 menurun dari 2,254 pada tahun 2014 menjadi 1,640 pada tahun 2024. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin baik karena semakin dekat dengan garis kemiskinan

Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Tahun 2014 P2 Jawa Tengah sebesar 0,565 membaik menjadi 0,374 pada tahun 2024. Kondisi ini diartikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin dari tahun ke tahun semakin menurun atau semakin baik.

Di sisi lain upaya penanggulangan kemiskinan melalui **perlindungan sosial** di Jawa Tengah masih dihadapkan belum akuratnya penerima manfaat dan belum menjangkau seluruh penduduk rentan. Hal ini dikarenakan data belum mutakhir dan belum adanya sistem yang terintegrasi. Tercatat dari total penduduk miskin di Jawa Tengah sebesar 3,8 juta jiwa hanya sekitar 1,8 juta penduduk atau 47,36 persen yang terpenuhi bantuan sosial baik berasal dari pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu dari sisi kesehatan dari total penduduk Jawa Tengah per tahun 2023 tercatat 94,05 persen telah tercakup jaminan sosial kesehatan. Ke depan diharapkan perlindungan sosial dapat menjangkau seluruh penduduk rentan dan secara adaptif saat kondisi darurat dapat menjangkau penduduk terdampak.

Dari gambaran kemiskinan di atas, kondisi kemiskinan di Jawa Tengah mengalami perbaikan namun masih diperlukan upaya strategis dalam penanggulangan kemiskinan yang lebih efektif.

Kondisi kemiskinan Jawa Tengah yang semakin membaik dipengaruhi oleh kondisi perekonomian daerah yang juga semakin baik. Perekonomian Jawa Tengah dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang stabil, tumbuh positif, dan berhasil menghadapi ancaman dan tekanan global. Sejak tahun 2005, **pertumbuhan ekonomi** Jawa Tengah tumbuh positif pada kisaran angka 5 persen, meskipun pada tahun 2020-2021 mengalami kontraksi -2,65 persen dan 3,33 persen akibat terkena dampak pandemi Covid-19. Tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah telah pulih seperti sebelum adanya pandemi Covid-19 yaitu tumbuh sebesar 4,98 persen, meskipun melambat jika dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,31 persen. Pelambatan ini terjadi dikarenakan adanya pelambatan ekonomi global akibat konflik geopolitik yang belum berakhir dan adanya fenomena *el nino* yang menyebabkan turunnya beberapa hasil komoditas pertanian.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.11.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2005-2023 (Persen)

Tingkat **inflasi** di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2016-2021 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1-3 persen, bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Namun, pada tahun 2022 terjadi kenaikan inflasi di Jawa Tengah menjadi sebesar 5,63 persen. Pada tahun 2023 terjadi penurunan kembali menjadi sebesar 2,89 persen, meskipun tingkat inflasi Jawa Tengah masih lebih tinggi dibanding tingkat inflasi nasional. Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya semua indeks kelompok pengeluaran terutama komponen bahan bakar serta makanan dan minuman. Andil inflasi tahun 2023 dikarenakan terdapat kenaikan pada harga bensin, cabai merah, beras, cabai rawit, dan gula pasir. Cuaca ekstrem (*el nino*) menjadi salah satu penyebab beberapa komoditas gagal panen sehingga terjadi lonjakan harga.



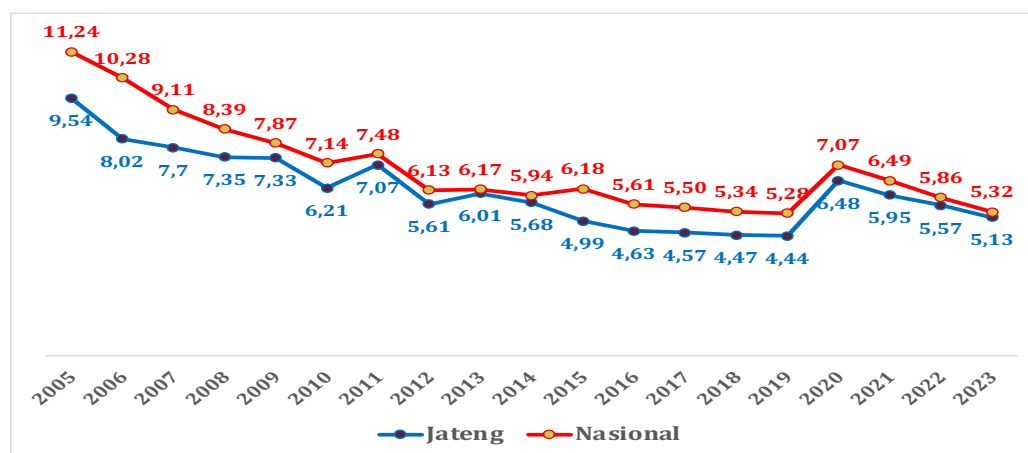
Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.12.

Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2023 (Persen)

Dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil juga berpengaruh terhadap menurunnya pengangguran di Jawa Tengah. **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)** Jawa Tengah tahun 2005 sebesar 9,54 persen berhasil diturunkan menjadi 5,13 pada tahun 2023. Kondisi ini didukung dengan perkembangan wirausaha di Jawa Tengah yang semakin baik, ditandai dengan rasio kewirausahaan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 3,23 persen berada di atas capaian nasional sebesar 2,86 persen. Demikian pula dengan Tingkat Partisipasi Angkatan kerja

(TPAK) tahun 2023 tercatat meningkat sebesar 0,88 persen poin dari sebelumnya 70,84 persen pada tahun 2022 menjadi 71,72 persen pada tahun 2023. Dilihat dari jenis kelamin, TPAK laki-laki tahun 2023 sebesar 84,52 persen naik 0,78 persen poin dibanding tahun 2022, sementara TPAK perempuan sebesar 58,92 persen pada tahun 2023.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.13.

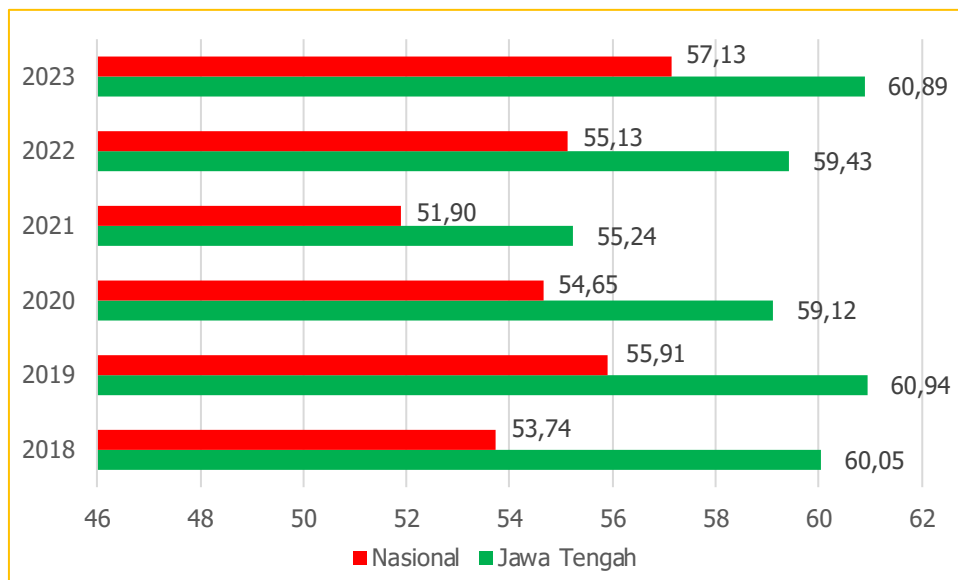
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2005-2023 (Persen)

Perekonomian daerah Jawa Tengah selain mampu tumbuh stabil, juga tumbuh merata dan berpengaruh terhadap penurunan ketimpangan pendapatan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan **rasio gini** Jawa Tengah yang menurun dalam 10 tahun terakhir. Tahun 2013 rasio gini Jawa Tengah sebesar 0,39 menurun menjadi 0,369 pada tahun 2023 (Maret).

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

Kebudayaan menjadi investasi dalam pembangunan masa depan dan peradaban bangsa, sehingga diharapkan dapat memperkuat jati diri dan karakter bangsa, pemererat persatuan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kinerja pembangunan kebudayaan diukur melalui **Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**. IPK merupakan indikator yang relatif baru dan dirilis pertama kali tahun 2018, memiliki 7 dimensi komprehensif yaitu ekonomi budaya, pendidikan, warisan budaya, ketahanan sosial budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Perkembangan IPK di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2018 hingga 2023 cenderung fluktuatif dan berada di atas capaian nasional. Dari ke-7 dimensi IPK, dimensi budaya literasi cenderung stagnan pada posisi ke-3 atau empat terbawah, menandakan bahwa budaya literasi di Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan.

Demikian pula dengan kinerja aspek ekspresi budaya dan ekonomi budaya di Jawa Tengah yang belum mencapai angka 50 dari rentang nilai 0 hingga 100, meskipun Jawa Tengah sudah berada di atas capaian nasional. Kondisi ini mengindikasikan bahwa wadah atau media untuk mengekspresikan budaya masih terbatas. Selain itu, aspek ekonomi budaya yang masih rendah salah satunya disebabkan karena pengembangan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan untuk peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat belum optimal.



Sumber: ipk.kemendikbud.go.id

Gambar 2.14.
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2018-2023

Perwujudan nilai dan karakter masyarakat dimulai dari usia dini melalui keluarga maupun pendidikan formal. Selain skor literasi dan numerasi yang digunakan untuk menunjukkan kualitas pendidikan, Kemendikbud melalui Rapor Pendidikan juga menghitung skor **nilai karakter** yang merupakan pengejawantahan internalisasi nilai agama dan budaya dalam membentuk karakter peserta didik. Nilai karakter tersebut menggambarkan tentang bagaimana peserta didik dalam bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai pelajar Pancasila yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, gotong-royong, kreativitas, nalar kritis, kebhinekaan global, serta kemandirian. Pada tahun 2022 dan 2023 rata-rata skor nilai karakter tertinggi di jenjang pendidikan menengah umum (SMA) sebesar 58,51 dan terendah di jenjang pendidikan dasar (SD) sebesar 53,96.

Salah satu pendekatan penting dalam pembentukan sumber daya manusia berkarakter adalah pendekatan keluarga. Kinerja **pembangunan keluarga** di Jawa Tengah ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) yang menunjukkan peningkatan dari angka 56,10 pada 2021 menjadi 63,07 pada 2023 atau termasuk kategori cukup baik/berkembang. Pembangunan keluarga sebagai unit terkecil dan pintu masuk bagi pembangunan sumber daya manusia menghadapi kondisi yang perlu untuk terus mendapat perhatian.

Pembangunan sumber daya manusia yang berwawasan gender dan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pembangunan gender pada satu dekade terakhir menunjukkan kemajuan yang dicerminkan dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang meningkat dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang semakin kecil. **Indeks Pembangunan Gender (IPG)** meningkat dari 91,5 pada tahun 2013 menjadi 92,87 pada tahun 2023. **Indeks Ketimpangan Gender (IKG)** menyempit dari 0,389 pada tahun 2018 menjadi 0,336 pada tahun 2023. Meskipun IPG dan IKG telah menunjukkan kinerja yang membaik namun masih terjadi kesenjangan dalam hal akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan

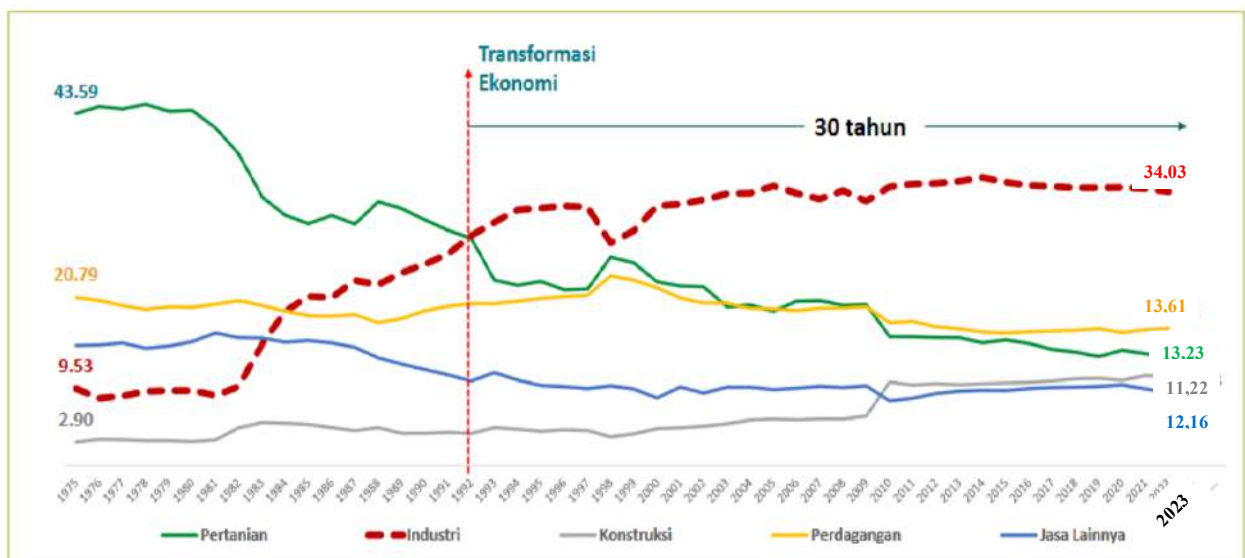
perempuan utamanya pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta keterwakilan pada posisi strategis.

Pembangunan **kualitas hidup anak** ditunjukkan dari indikator perlindungan anak yang mencakup pemenuhan hak anak dan hak khusus anak. Indeks Perlindungan Anak (IPA) menunjukkan perbaikan dari 63,20 pada tahun 2021 menjadi 64,99 pada tahun 2022. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) meningkat dari 60,22 pada tahun 2021 menjadi 62,07 pada tahun 2022. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) juga menunjukkan peningkatan dari 75,66 pada tahun 2021 menjadi 77,04 pada tahun 2022. Meskipun indikator pembangunan kualitas hidup anak menunjukkan kondisi yang membaik, Jawa Tengah masih menghadapi ancaman yang dapat mengganggu kualitas hidup anak, seperti kekerasan pada ranah daring maupun nondaring, pernikahan usia anak, *bullying*, serta perilaku salah lainnya.

2.3. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

Struktur ekonomi Jawa Tengah dari tahun 1993 didominasi oleh sektor industri pengolahan sebagai penyumbang perekonomian terbesar di Jawa Tengah. Sektor berikutnya adalah perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Pergeseran struktur ekonomi Jawa Tengah terjadi sejak tahun 1992 yang mana sektor industri pengolahan menjadi sektor utama dalam struktur ekonomi Jawa Tengah menggeser sektor pertanian. Sektor pertanian meskipun mengalami penurunan namun masih menduduki peringkat kedua dan masih berkontribusi di kisaran 13 persen.



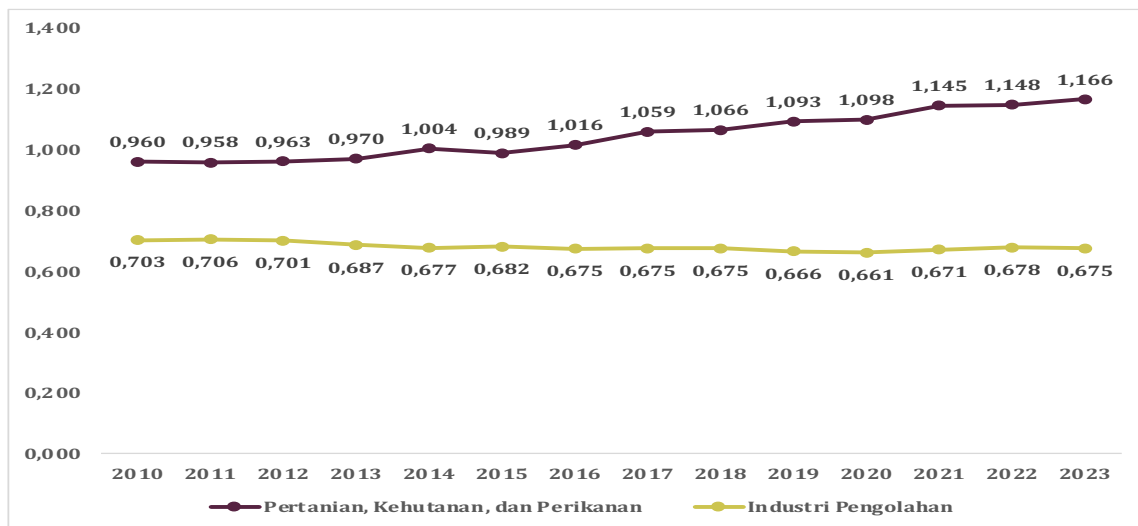
Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.15.

Struktur Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Tahun 1975-2023 (Persen)

Hingga tahun 2023 dapat dilihat kontribusi sektor pertanian terhadap nasional dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (2013-2023) terus mengalami kenaikan yang menunjukkan peran Jawa Tengah dalam mendukung ketahanan pangan nasional menjadi penting. Sejalan dengan kebijakan pusat, Jawa Tengah akan terus mengembangkan pertanian termasuk industri pengolahan pangan. Sektor industri pengolahan merupakan sektor yang sangat penting dalam struktur perekonomian Jawa Tengah, dimana rata-rata kontribusi yang diberikan oleh sektor ini selama 10 tahun terakhir mencapai sekitar 34 persen per tahun. Oleh

karenanya kinerja sektor industri pengolahan sangat menentukan kinerja perekonomian Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan. Jika dibandingkan dengan sektor industri pengolahan nasional, kontribusi sektor industri pengolahan Jawa Tengah baru sekitar 0,6 persen. Berdasarkan pengkategorian, nilai PDRB sektor industri pengolahan terbesar tahun 2023 adalah industri makanan dan minuman sebesar 43,68 persen, disusul industri tembakau sebesar 18,97 persen, industri tekstil dan pakaian jadi 7,64 persen.



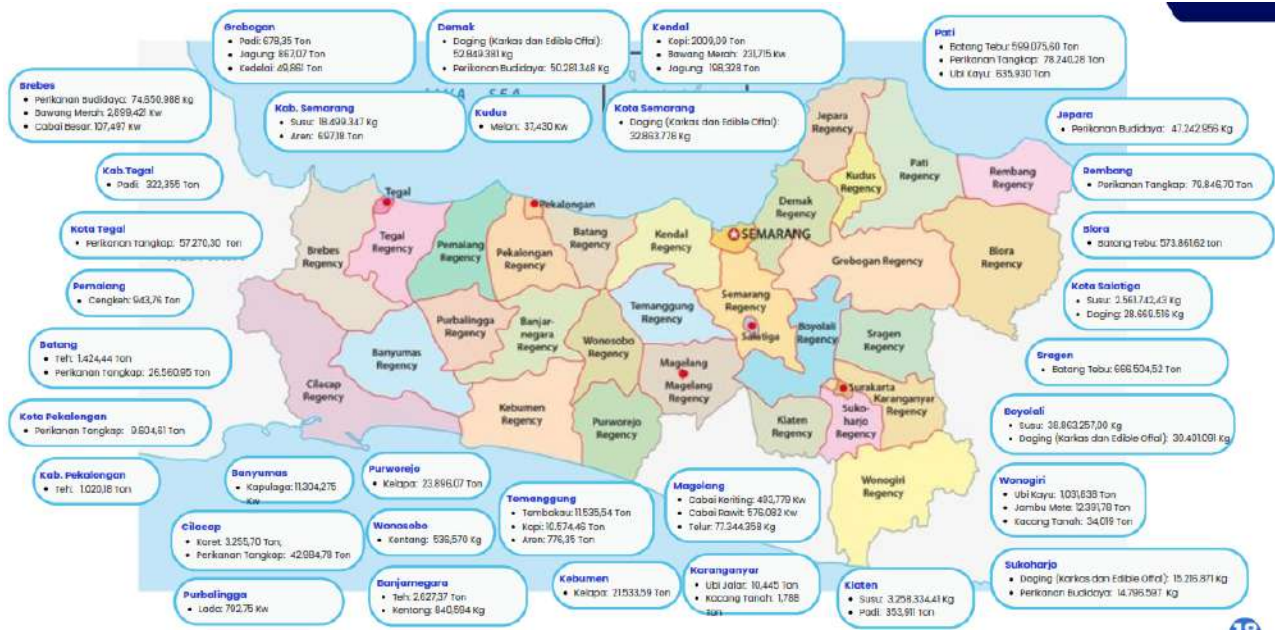
Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.16.

Kontribusi Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan Provinsi Jawa Tengah Terhadap Nasional Tahun 2010-2023 (Persen)

Kebijakan pengembangan industri pengolahan di Jawa Tengah dilakukan sejalan dengan arah kebijakan nasional. Kebijakan nasional untuk mengembangkan kawasan strategis industri Pantura Jawa Tengah (klaster industri alat angkutan dan kendaraan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri pengolahan tembakau, industri furnitur, industri kayu dan barang dari kayu, industri makanan dan minuman, industri kriya dan ekonomi kreatif) dan menjadikan Jawa Tengah sebagai bagian dari rantai nilai industri nasional, maka kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke depan perlu dilakukan optimalisasi pengembangan industri pengolahan di Jawa Tengah sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki untuk meningkatkan kontribusi industri pengolahan baik di Provinsi maupun Nasional.

Jika dilihat dari sektor pertanian secara luas, hampir seluruh wilayah Jawa Tengah memiliki komoditas unggulan yang dapat dilihat dari jumlah produksinya pada tahun 2023. Hal ini mendukung visi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dimana komoditas unggulan tersebut dapat diintervensi melalui kebijakan hilirisasi industri pengolahan pangan 20 tahun ke depan yang lebih mengutamakan potensi lokal. Berikut adalah peta potensi pertanian secara geografis di Jawa Tengah pada tahun 2023.

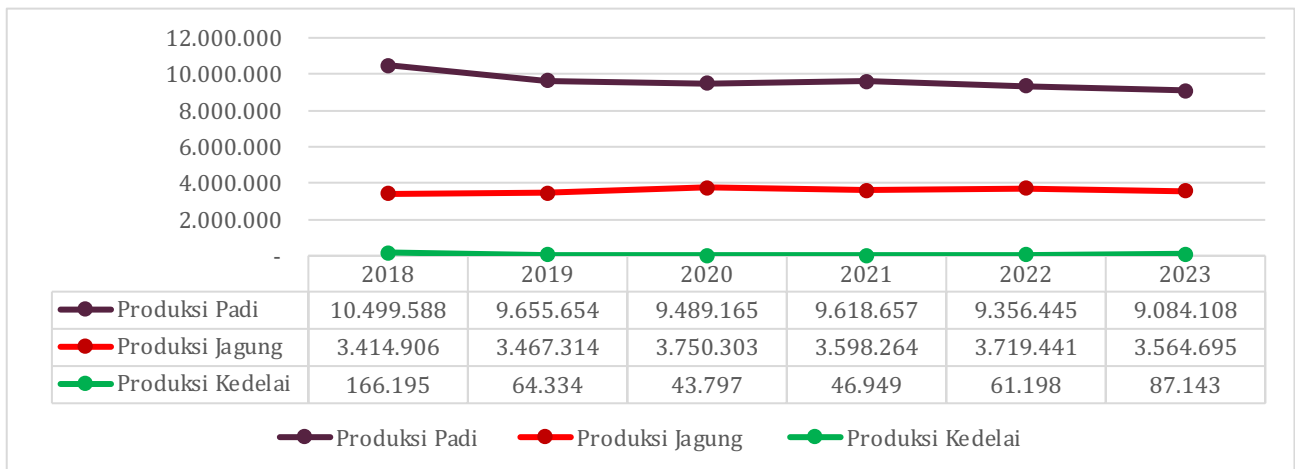


Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024 (diolah)

Gambar 2.17.

Peta Potensi Pertanian Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Komoditas utama sektor pertanian yaitu subsektor tanaman pangan (padi, jagung, dan kedelai). Pada periode tahun 2018-2023, komoditas tanaman pangan cenderung mengalami penurunan. Produksi komoditas padi mengalami penurunan dikarenakan adanya penurunan lahan dan perubahan standar pengukuran produksi komoditas padi. Produksi komoditas jagung mengalami fluktuasi tergantung pada iklim, ketersediaan air, dan benih. Produksi komoditas kedelai mengalami tren menurun dikarenakan menurunnya minat petani terkait daya saing kedelai di pasar karena adanya kedelai impor sehingga menyebabkan menurunnya luas tanam kedelai.

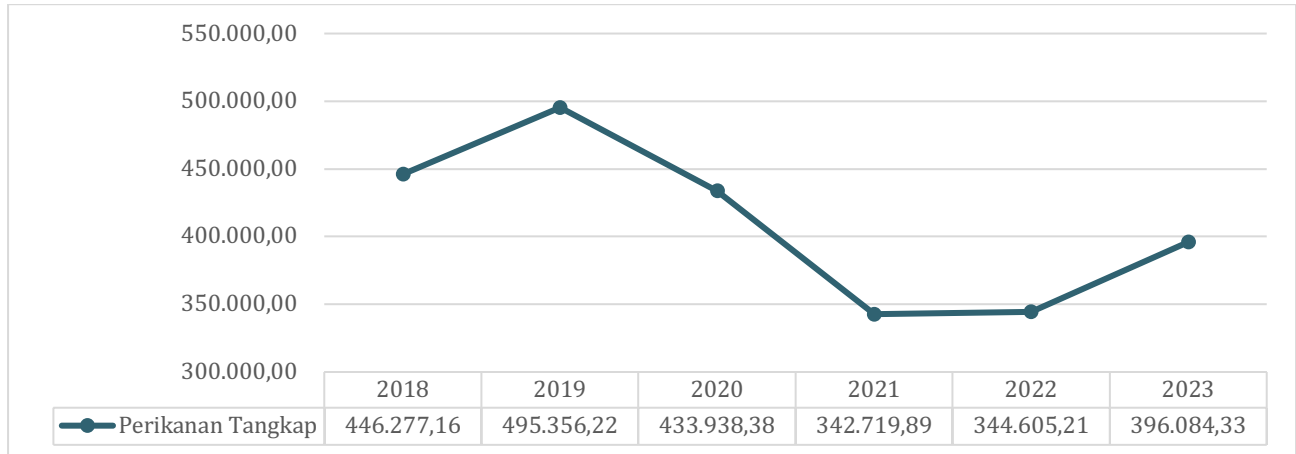


Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.18.

Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Pada subsektor perikanan, produksi perikanan tangkap menunjukkan tren penurunan dari tahun 2018-2023. Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan potensi sumber daya ikan di laut Jawa (WPP-712) sebesar 387.854 ton atau berkurang 36,14 persen. Perkembangan produksi perikanan tangkap ditunjukkan pada gambar di bawah ini.

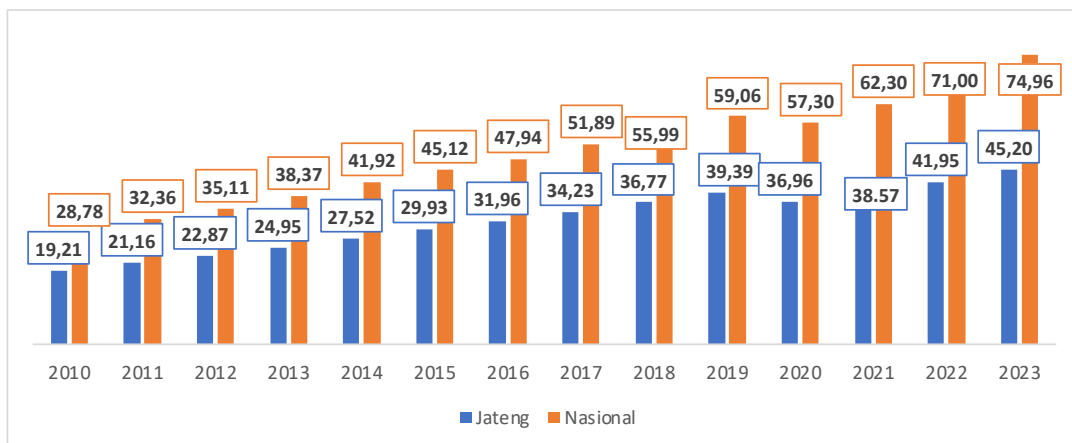


Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.19.

Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Ton/Tahun)

PDRB per kapita Jawa Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat, meskipun masih lebih rendah dari PDRB per kapita nasional. Tahun 2023 PDRB per kapita Provinsi Jawa Tengah sebesar 45,20 juta rupiah, meningkat dari tahun 2010 yang sebesar 19,21 juta rupiah. Stabilitasnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, serta percepatan pemulihan ekonomi Jawa Tengah pasca pandemi Covid-19 berimbas pada kenaikan pendapatan per kapita Jawa Tengah.



Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.20.

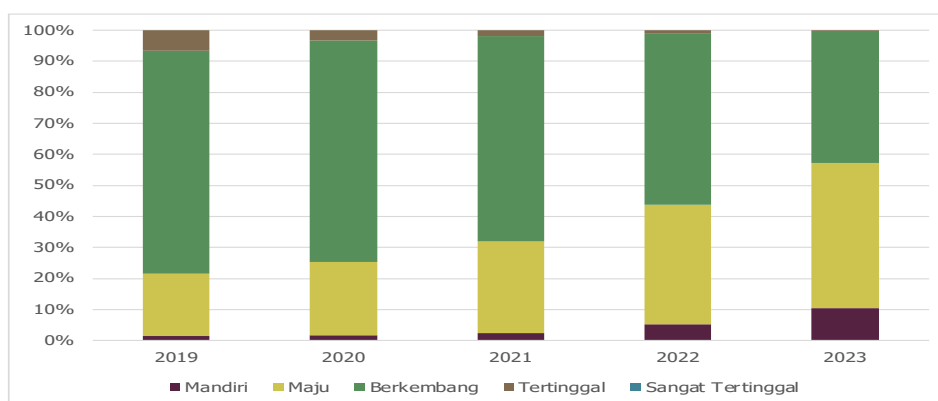
PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2010–2023 (Juta Rupiah)

Pembangunan ekonomi Jawa Tengah sejauh ini sudah mengarah pada prinsip-prinsip ekonomi hijau. Jika dilihat dari indeks **ekonomi hijau** yang meliputi pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Pada tahun 2021 capaian indeks ekonomi hijau Jawa Tengah sebesar 53,26 (kategori baik tier 1). Dari ketiga pilar tersebut pilar sosial memiliki skor tertinggi disusul pilar ekonomi dan pilar lingkungan.

Selain didorong untuk tetap tumbuh, perekonomian daerah juga diarahkan agar merata. Pemerataan pembangunan ekonomi berpengaruh terhadap ketimpangan ekonomi antarwilayah yang ditunjukkan dengan **indeks williamson**. Indeks williamson Jawa Tengah pada tahun 2022 sebesar 0,655 membaik dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,656. Sedangkan ketimpangan antarwilayah tergambar dari indeks williamson dari 8 wilayah pengembangan (WP) Jawa Tengah. Ketimpangan tinggi berada di WP Kedungsepur dengan indeks williamson tahun

2022 sebesar 0,665, WP Purwomanggung sebesar 0,588, dan WP Wanarakuti sebesar 0,667. Sedangkan WP dengan ketimpangan antarwilayah rendah berada di WP Bregasmalang dengan indeks williamson tahun 2022 sebesar 0,334, WP Barlingmascakeb sebesar 0,284, WP Petanglong sebesar 0,253, WP Banglor sebesar 0,017, dan WP Subosukawonosraten sebesar 0,443.

Dalam rangka pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi juga perlu difokuskan pada pembangunan di desa. Pembangunan desa dilakukan untuk dapat meningkatkan kemandirian desa. Tingkat kemandirian desa selama ini diukur dengan indikator Indeks Desa Membangun (IDM) dengan 5 (lima) klasifikasi tingkat kemandirian desa, yaitu Mandiri, Maju, Berkembang, Tertinggal, dan Sangat Tertinggal. Dalam kurun waktu tahun 2019-2023, persentase Desa Mandiri di Jawa Tengah berdasarkan IDM mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Desa Mandiri dari semula 121 desa (1,55 persen) pada tahun 2019 menjadi 825 desa (10,56 persen) pada tahun 2023. Di samping itu, peningkatan kemandirian desa juga ditunjukkan dengan tidak adanya lagi Desa Sangat Tertinggal serta menurunnya Desa Tertinggal dari semula 498 desa (6,63 persen) pada tahun 2019 menjadi 25 desa (0,32 persen) persen tahun 2023. Untuk perencanaan ke depan, pengukuran tingkat kemandirian desa tidak lagi berdasarkan IDM tetapi berdasarkan Indeks Desa (ID).



Sumber: Kemendes PDPT, 2023

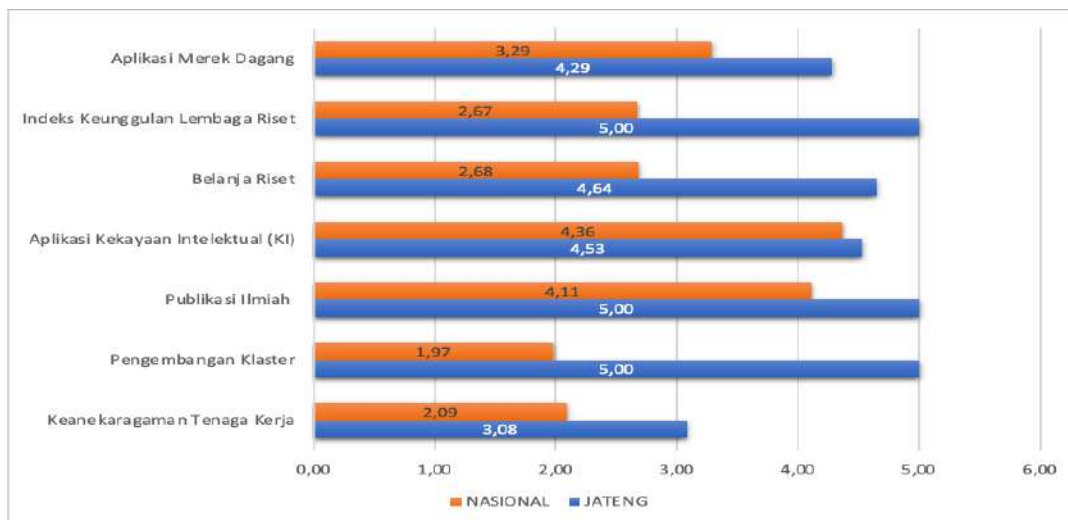
Gambar 2.21.

**Klasifikasi Tingkat Kemandirian Desa
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023 (Persen)**

Perekonomian daerah akan semakin meningkat salah satunya dipengaruhi oleh kemajuan industri dan daya saing daerah. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas, kontribusi dan pemanfaatan iptekin, riset dan inovasi berpengaruh terhadap kemajuan industri dan daya saing daerah. Sehingga kebijakan yang bertumpu pada ilmu pengetahuan, teknologi, riset dan inovasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 penguasaan iptek dan inovasi sangat penting dalam upaya transformasi pembangunan. Atas pertimbangan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong terwujudnya kapabilitas inovasi sebagai sasaran pembangunan jangka panjang daerah hingga 20 tahun ke depan.

Kapabilitas inovasi menggambarkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengembangan formal yang mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, dan konfrontasi lintas visi dan sudut pandang yang berbeda serta kapasitas untuk mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Terlihat bahwa capaian kapabilitas inovasi Jawa Tengah tahun 2023 yang sebesar 4,51 jauh lebih

baik dibandingkan nasional yang sebesar 3,03 bahkan hampir pada semua indikatornya.



Sumber: BRIN, 2024

Gambar 2.22.

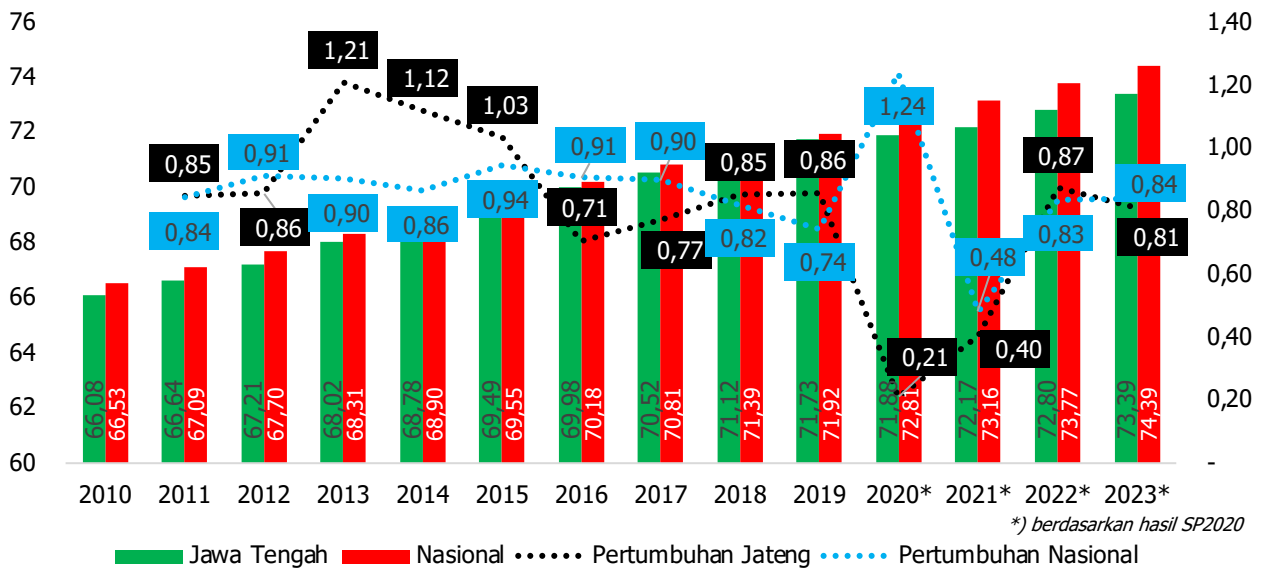
Skor Pilar 12 Indeks Daya Saing Daerah – Kapabilitas Inovasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Kinerja pembangunan manusia secara umum saat ini diukur dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Demikian juga dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menggunakan IPM untuk mengukur kinerja pembangunan manusia di Jawa Tengah. Indikator IPM ini direpresentasikan dengan tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS), Usia Harapan Hidup (UHH) serta pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Namun dalam perkembangannya, IPM dianggap belum dapat menggambarkan tingkat produktivitas SDM masa depan dari anak yang lahir hari ini relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap. Untuk itu, salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur hal tersebut adalah Indeks Modal Manusia (IMM) yang merupakan pendekatan dari *Human Capital Index* (HCI) yang bersumber dari *World Bank*. **Capaian IMM** Jawa Tengah tahun 2020 berada di atas nasional dengan nilai sebesar 0,55, sementara untuk nasional sebesar 0,54. Dalam indikator IMM, terdapat salah satu komponen yang juga merupakan komponen IPM yaitu HLS.

Selanjutnya untuk capaian **IPM** Jawa Tengah sejak tahun 2010 hingga tahun 2023 terus membaik, dari 66,08 tahun 2010 meningkat menjadi 73,79 pada tahun 2023, meskipun masih dibawah angka nasional. Namun demikian rata-rata pertumbuhannya lebih baik jika dibandingkan nasional.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.23.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2010-2023

Kinerja pendidikan di Jawa Tengah ditunjukkan dengan **Rata-rata Lama Sekolah** (RLS) dan **Harapan Lama Sekolah** (HLS) dan selama 14 tahun terakhir, RLS dan HLS Jawa Tengah di bawah angka nasional. RLS Nasional menggambarkan rata-rata penduduk 25 tahun ke atas di Indonesia mampu menyelesaikan pendidikan hingga kelas 3 SMP atau 8,77 tahun pada tahun 2023, sementara Jawa Tengah hanya mampu menyelesaikannya hingga kelas 2 SMP atau 8,01 tahun. Demikian pula dengan HLS Jawa Tengah yang masih berada di bawah nasional sebesar 12,85 tahun pada tahun 2023, sedangkan nasional sudah mencapai 13,15 tahun.

Meskipun secara capaian absolut RLS dan HLS Jawa Tengah berada di bawah nasional, namun rata-rata kinerja pertumbuhannya setara dengan nasional. Kinerja HLS mengalami perlambatan sejak tahun 2014, sementara RLS cenderung fluktuatif. Indikasi penyebab rendahnya RLS dan HLS Jawa Tengah dibandingkan nasional adalah belum meratanya akses layanan pendidikan yang ditunjukkan masih dijumpai Anak Tidak Sekolah (ATS) mencapai 500.000 jiwa di Jawa Tengah, serta kebutuhan pasar tenaga kerja yang masih berada pada kategori *low skilled*.

RLS dan HLS dapat merepresentasikan partisipasi pendidikan dan sistem pendidikan di Jawa Tengah, namun belum sepenuhnya menggambarkan kualitas pendidikan di Jawa Tengah. Untuk menggambarkan kualitas pendidikan dalam hal mutu dan pemerataan pendidikan, digunakan hasil asesmen nasional yang menilai AKM (Asesmen Kompetensi Minimum), Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam *platform* Rapor Pendidikan yang dirilis oleh Kemendikbud. *Output* dari rapor pendidikan berupa capaian literasi, numerasi, survei karakter dan survei lingkungan belajar.

Dari seluruh kabupaten/kota dan satuan pendidikan di Jawa Tengah, persentase kabupaten/kota maupun satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami peningkatan yang signifikan. Capaian numerasi masih berada di bawah capaian literasi, yang hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan siswa dalam berpikir

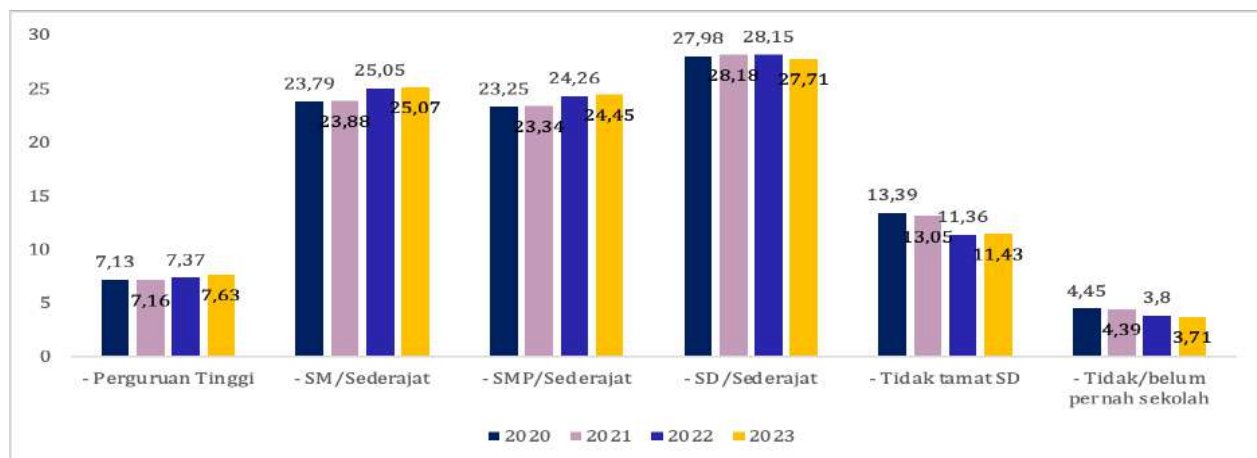
menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan masih kurang.

Tabel 2.2.
Hasil Asesmen Kompetensi Minimum Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021-2023

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada sesmen nasional untuk:			
a) Literasi Membaca	8,57	45,71	77,14
b) Numerasi	0,00	0,00	34,29
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen nasional untuk:			
a) Literasi Membaca	32,87	48,67	64,89
b) Numerasi	6,15	19,87	48,02

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

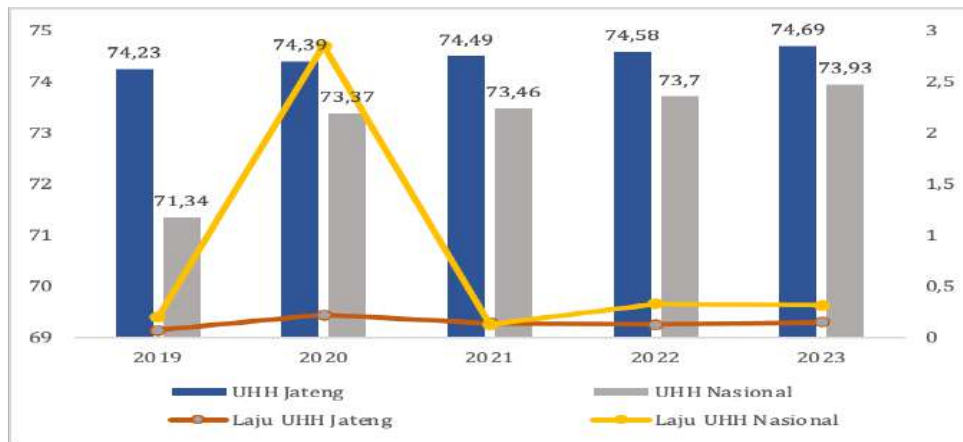
Gambaran kondisi pendidikan masyarakat juga dapat dilihat dari **tingkat pendidikan** masyarakat berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Di Jawa Tengah ditunjukkan dengan persentase penduduk 15 tahun ke atas dan pendidikan tertinggi yang ditamatkan yang didominasi tamatan SD, SMP dan SMA selama kurun waktu 2020-2023. Tamatan SD, SMP dan SMA penduduk 15 tahun ke atas di Jawa Tengah mencapai kisaran 20 persen, namun untuk tamatan perguruan tinggi baik S1 maupun D4 sangat kecil yaitu 7 persen. Di sisi lain masih terdapat penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah kurang lebih 3-5 persen, termasuk tidak tamat SD mencapai 11-13 persen.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.24.
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas dan Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020-2023

Usia harapan hidup (UHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. UHH juga dapat digunakan untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat. Capaian UHH Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang terus membaik sebesar 74,69 tahun pada tahun 2023.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.25.

Usia Harapan Hidup (UHH) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 (Tahun)

Pencapaian UHH yang terus membaik dari tahun ke tahun didukung dengan keberhasilan upaya pembangunan kesehatan di Jawa Tengah yang ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

Angka kematian ibu (AKI) di Jawa Tengah tahun 2023 masih cukup tinggi meskipun angkanya terus menurun. Tercatat AKI tahun 2023 sebesar 76,15 per 100.000 kelahiran hidup (KH) dengan jumlah kasus sebanyak 438 kasus, menurun dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 76,93 per 100.000 KH dengan jumlah kasus sebanyak 485 kasus. Kasus kematian ibu terbanyak terjadi di Kabupaten Brebes sebanyak 54 kasus, sedangkan tanpa kasus (nol kasus) adalah Kota Magelang. Penyebab terjadinya kasus kematian ibu antara lain hipertensi, perdarahan, infeksi masa nifas, abortus, jantung, gangguan metabolik, gangguan darah, gangguan elektrolit, CA *Vulva Maligna*, TBC/*Pneumonia*, CA otak, krisis *tyroid*, *shock* septik, gagal ginjal, *diabetes mellitus on pregnancy* 1, *suspect* jantung dengan obesitas 1, sirosis hepatitis, CA *mammae*, komplikasi nonobstetrik, serta nifas *post SC Morbili*.

Angka kematian bayi (AKB) tahun 2023 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. AKB tahun 2023 sebesar 8,02 per 1.000 KH membaik dari tahun 2019 yang sebesar 8,22 per 1.000 KH. Faktor penyebab kematian bayi antara lain kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan berat badan lahir rendah, kelainan konginetal pada bayi, komplikasi kehamilan, serta banyak ditemukan kasus *pneumonia*.

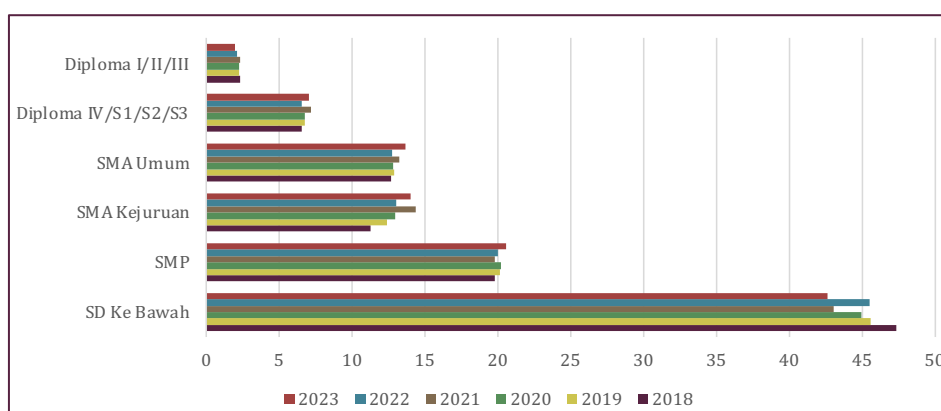
Angka kematian balita (AKABA) di Jawa Tengah tercatat meningkat pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2019. Tercatat AKABA tahun 2019 sebesar 8,22 per 1.000 kelahiran hidup (KH) meningkat menjadi 9,28 per 1.000 KH pada tahun 2023. Beberapa penyebab kematian balita antara lain *pneumonia*, penyakit bawaan, diare, cedera, campak dan malaria di daerah endemis. Selain infeksi penyakit, faktor pola asuh juga menjadi faktor penyumbang kasus kematian balita.

Prevalensi balita dengan *stunting* di Jawa Tengah tahun 2023 tercatat juga masih cukup tinggi dan bahkan menjadi salah satu kontributor terbesar kasus *stunting* di tingkat nasional. Prevalensi balita dengan *stunting* di Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 20,7 persen, *underweight* sebesar 14,5 persen, *wasting* sebesar 7,1 persen, dan *overweight* sebesar 4,2 persen. Beberapa faktor yang

menjadi penyebab gizi buruk yang berdampak pada kasus *stunting* antara lain masalah ekonomi, sanitasi, pendidikan orang tua, dan perilaku orang tua. Faktor ekonomi terutama kemiskinan menjadi salah satu determinan yang menjadi akar penyebab ketiadaan pangan, tempat mukim yang berjejalan dan tidak sehat, serta ketidakmampuan mengakses fasilitas kesehatan.

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) Jawa Tengah tahun 2023 mencapai angka 94,54 persen atau sekitar 35.722.191 peserta. Berdasarkan status kepesertaan, persentase peserta aktif sebesar 72,15 persen atau sekitar 27.259.372 peserta. Cakupan kepesertaan JKN diharapkan dapat mencakup minimal 95 persen dari total jumlah penduduk yang sifatnya inklusif, untuk semua segmen masyarakat termasuk kelompok disabilitas, kelompok rentan dan kelompok yang terabaikan, tidak bias gender, serta mencakup semua kebutuhan pelayanan dasar yang merata bagi semua individu masyarakat Jawa Tengah.

Dilihat dari karakteristik **penduduk bekerja** di Jawa Tengah digambarkan bahwa sebanyak lebih dari 68 persen merupakan lulusan SMP ke bawah. Tingkat pendidikan dapat menunjukkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Penduduk bekerja lulusan SMP ke bawah menunjukkan kualitas yang masih rendah atau *low skill*.



Sumber: BPS, 2023

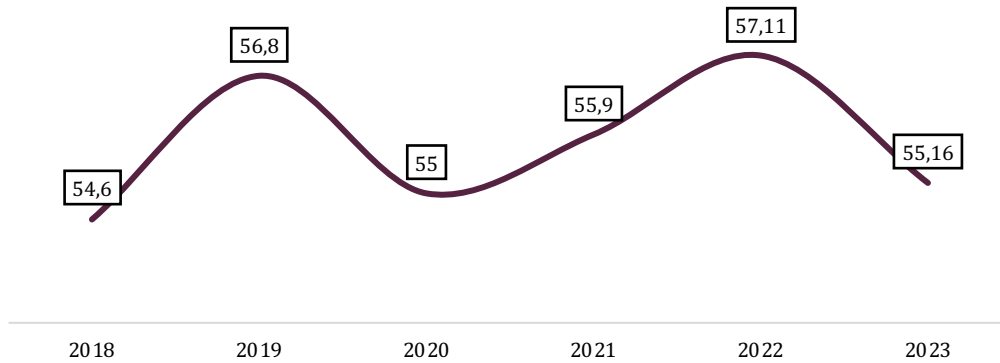
Gambar 2.26.

Penduduk Bekerja Berdasarkan Pendidikan Yang Diluluskan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Persen)

Tingkat produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah tahun 2023 sebesar 55,16 juta rupiah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebesar 57,11 juta rupiah. Penurunan tingkat produktivitas ini disebabkan beberapa faktor seperti modal fisik (perlengkapan, peralatan, fasilitas) yang dimiliki pekerja untuk memproduksi barang kurang memadai, kurangnya penggunaan teknologi atau metode baru untuk menghasilkan *output* yang lebih banyak, dan modal manusia yang dalam hal ini kualitas pendidikan dan keterampilan/ *skill* pekerja yang masih rendah.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja merupakan hal yang penting karena menunjukkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk yang menjadi sumber keunggulan kompetitif suatu perusahaan atau daerah, serta memungkinkan perusahaan menghasilkan lebih banyak *output* dengan jumlah tenaga kerja yang sama, sehingga keuntungan perusahaan lebih besar. Jika produktivitas tenaga kerja suatu sektor tinggi akan diikuti oleh pendapatan pekerja yang semakin tinggi, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Produktivitas tenaga kerja yang tinggi juga dapat berdampak pada peningkatan perekonomian suatu daerah, karena *output* yang dihasilkan akan semakin tinggi. Selain itu, sektor dengan produktivitas yang tinggi akan menarik investasi (bisnis baru/ekspansi) sehingga lapangan pekerjaan akan semakin meningkat.

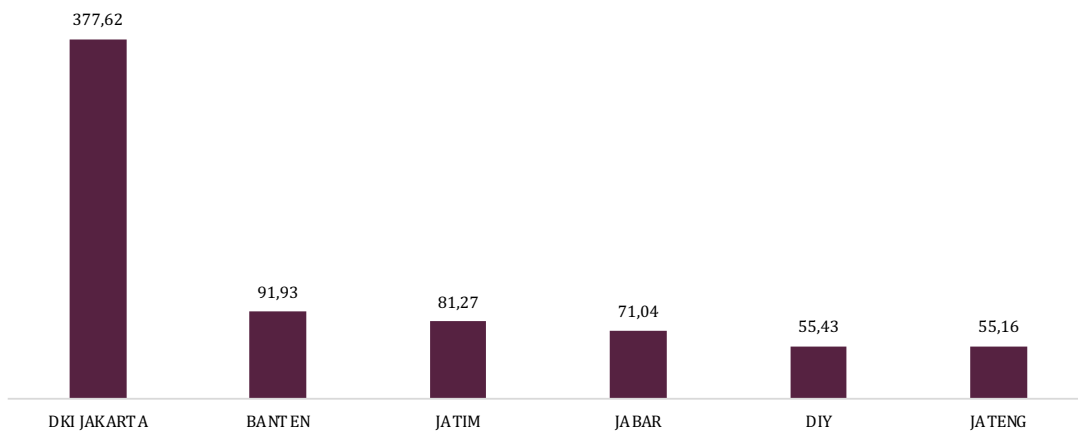


Sumber: BPS, 2024

Gambar 2.27.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Juta Rupiah)

Apabila dibandingkan dengan tingkat produktivitas tenaga kerja provinsi lain di Pulau Jawa pada tahun 2023, tingkat produktivitas Jawa Tengah berada di urutan terbawah dari enam provinsi. Tingkat produktivitas tenaga kerja tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 377,62 juta rupiah atau sebanyak enam kali lipat lebih besar dibanding dengan Jawa Tengah.



Sumber: BPS, 2023

Gambar 2.28.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Provinsi se-Pulau Jawa Tahun 2023 (Juta Rupiah)

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Kondisi infrastruktur Jawa Tengah semakin membaik dari tahun ke tahun didukung dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang fokus pada peningkatan kualitas infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat, dan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Total panjang jalan kewenangan provinsi adalah 2.440,12 km sesuai SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 622/2 Tahun 2023. Kondisi jalan sesuai standar (lebar 7 meter dengan MST 8 ton) sampai dengan tahun 2023 adalah 45,03 persen. Sementara kondisi permukaan jalan mantap sebesar 90,32 persen yang

ditunjukkan dari kondisi permukaan jalan baik 70,33 persen, sedang 19,99 persen, rusak ringan sebesar 5,09 persen, dan rusak berat sebesar 4,59 persen.

Konektivitas jaringan transportasi Jawa Tengah dipengaruhi oleh keberadaan simpul transportasi. Untuk simpul transportasi udara, sampai dengan tahun 2023, terdapat 6 bandara yang terdiri dari 3 bandara komersial (Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Boyolali dan JB. Soedirman Purbalingga) serta 3 bandara perintis (Dewadaru Karimunjawa Jepara, Tunggul Wulung Cilacap dan Ngloram Cepu Blora). Keberadaan bandara di Jawa Tengah mempunyai potensi besar dengan berpindahnya Ibu Kota Negara.

Sementara untuk simpul transportasi laut, terdapat 14 pelabuhan sebagai simpul transportasi laut yang terdiri dari 1 pelabuhan utama (Tanjung Emas Semarang), 2 pelabuhan pengumpul (Tanjung Intan Cilacap dan Tegal), 8 pelabuhan pengumpan regional (Batang, Kendal, Jepara, Karimunjawa, Legon Bajak, Juwana, Tasik Agung dan Sluke) dan 3 pelabuhan lokal (Brebes, Pemalang dan Pekalongan). Beberapa pelabuhan di pantai utara kondisinya kurang baik karena mengalami amblesan tanah (*land subsidence*), kenaikan air laut (*rob*) serta pendangkalan kolam dan alur pelayaran karena sedimentasi. Terdapat potensi Pelabuhan Sluke Rembang yang dapat dikembangkan menjadi pelabuhan pengumpul karena secara alamiah mendukung dan potensi keberadaan infrastruktur lain yang menunjang. Pada tahun 2023 arus peti kemas di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang mencapai 781.841 teus atau hanya ± 44 persen dibandingkan kapasitasnya (1,5 juta teus). Berdasarkan studi Kementerian Perhubungan tahun 2022 terkait *real demand hinterland* pelabuhan pantai utara Jawa Tengah, dari total muatan peti kemas yang dihasilkan hanya 49,04 persen yang ke Pelabuhan Tanjung Emas, sisanya 15,66 persen ke barat dan 35,29 persen ke timur. Untuk meningkatkan efisiensi biaya logistik diperlukan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan lainnya untuk mengantisipasi pertumbuhan volume peti kemas dengan adanya pengembangan kawasan industri, yang di dalamnya termasuk integrasi dengan *dryport* dan fasilitas bongkar muat dari kereta api ke kapal secara langsung.

Selanjutnya, untuk simpul jaringan perkeretaapian, sampai dengan tahun 2023 terdapat 116 buah stasiun dan jalur rel sepanjang 1.677,215 km/sp terdiri dari 929,678 km/sp rel aktif (288,62 km/sp jalur tunggal dan 637,06 km/sp jalur ganda) dan 751,537 km/sp rel non aktif. Total panjang rel kereta api yang melebihi jalan nasional (1.518,09 km) dan menjangkau sebagian besar wilayah Jawa Tengah, serta sistem jaringan rel yang “*looping*” berpotensi tinggi sebagai angkutan umum massal aglomerasi perkotaan (pengembangan kereta api komuter yang terintegrasi dengan angkutan umum perkotaan berbasis jalan) untuk meningkatkan efisiensi pergerakan orang dan barang melalui reaktivasi rel non aktif, integrasi rel kereta api dengan kawasan industri, pemanfaatan teknologi integrasi dengan moda angkutan berbasis jalan dan kereta api cepat. Potensi implementasi konsep *Transit Oriented Development* (TOD) sebagai solusi perwujudan efektivitas pergerakan yang dapat memanfaatkan keberadaan stasiun dan terminal. Selain itu potensi pengembangan *multi-infrastructure backbone* dan *maritime backbone* yang menginterkoneksi antara kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem *expressway* dan/atau sistem perkeretaapian lintas Jawa akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan aksesibilitas dan konektivitas

yang mendukung pertumbuhan perekonomian dan pengembangan wilayah di Jawa Tengah.

Untuk simpul utama transportasi darat, terdapat 221 terminal yang terdiri dari 19 tipe A, 24 tipe B dan 178 tipe C. Secara tata ruang masih dibutuhkan penyebaran dan pemerataan terminal yang sampai dengan tahun 2023 terdapat kebutuhan 7 terminal tipe A dan 10 terminal tipe B. Terminal sebagai simpul transportasi berpotensi dikembangkan sebagai simpul ekonomi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah.

Keselamatan perjalanan menjadi salah satu isu permasalahan yang sangat penting di sektor transportasi. Dalam empat tahun terakhir terdapat peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas, pada tahun 2023 terjadi 31.425 kejadian dengan jumlah korban meninggal dunia sejumlah 4.302 jiwa, sehingga rata-rata dalam sehari hilang ±12 jiwa melayang di jalan akibat kecelakaan. Tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan di ruas jalan provinsi pada tahun 2023 mencapai 38,66 persen dan pada perlintasan sebidang kereta api mencapai 17,88 persen. Pada tahun 2022, terdapat 1.379 perlintasan dengan rel kereta api yang terdiri dari 109 tidak sebidang dan 1.260 sebidang (371 perlintasan sudah berpaling pintu dan 889 belum dilengkapi dengan palang pintu). Ke depan diperlukan peningkatan upaya pemenuhan kelengkapan jalan terpasang terhadap kondisi ideal dan pengurangan perlintasan sebidang dengan jalan sebagai upaya untuk mengurangi kejadian kecelakaan transportasi.

Seiring peningkatan penduduk, jumlah kendaraan bermotor juga meningkat pesat dalam waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah sepeda motor sejumlah 21.929.625 unit meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2017 sejumlah 8.967.934 unit. Untuk jumlah mobil pada tahun 2022 sejumlah 1.938.925 unit yang juga meningkat lebih dari 2 kali lipat dibanding tahun 2017 sejumlah 774.469 unit. Peningkatan jumlah kendaraan bermotor berpotensi menyebabkan peningkatan kemacetan, kecelakaan lalu lintas, konsumsi energi dan emisi gas yang dihasilkan.

Terkait dengan pelayanan angkutan umum, sampai dengan tahun 2023 terdapat 7 koridor layanan Trans Jateng (angkutan umum di kawasan aglomerasi perkotaan) di empat wilayah pengembangan (Kedungsepur, Subosukawonosraten, Barlingmascakeb dan Purwomanggung). Untuk mendukung pengembangan kawasan industri dan perkotaan masih diperlukan pengembangan koridor Trans Jateng dan *feeder* yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota yang saat ini baru terdapat tiga kabupaten/kota yang memiliki layanan angkutan umum perkotaan (Trans Semarang, Batik Solo Trans dan Trans Banyumas). Masih diperlukan peningkatan upaya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menyediakan layanan angkutan umum yang tidak hanya melayani kawasan perkotaan tapi juga pedesaan. Total penumpang Trans Jateng terlayani sampai dengan Maret 2024 sebanyak 29.015.683 penumpang, dengan *load factor* dari bulan Januari hingga Maret 2024 berkisar 70,49-97,43 persen pada masing-masing koridor. Persentase perpindahan penumpang kendaraan pribadi yang berpindah menggunakan Trans Jateng tiap tahun mengalami peningkatan di mana pada tahun 2021 sebesar 46,39 persen, tahun 2022 sebesar 48,16 persen, dan terakhir pada tahun 2023 sebesar 50,12 persen (penumpang Trans Jateng yang

sebelumnya menggunakan kendaraan pribadi). Selain itu pada tahun 2023 terdapat 272 trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) yang dilayani oleh 3.550 bus dengan kebutuhan armada sejumlah 6.442 bus. Jumlah armada bus AKDP mengalami penurunan sangat signifikan, yang pada tahun 2019 sejumlah 4.854 bus. Penurunan jumlah bus AKDP utamanya terjadi pada saat pandemi Covid-19 dan seiring turunnya minat masyarakat menggunakan angkutan umum serta mudahnya akses kepemilikan kendaraan pribadi. Berdasarkan data BPS pada tahun 2022 terdapat 629.317 armada angkutan barang di Jawa Tengah yang mengalami kenaikan jumlah armada dibandingkan dengan data kondisi tahun 2020 yang sejumlah 472.942 armada. Pertumbuhan jumlah kendaraan barang di satu sisi merupakan indikator potensi peningkatan volume logistik namun berpotensi semakin meningkatkan permasalahan (kemacetan, kecelakaan, kontribusi polusi) di sektor transportasi utamanya di moda jalan raya.

Secara keseluruhan, kinerja infrastruktur perhubungan di Jawa Tengah diukur dengan Indeks Pelayanan Transportasi yang sudah memperhitungkan aspek konektivitas jaringan transportasi (rasio konektivitas provinsi), tingkat keselamatan perjalanan transportasi (rasio kecelakaan bus AKDP per 1 juta keberangkatan), dan kualitas pelayanan angkutan umum (*On Time Performance/ OTP* layanan transportasi). Capaian Indeks Pelayanan Transportasi Provinsi Jawa Tengah secara rinci sebagai berikut.

Tabel 2.3.

Indeks Pelayanan Transportasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022-2023

Indikator	Satuan	Tahun	
		2022	2023
INDEKS PELAYANAN TRANSPORTASI	Angka	5,767	5,997
1. Rasio Konektivitas Provinsi	Angka	0,299	0,373
a. Rasio Konektivitas Transportasi Darat	Angka	0,283	0,340
b. Rasio Konektivitas Transportasi Perkotaan	Angka	0,389	0,501
c. Rasio Konektivitas Transportasi Laut dan ASDP	Angka	0,230	0,310
2. Rasio Kecelakaan Bus AKDP (per 1 Juta Keberangkatan)	Angka	16,906	16,698
3. On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi	%	82,21	84,19
a. OTP Angkutan Aglomerasi Perkotaan (Trans Jateng)	%	86,60	88,20
b. OTP Kereta Api Masa Lebaran dan Nataru	%	90,00	90,39
c. OTP Pesawat Masa Lebaran dan Nataru	%	70,00	74,00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2024

Catatan :

- Indeks Pelayanan Transportasi mulai dihitung pada Tahun 2022;
- Rasio Konektivitas Nasional Tahun 2022 = 0,696 dan 2023 = 0,763;
- Rasio Kecelakaan Nasional Tahun 2022 = 19,936 dan 2023 = 17,64;
- On Time Performance (OTP) Nasional Tahun 2022 = 74,146 dan 2023 = 72,592

Kinerja infrastruktur perhubungan Provinsi Jawa Tengah dari aspek keselamatan dan pelayanan transportasi umum sudah lebih baik dibandingkan capaian tingkat nasional. Yang masih perlu pembenahan dari aspek konektivitas provinsi yang capaiannya di bawah capaian nasional, terutama dari hal pemerataan simpul transportasi (terminal dan dermaga penyeberangan ASDP) dan pemenuhan trayek layanan angkutan umum.

Infrastruktur sumber daya air di Jawa Tengah juga semakin baik dari tahun ke tahun. Kondisi sarana sumber daya air antara lain ditunjukkan dengan kondisi jaringan irigasi, yang sampai dengan tahun 2023, jaringan irigasi dalam kondisi

baik dan rusak ringan sebesar 83 persen atau seluas 72.098 ha, Sementara luas daerah irigasi (DI) di Jawa Tengah seluas 953.804 hektar, dengan DI kewenangan provinsi sebanyak 108 seluas 86.865 hektar atau 9,11 persen dari total luas DI di Jawa Tengah.

Ketersediaan air khususnya untuk air baku dipengaruhi oleh jumlah bangunan bendungan/waduk. Sampai saat ini terdapat 41 bangunan bendungan/waduk (9 waduk besar dan 32 waduk kecil). Ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebesar 50,12 persen menjadi 62 persen di tahun 2023.

Cakupan akses air minum layak pada tahun 2023 sebesar 91,40 persen, tercatat dalam satu dekade terakhir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2013 cakupan masih sebesar 56,56 persen, dan termasuk di dalamnya cakupan akses air minum aman pada tahun 2023 sebesar 38,75 persen, tercatat dalam lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2018 cakupan masih sebesar 22,66 persen. Sedangkan untuk cakupan akses air minum jaringan perpipaan pada tahun 2023 sebesar 48,78 persen yang juga mengalami peningkatan secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir dimana pada tahun 2018 cakupan masih sebesar 36,8 persen.

Cakupan akses air limbah domestik layak pada tahun 2023 sebesar 92,14 persen secara keseluruhan mengalami peningkatan jika dibandingkan cakupan sepuluh tahun lalu pada tahun 2013 sebesar 64,5 persen, meskipun sempat terjadi penurunan capaian pada tahun 2021. Termasuk di dalamnya cakupan akses air limbah domestik aman pada tahun 2023 sebesar 9,91 persen menurun jika dibandingkan dengan dua tahun tercatat sebelumnya yaitu tahun 2022 sebesar 9,94 persen dan tahun 2021 sebesar 10,75 persen. Terjadinya penurunan capaian akses air limbah domestik layak maupun aman dikarenakan telah terjadi kerusakan pada prasarana yang telah terbangun dan tidak ada pembangunan baru, selain itu peningkatan jumlah akses tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk.

Pemenuhan rumah dan rumah layak huni di Jawa Tengah dari tahun ke tahun juga semakin meningkat. Asumsi jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebanyak 8.758.169 unit dengan jumlah rumah layak huni sebanyak 6.029.999 unit atau sekitar 68,85 persen dan sisanya 31,15 persen merupakan rumah tidak layak huni.

Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Jawa Tengah melalui berbagai sumber pembiayaan selama kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 1.749.336 unit, di antaranya melalui pembiayaan APBD Provinsi Jawa Tengah yaitu melalui mekanisme bantuan keuangan kepada pemerintah desa peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, APBD kabupaten/kota, APBN melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, BAZNAS dan CSR.

Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi, verifikasi, validasi dan penetapan lokasi permukiman kumuh melalui surat keputusan (SK walikota/bupati). Hasil verifikasi dan validasi penetapan kawasan permukiman kumuh melalui SK bupati/ walikota, sampai dengan 31 Desember tahun 2023 total kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah seluas 12.322,25 ha yang

terdiri dari 3.004,59 ha (*baseline* RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023) dan 9.317,66 ha (pembaruan SK sampai dengan 31 Desember tahun 2023). Penanganan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah sampai tahun 2023 seluas 5.479,30 ha yang terdiri dari lokasi *baseline* RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 seluas 2.717,40 ha dan lokasi penambahan kawasan kumuh berdasarkan pembaruan SK seluas 2.761,90 ha. Dengan demikian sisa kawasan permukiman kumuh tahun 2023 seluas 6.842,95 Ha, yang terdiri dari sisa *baseline* RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 seluas 287,18 ha dan sisa dari penambahan kawasan kumuh berdasarkan pembaruan SK seluas 6.555,77 ha.

Provinsi Jawa Tengah memiliki infrastruktur energi yang cukup beragam mencakup pembangkit listrik berbasis fosil dan nonfosil. Dominasi energi fosil khususnya melalui PLTU berbahan bakar batubara masih besar dengan kapasitas besar yang terpusat di beberapa pembangkit besar seperti PLTU Tanjung Jati (2.644 MW), PLTU Batang (2.000 MW), PLTU IPP Cilacap (1.176 MW), PLTU Jawa 8 (1.000 MW), PLTU Adipala (615 MW), PLTU Rembang (560 MW), dan PLTU Tambak Lorok (110 MW), yang saat ini mengambil porsi 12 persen dari total kebutuhan listrik Jawa – Bali.

Namun demikian, upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan juga terus dilakukan. Jawa Tengah memiliki potensi besar untuk pengembangan energi panas bumi. Potensi ini tersebar di beberapa wilayah dengan karakteristik geotermal yang mendukung seperti Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dieng, WKP Gunung Ungaran, WKP Umbul Telomoyo, WKP Baturaden, WKP Guci, dan WKP Gunung Lawu. Saat ini, PLTP Dieng telah beroperasi dengan kapasitas sekitar ±60 MW dan masih memiliki potensi pengembangan lebih lanjut hingga lebih dari 400 MW. Pengembangan energi panas bumi di Jawa Tengah tidak hanya berkontribusi pada diversifikasi sumber energi, tetapi juga membantu dalam mencapai target energi terbarukan nasional. Dengan pemanfaatan potensi panas bumi yang optimal, Jawa Tengah dapat menjadi salah satu pusat pembangkit listrik panas bumi terbesar di Indonesia, mendukung keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Selain itu, pembangkit listrik tenaga air juga berperan penting dalam memenuhi kebutuhan listrik, terutama di daerah-daerah terpencil. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Jawa Tengah di antaranya PLTA Mrica (3x60 MW), PLTA Wadaslintang (2x8,2 MW), PLTA Ketenger (2x3,52 MW), PLTA Garung (2x13,2 MW), PLTA Kedungombo (23 MW), dan PLTA Gajahmungkur (12,4 MW). Keberadaan PLTA di Jawa Tengah tidak hanya membantu dalam penyediaan listrik yang ramah lingkungan tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Dengan melibatkan komunitas lokal dan mengadopsi teknologi terbaru, potensi PLTA di Jawa Tengah dapat dimaksimalkan untuk mendukung keberlanjutan energi dan kesejahteraan masyarakat.

Infrastruktur gas bumi juga memainkan peran penting dalam perekonomian dan sektor energi Jawa Tengah. Upaya penyediaan gas bumi di Jawa Tengah bervariasi, dari *Compressed Natural Gas* (CNG) *Truck*, *Liquefied Natural Gas* (LNG), sampai dengan pipa gas. Jaringan gas rumah tangga sudah berkembang di Jawa Tengah,

utamanya di Kota Semarang dan Kabupaten Blora. Total pemanfaatan jaringan gas rumah tangga di Jawa Tengah saat ini mencapai ±17.500 SR (Sambungan Rumah). Jaringan pipa gas transmisi yang baru diresmikan pada November 2023 yaitu Cisem Tahap I (Semarang-Batang) telah mendukung industri di Pantura Jawa Tengah. Selanjutnya, direncanakan pembangunan jaringan pipa transmisi gas Cisem Tahap II (Batang-Cirebon), dengan total panjang ruas pipa Batang sampai dengan Kandang Haur Timur sekitar 245 km yang akan dibangun mulai tahun 2024 hingga 2025.

Meskipun jaringan pipa gas telah dibangun, truk CNG dan terminal LNG tetap diperlukan dalam jangka panjang untuk melayani masyarakat yang berada di daerah terpencil atau di tempat yang belum atau tidak memiliki pipa transmisi dan distribusi. LNG menawarkan fleksibilitas dan jaminan pasokan gas. Jaringan pipa gas juga telah mendukung pembangkit listrik. PLTGU Tambak Lorok Blok 3 (779 MW) di Semarang menjadi contoh penggunaan gas bumi yang efisien untuk pembangkitan listrik. Dengan integrasi infrastruktur Pipa Gresem (Gresik-Semarang), Pipa Cisem I (Semarang-Batang), dan Pipa Cisem II (Batang-Cirebon), dapat memberikan layanan gas bumi yang semakin baik dan telah dipersiapkan secara desain untuk menunjang kebutuhan permintaan gas yang besar di Jawa Tengah. Kombinasi ini memperkuat fondasi energi provinsi dalam menghadapi tantangan energi di masa depan.

Pengembangan energi angin dan gelombang laut juga mulai mendapat perhatian, dengan beberapa proyek yang sedang dalam tahap perencanaan dan pengembangan di wilayah pesisir utara dan pesisir selatan. Dengan keberagaman ini, Jawa Tengah berupaya untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energinya guna mencapai tujuan keberlanjutan dan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Keandalan sistem listrik di Jawa Tengah menjadi sangat tinggi dengan angka rasio ketersediaan daya listrik Jawa Tengah saat ini sebesar 1,52 pada tahun 2023. Berdasarkan angka tersebut dapat dilihat bahwa pasokan listrik di Jawa Tengah sangat memadai bahkan memiliki *reserve margin*/cadangan sebesar 45 persen. *Reserve margin* yang terjadi diharapkan dapat menjadi sentimen positif dalam menarik tumbuhnya industri baru dan ekspansi industri eksisting agar pertumbuhan ekonomi meningkat dan mengurangi tingkat pengangguran di wilayah Jawa Tengah. Jawa Tengah siap untuk menerima investasi baru khususnya di kawasan industri yang telah tersedia di Jawa Tengah diantaranya Batang *Industrial Park* (KI Segayung), *Grand Batang City* (KIT Batang), KI Kendal (KEK Kendal), KI Wijayakusuma, Tanjung Emas *Export Processing Zone* (Lamicitra Nusantara), Bukit Semarang Baru *Industrial Park*, *Jatengland Industrial Park* Sayung, *Aviarna Industrial Estate*, KI Candi, dan KI Cilacap. Tantangan ketenagalistrikan bukan lagi tentang ketersediaan tetapi terkait keandalan mutu layanan untuk mengurangi keluhan dari sisi distribusinya dan keberlanjutan dari sisi produksi energi listriknya.

Seiring dengan peningkatan rasio ketersediaan daya listrik di Jawa Tengah, berbanding lurus dengan tingkat energi terjual listrik di Jawa Tengah. Energi terjual listrik di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Kenaikan tersebut dapat dilihat dari data Buku Statistik PLN. Selama kurun waktu 2014 hingga 2023

menunjukkan peningkatan energi terjual dari 19.631,48 GWh pada tahun 2014 menjadi 28.431,75 GWh pada tahun 2023. Kenaikan tersebut sekitar 44 persen dibanding tahun 2014. Kenaikan penjualan listrik menjadi sinyal bahwa perekonomian Jawa Tengah tumbuh dengan baik. Setelah berkontraksi dengan peristiwa Covid-19, aktivitas masyarakat kembali pulih sehingga mendorong peningkatan konsumsi listrik terutama di sektor industri dan retail.

Selama kurun waktu tahun 2014 hingga tahun 2023 konsumsi listrik per kapita Jawa Tengah mengalami tren peningkatan dari 586 kWh per kapita menjadi 757,35 kWh per kapita. Meskipun demikian kondisi tersebut masih di bawah provinsi tetangga di Pulau Jawa seperti Jawa Barat (1.174,57 kWh/kapita), Jawa Timur (1.008,63 kWh/kapita), DKI Jakarta (3.466,27 kWh/kapita), dan Banten (2.191,42 kWh/kapita). Konsumsi listrik per kapita erat kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Semakin tinggi konsumsi listrik perkapita disuatu daerah maka semakin tinggi juga potensi kesejahteraan di daerah tersebut. Kenaikan konsumsi listrik tersebut salah satunya didorong oleh peningkatan rasio elektrifikasi di Jawa Tengah.

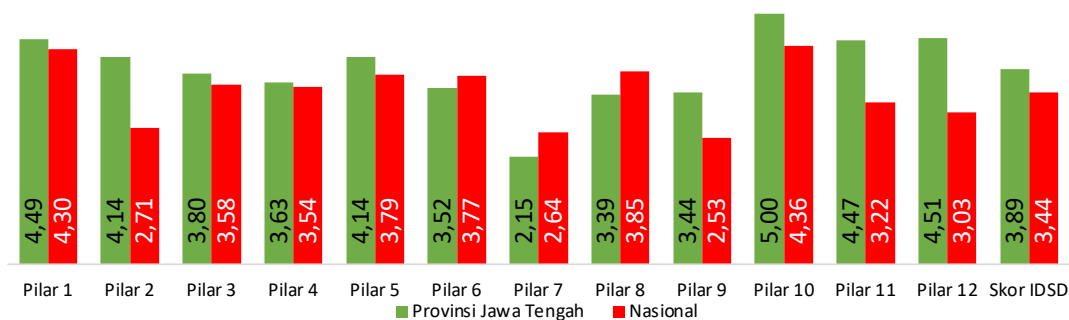
Rasio elektrifikasi di Jawa Tengah saat ini telah mendekati 100 persen. Rasio elektrifikasi ini menunjukkan bahwa hampir seluruh masyarakat Jawa Tengah sudah menikmati layanan energi listrik. Rasio elektrifikasi menggambarkan ketahanan energi yang terjangkau dan inklusif melalui pemerataan dan keterjangkauan akses untuk masyarakat terhadap energi listrik. Tahun 2014 rasio elektrifikasi Jawa Tengah baru mencapai 88,37 persen. Kemudian sampai dengan tahun 2023 rasio elektrifikasi Jawa Tengah telah mencapai 99,99 persen.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

Daya saing daerah Jawa Tengah juga lebih baik dari tahun ke tahun yang ditunjukkan dari indikator indeks daya saing daerah (IDSD). Nilai IDSD tahun 2023 sebesar 3,89 meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 3,63.

Dari keempat komponen pembentuk IDSD, komponen lingkungan pendukung dan sumber daya manusia mengalami peningkatan, sedangkan komponen ekosistem inovasi mengalami penurunan. Penurunan signifikan terjadi karena terdapat penyempurnaan pada beberapa indikator pembentuk pada pilar 11 yaitu dinamisme bisnis. Sementara itu, pada komponen pasar tumbuh cukup tajam pada tahun 2023 yang disebabkan karena penyempurnaan pada beberapa indikator pembentuk pada pilar 9 dan pilar 10.

Berdasarkan skor komponen pembentuk IDSD, capaian Jawa Tengah tahun 2023 pada komponen lingkungan pendukung, komponen pasar dan komponen ekosistem inovasi memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan nilai nasional. Dari ke empat komponen pembentuk IDSD, 2 komponen mampu tumbuh lebih tinggi dari angka nasional yaitu komponen lingkungan pendukung (6,43 persen) dan komponen SDM (2,72 persen), meski komponen SDM memiliki capaian yang lebih rendah dibandingkan angka Nasional. Sementara pada komponen pasar, pertumbuhan Jawa Tengah (37,68 persen) cenderung lebih rendah dibandingkan angka Nasional (73,55 persen). Sedangkan jika dilihat dari 12 pilar IDSD, pada pilar 6, 7, dan 8 Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Pilar 6 terkait dengan keterampilan tenaga kerja, pilar 7 menggambarkan pasar produk, dan pilar 8 terkait dengan pasar tenaga kerja.

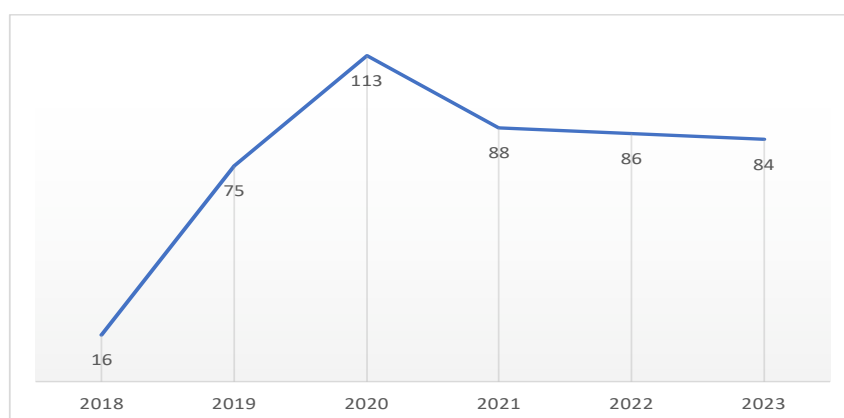


Sumber: BRIN, 2024

Gambar 2.29.

Indeks Daya Saing Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Kondisi yang memberikan pengaruh terhadap daya saing daerah salah satunya adalah kondisivitas wilayah. Salah satu yang dapat merepresentasikan kondisi umum dalam menjaga kondusivitas wilayah adalah dengan melihat **Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)**. Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan IKUB dari 74,28 pada tahun 2022 menjadi sebesar 77,90 pada tahun 2023. Selain itu juga digambarkan dari penurunan jumlah konflik yang terjadi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah.



Sumber: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah, 2024

Gambar 2.30.

Kejadian Konflik Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kondusifnya sebuah wilayah terutama yang dirasakan oleh masyarakat adalah dari seberapa banyak **penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya**. Kondisi tersebut di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang sebesar 63,5 menjadi sebesar 74,56 pada tahun 2020.

Selain itu pada penilaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dengan pengukuran terbaru memperoleh nilai 84,79. Peningkatan IDI didorong adanya perbaikan pada aspek kesetaraan yang pada tahun sebelumnya hanya mencapai nilai 77,68 dan pada tahun 2022 menjadi 82,73.

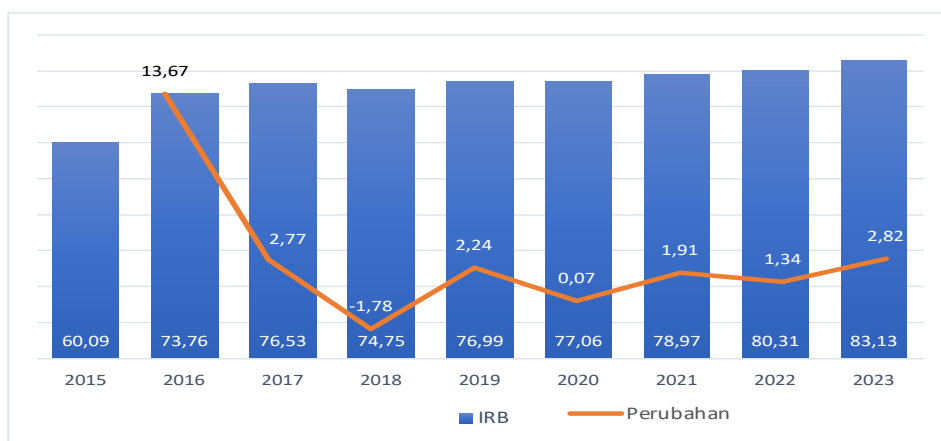
2.4. ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan umum sebagai muara dari penyelenggaraan pemerintahan dapat ditinjau melalui kualitas birokrasi sebagai sistem hulu dan kualitas pelayanan publik sebagai sistem hilir

Kualitas birokrasi dapat diukur melalui **Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**. Reformasi Birokrasi adalah program pemerintah dalam membangun aparatur

negara sebagai respon atas tuntutan reformasi pasca krisis tahun 1998 yang dilandasi keinginan sebagian besar masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan demokrasi dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Penerapan reformasi birokrasi dimaksudkan sebagai upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good government*) sebagai prinsip yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Reformasi birokrasi pada pemerintah daerah menggambarkan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan bersih berkenaan dengan roadmap nasional. Kinerja reformasi birokrasi di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2015 hingga tahun 2023 secara umum meningkat dari tahun 2015 sebesar 60,09 (B) menjadi sebesar 83,13 (A) pada tahun 2023 atau tumbuh sebesar 38,34 persen. Nilai IRB yang terus meningkat menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Jawa Tengah diupayakan untuk terus mengembangkan penerapan prinsip pemerintahan yang baik dan bersih. Meski nilai IRB terus meningkat, pertumbuhan nilai IRB sempat menunjukkan adanya penurunan yang signifikan pada tahun 2016 dari 13,67 menjadi 2,77 pada tahun 2017. Kemudian tingkat pertumbuhan IRB mengalami fluktuasi yang cenderung stagnan secara terus menerus dari tahun 2019 hingga 2023. Angka pertumbuhan yang fluktuatif menunjukkan adanya aspek reformasi birokrasi yang belum kokoh dalam penerapannya dan masih bersifat pekerjaan *business as usual*.



Sumber: KemenPANRB, 2023

Gambar 2.31.

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2023

Salah satu sasaran strategis dalam upaya perwujudan reformasi birokrasi adalah penataan regulasi dengan pelaksanaan reformasi hukum. Reformasi hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada pemerintah daerah yang diukur dengan **Indeks Reformasi Hukum (IRH)**. Capaian IRH Jawa Tengah secara umum meningkat dari tahun 2022 sebesar 76,25 menjadi 87,62 pada tahun 2023 dengan tambahan nilai apresiasi sebesar 9,52.

Selain itu, sasaran strategi dalam kebijakan reformasi birokrasi dapat diukur melalui indikator tata kelola pemerintahan berbasis elektronik atau disebut Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Indeks SPBE memberikan gambaran ukuran efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Pengukuran Indeks SPBE dilakukan pada

awal tahun 2018 dengan kondisi awal sebesar 2,64 (kondisi baik). Berdasarkan penilaian Permen PAN dan RB Nomor 13 Tahun 2024, capaian Indeks SPBE tahun 2023 sebesar 4,26 (kondisi memuaskan) melampaui target sebesar 3,33 (kondisi baik). Melesatnya capaian Indeks SPBE antara lain karena terjadinya investasi pembangunan infrastruktur TIK yang memadai seperti pembangunan jaringan *fiber optic*, pengadaan *server* dan *storage*, pengadaan sarana dan prasarana studio visual ruang *Multi Media Center* (MMC), pembangunan pusat data/data center, sewa internet dan sewa aplikasi analisis media serta, sarana prasarana layanan keamanan informasi.

Selain pembangunan infrastruktur TIK, kemajuan capaian Indeks SPBE juga didukung dengan langkah-langkah penyediaan regulasi terkait penyelenggaraan SPBE (Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Provinsi Jawa Tengah Cerdas, regulasi teknis lainnya seperti regulasi tentang arsitektur SPBE, peta SPBE, dan penerapan manajemen data di perangkat daerah, Rencana Induk Provinsi Jawa Tengah Cerdas tahun 2020–2024, serta Kebijakan Satu Data Jawa Tengah), peningkatan layanan jaringan intra pemerintah dan pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP), integrasi aplikasi berbagi pakai, literasi/sosialisasi terkait keamanan informasi kepada aparatur berupa optimalisasi *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dan pentest, serta optimalisasi Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melibatkan perangkat daerah terkait, serta peningkatan layanan SPBE seperti peningkatan kualitas pengelolaan aduan masyarakat yang harus segera ditindaklanjuti melalui aplikasi *LaporGub*.

Pelayanan publik sebagai sistem hilir dapat dilihat kualitasnya melalui **Indeks Pelayanan Publik (IPP)**. Indeks ini mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan Kementrian, Lembaga dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Nilai IPP Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga tahun 2023 mengalami penurunan dari 4,22 pada tahun 2018 menjadi 4,11 pada tahun 2023. Penurunan ini diakibatkan perubahan metode penilaian pada tahun 2023, yakni penilaian dibagi menjadi beberapa jenis layanan yaitu jenis layanan administrasi, layanan administrasi dan layanan barang. Pada tahun 2023 Jawa Tengah mendapat catatan evaluasi pada penilaian jenis layanan barang terutama pada aspek profesionalisme SDM dan sistem informasi pelayanan publik. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik Provinsi Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan.



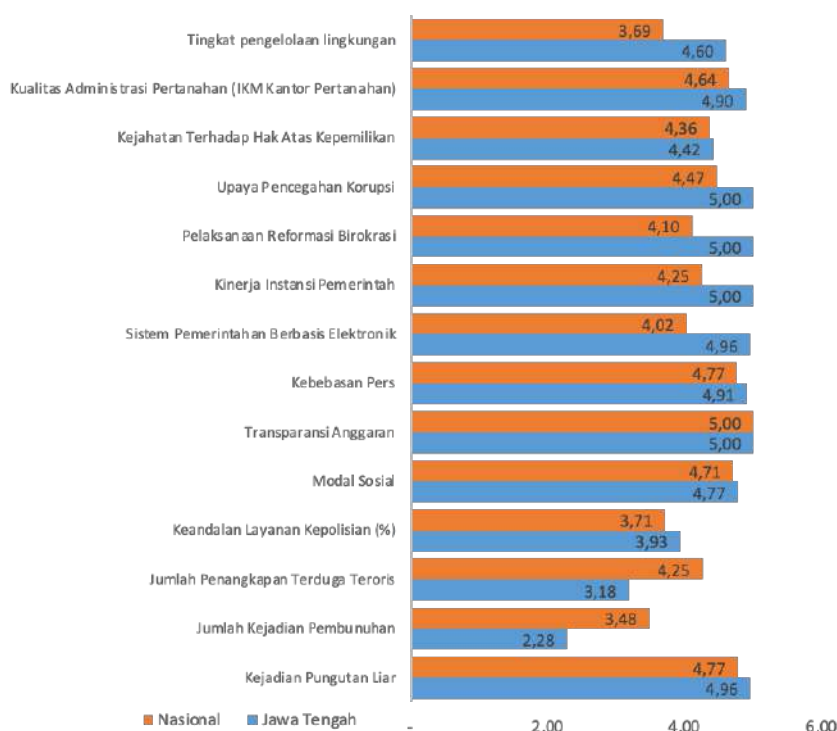
Sumber: Biro Organisasi Provinsi Jawa Tengah, 2023

Gambar 2.32.

Indeks Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Upaya pencapaian reformasi birokrasi perlu manghapus seluruh praktik-praktik korupsi seperti penyusunan, pemerasan gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Untuk menjaga dari perilaku korupsi, maka integritas baik individu dan organisasi menjadi penting untuk diperhatikan. Hasil Survey Penilaian Integritas (SPI) digunakan untuk menunjukkan tingkat Integritas Individu dan Organisasi Pemerintah. Capaian nilai SPI Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2021-2023 mengalami penurunan dari 80,97 pada tahun 2021 menjadi 77.91 pada tahun 2023. Namun dalam kurun waktu yang sama, nilai capaian Jawa Tengah masih lebih baik dari capaian Nasional sebesar 72,4 pada tahun 2021 menurun menjadi 70,97 pada tahun 2023.

Salah satu gambaran kekuatan kondisi institusi di daerah dapat ditunjukkan dengan salah satu pilar pembentuk Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yaitu Pilar 1 **Kapasitas Institusi**. Kapasitas institusi juga mampu memberikan gambaran bagaimana kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola daerah/institusinya sehingga daerah memiliki pengaruh terhadap nasional maupun internasional. Kapasitas institusi merepresentasikan bagaimana daerah mampu mewujudkan keamanan, *check* dan *balance* termasuk kebebasan pers di dalamnya, pencegahan korupsi, hak atas kepemilikan serta orientasi masa depan pemerintah daerah dalam konteks stabilitas kebijakan berbisnis dan pengelolaan lingkungan. Pada tahun 2023, capaian kapasitas institusi Jawa Tengah sebesar 4,49 berada di atas nasional sebesar 4,30. Namun demikian, Jawa Tengah masih perlu upaya dan strategi dalam mencegah dan mengurangi kejadian pungutan liar yang pada tahun 2023 nilainya lebih tinggi daripada nasional.



Sumber: BRIN, 2024

Gambar 2.33.

Skor Pilar 1 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) – Kapasitas Institusi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2023

Dari penjelasan gambaran umum pada empat aspek tersebut di atas dapat disimpulkan potensi dan kendala pembangunan daerah Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.4.
Potensi dan Kendala Pembangunan Daerah Jawa Tengah

Potensi	Kendala
Aspek Geografi dan Demografi	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memiliki iklim tropis basah, jenis tanah dengan kesuburan tinggi, penggunaan lahan didominasi pertanian, keanekaragaman hayati (kehati) beragam yang bermanfaat secara ekonomi dan ekologi, potensi EBT tinggi, serta potensi mineral dan batuan cukup tinggi ▪ Daya dukung pangan yang belum terlampaui ▪ Penduduk usia produktif yang besar (bonus demografi), dan karakteristik penduduk yang beragam 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan jumlah penduduk yang tinggi menghasilkan timbulan sampah yang tinggi dan tingkat ketergantungan energi fosil yang masih tinggi, pemanfaatan kehati belum optimal, peningkatan lahan kritis, pengelolaan mineral dan batuan belum optimal ▪ 18 DAS prioritas yang perlu dipulihkan daya dukungnya ▪ Kondisi geografis dan tekanan aktivitas manusia merupakan potensi ancaman bencana ▪ Dampak perubahan iklim dan emisi GRK cukup tinggi ▪ Daya dukung air sudah terlampaui
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertumbuhan ekonomi stabil dalam 20 tahun terakhir, inflasi terkendali ▪ Pembangunan gender cukup baik yang berdampak pada ketimpangan gender semakin mengecil 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penduduk miskin masih tinggi, tingkat pengangguran terbuka juga masih cukup tinggi ▪ Perlindungan sosial belum optimal dan tepat sasaran ▪ Masih terjadi ketimpangan pendapatan masyarakat ▪ Pembangunan kebudayaan, dan pembangunan keluarga masih belum optimal
Aspek Daya Saing Daerah	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PDRB tetap tumbuh positif dengan stabil dalam 20 tahun terakhir, ▪ Pengelolaan ekonomi menuju ekonomi hijau ▪ Kemandirian desa semakin meningkat ▪ Memiliki modal penduduk usia produktif yang cukup banyak ▪ Usia harapan hidup semakin baik ▪ Ketersediaan dan akses infrastruktur semakin meningkat dan merata ▪ Kerukunan umat beragama terjaga 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan nasional dan provinsi lain di Pulau Jawa ▪ Kontribusi sektor unggulan belum optimal ▪ Kapabilitas inovasi yang belum optimal ▪ Masih terjadi ketimpangan baik ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan ekonomi antarwilayah ▪ Akses dan mutu pendidikan masih kurang ▪ Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi tamatan SD ▪ Tingkat produktivitas tenaga kerja belum optimal ▪ Masih terjadi konflik
Aspek Pelayanan Umum	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tata kelola pemerintahan semakin baik antara lain ditunjukkan dari adanya penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan penataan regulasi 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelaksanaan reformasi birokrasi belum berorientasi pada dampak ▪ Kurangnya inovasi dan integritas pada pelayanan publik dan kapasitas institusi yang belum optimal

2.5. EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dilakukan dengan menginterpretasikan sasaran pokok dalam arah pembangunan di setiap misi dengan indikator kinerja sesuai hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode 2005 sampai 2025. Hasil dari evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025 dapat disimpulkan bahwa dari total indikator berdasarkan intrerpretasi RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 di setiap misi sebanyak 102 indikator, rata-rata capaian kinerjanya sebesar 97,52 persen dengan predikat kinerja sangat tinggi.

Beberapa indikator kinerja yang pencapaiannya tidak tinggi antara lain pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka. Hal ini merupakan dampak terjadinya pandemi Covid-19 yang melanda secara global termasuk Jawa Tengah pada tahun 2020. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2020 sempat mengalami kontraksi minus 2,65 persen, dan membaik seiring melandainya kasus dan pelaksanaan program-program perbaikan perekonomian, sehingga tahun 2021 dapat tumbuh positif sebesar 3,33 persen dan terus membaik pada tahun 2022 menjadi sebesar 5,31 persen. Kondisi tingkat kemiskinan Jawa Tengah juga terkena dampak Covid-19 yang mengalami peningkatan pada September 2020 menjadi 11,84 persen (4.119,93 ribu orang) dari kondisi tahun 2019 yang sebesar 10,58 persen (3.679,40 ribu orang). Dengan berbagai upaya diantaranya pengurangan beban dan peningkatan pendapatan penduduk miskin, kemiskinan dapat kembali diturunkan menjadi 10,98 persen (3.858,23 ribu jiwa) pada tahun 2022. Demikian juga Tingkat Pengangguran Terbuka yang mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi sebesar 6,48 perset dari Tahun 2019 yang sebesar 4,44 persen. Dengan upaya pemulihan perekonomian pada tahun 2022 pengangguran kembali dapat diturunkan menjadi 5,96 persen.

Selain indikator makro pembangunan daerah tersebut, indikator lain yang capaiannya rendah yaitu produksi kedelai yang dipengaruhi oleh luas tanam kedelai yang semakin menurun dan minat petani untuk menanam kedelai berkurang dibandingkan komoditas lain. Sedangkan indikator dengan capaian sedang yaitu produksi perikanan tangkap yang dipengaruhi oleh penurunan sumber daya ikan di Laut Jawa, *over fishing* dan penggunaan alat penangkapan ikan (API) yang tidak ramah lingkungan telah memberi kontribusi pada penurunan pertumbuhan produksi ikan hasil tangkapan.

Dari hasil evaluasi tersebut di hasilkan rekomendasi tindak lanjutnya antara lain: 1) dalam penyusunan penyusunan dokumen kerangka kelembagaan dan regulasi jangka panjang dalam substansi kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan, dokumen RPJPN Tahun 2025–2045 harus menjadi rujukan, 2) dalam penyusunan dokumen perencanaan ke depan, perlu memperhatikan aspek keterukuran, konsistensi, serta keberlanjutan indikator capaian melalui *cascading* sasaran dan indikator terhadap perencanaan dan penganggaran pembangunan yang bersifat signifikan pada masing-masing bidang pembangunan termasuk perhitungan rencana target kinerja yang akan dicapai dengan mendasarkan hasil evaluasi dan mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis yang berkembang, baik dalam periode jangka panjang maupun dalam periode jangka menengah dan pendek, 3) penyusunan RPJMD harus berpedoman kepada RPJPD sehingga ada keselarasan

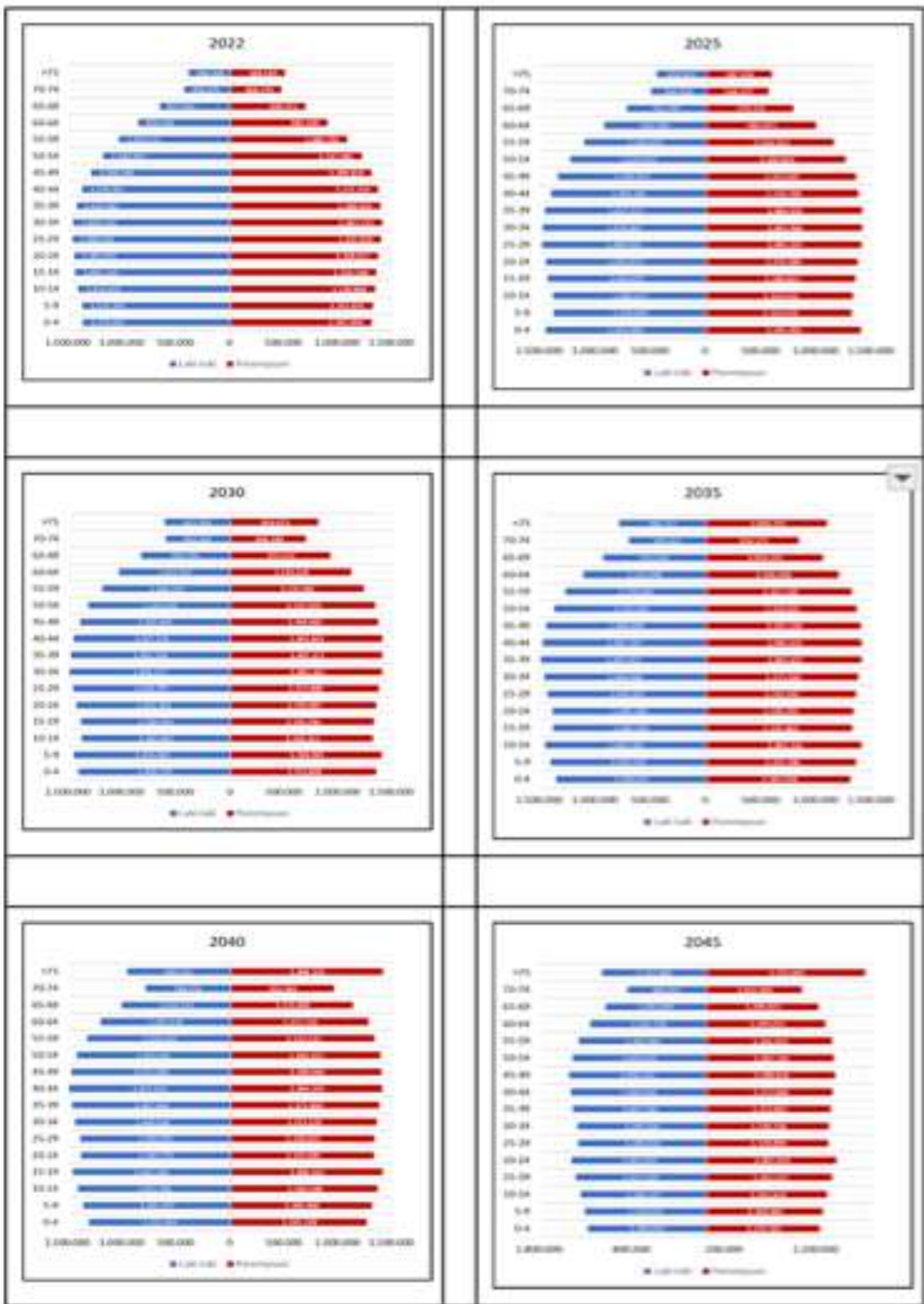
antara RPJPD dengan RPJMD, utamanya pada arah kebijakan tahunan maupun indikator kinerja yang akan dicapai, 4) perlu ada mekanisme *adjustment/* penyesuaian pada periode pelaksanaan atas dokumen perencanaan (jangka panjang/menengah/tahunan) mengingat perkembangan yang sangat dinamis maupun adanya situasi tidak terduga seperti kejadian pandemi Covid-19, serta 5) sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi situasi ketidakpastian pada masa pelaksanaan RPJPD periode selanjutnya, perlu di implementasikan upaya mitigasi risiko perencanaan yang mampu memberikan petunjuk dalam menanggulangi dan meminimalisir dampak risiko agar ketercapaian target pembangunan tetap terjaga sesuai dengan rencana atau *on-track*.

2.6. TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN PRASARANA SARANA PELAYANAN PUBLIK

Kondisi demografi Jawa Tengah merupakan keberhasilan kebijakan pengendalian penduduk di masa lalu utamanya program KB yang menjadikan kondisi demografi Jawa Tengah mengalami tren perkembangan mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang. Hal ini ditandai dengan capaian angka *Total Fertility Rate* (TFR) Jawa Tengah tahun 1971 yang sebesar 5,33 menjadi 2,04 pada tahun 2023.

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020 (SP2020) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), TFR Jawa Tengah diperkirakan akan terus menurun hingga angka 1,82 pada tahun 2045. Angka proyeksi tersebut dapat menggambarkan bahwa Jawa Tengah akan mengalami transisi demografi dari penduduk usia muda menjadi penduduk tua/lansia (*ageing population*). Penduduk lansia di Jawa Tengah pada tahun 2005 sebesar 9,41 persen, terus meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 13,07 persen, dan diperkirakan pada tahun 2045 jumlah lansia Jawa Tengah akan mencapai 17,92 persen. Transisi ini menjadikan Jawa Tengah hanya akan menikmati peluang memanfaatkan bonus demografi sampai dengan tahun 2030. Berdasarkan kondisi tersebut, Jawa Tengah ke depan perlu menetapkan kebijakan untuk mempertahankan pertumbuhan penduduk seimbang, mempercepat memetik peluang bonus demografi sekaligus antisipasi untuk kebijakan pro lansia di masa mendatang.

Penduduk Jawa Tengah diproyeksikan pada tahun 2045 menjadi sebanyak 42.585.397 jiwa, dengan rasio ketergantungan sebesar 53,43. Berdasarkan jenis kelamin, tahun 2045 diproyeksikan sebesar 99,29 yang artinya dalam 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki. Kepadatan penduduk di Jawa Tengah pada tahun 2045 juga diproyeksikan meningkat menjadi 1.240 jiwa/km². Berdasarkan kelompok umur, laki-laki dan perempuan, gambaran kondisi demografi Jawa Tengah sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat pada tabel dan gambar piramida penduduk sebagai berikut.



Sumber: BPS, 2023 (diolah)

Gambar 2.34.

Piramida Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Tabel 2.5.

Proyeksi Penduduk Jawa Tengah Berdasarkan Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025-2045

No	Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)			Proyeksi Penduduk (Jiwa)														
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	2025			2030			2035			2040			2045		
					Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	1.426.561	1.365.664	2.792.225	1.453.486	1.395.492	2.848.978	1.408.270	1.351.868	2.760.138	1.358.621	1.303.478	2.662.099	1.315.416	1.261.228	2.576.644	1.284.814	1.231.165	2.515.979
2.	5-9	1.377.541	1.315.833	2.693.374	1.378.005	1.314.570	2.692.575	1.455.489	1.398.905	2.854.394	1.410.524	1.355.346	2.765.870	1.361.107	1.306.968	2.668.075	1.318.053	1.254.655	2.582.738
3.	10-14	1.405.281	1.332.842	2.738.123	1.388.617	1.324.635	2.713.253	1.382.845	1.319.212	2.702.057	1.460.706	1.403.756	2.864.462	1.415.781	1.360.140	2.775.921	1.366.327	1.311.654	2.677.981
4.	15-19	1.443.572	1.357.383	2.800.955	1.434.037	1.349.663	2.783.700	1.388.903	1.326.796	2.716.699	1.384.325	1.321.463	2.705.789	1.462.364	1.406.162	2.868.526	1.417.519	1.362.537	2.780.055
5.	20-24	1.467.520	1.385.658	2.853.178	1.453.872	1.371.580	2.825.452	1.433.103	1.350.987	2.784.090	1.389.168	1.328.291	2.717.459	1.383.772	1.323.049	2.706.821	1.461.856	1.407.834	2.869.690
6.	25-29	1.486.756	1.408.520	2.895.276	1.488.450	1.405.197	2.893.647	1.458.787	1.372.888	2.831.675	1.438.108	1.352.547	2.790.650	1.394.069	1.330.023	2.724.116	1.388.814	1.324.899	2.713.713
7.	30-34	1.470.267	1.408.663	2.878.930	1.478.667	1.407.465	2.886.133	1.494.237	1.405.302	2.899.539	1.464.646	1.373.260	2.837.906	1.444.038	1.383.129	2.797.167	1.399.924	1.330.758	2.730.682
8.	35-39	1.438.170	1.396.349	2.834.519	1.457.117	1.406.075	2.863.203	1.481.196	1.407.377	2.888.573	1.497.037	1.405.612	2.902.649	1.467.644	1.373.804	2.841.448	1.447.189	1.353.802	2.800.991
9.	40-44	1.385.511	1.372.578	2.758.189	1.404.285	1.376.799	2.781.084	1.457.376	1.403.843	2.861.219	1.481.747	1.405.635	2.887.382	1.497.935	1.404.241	2.902.176	1.468.818	1.372.668	2.841.485
10.	45-49	1.309.884	1.326.710	2.636.594	1.344.073	1.352.547	2.696.620	1.395.601	1.389.682	2.785.283	1.448.840	1.397.330	2.846.170	1.473.585	1.399.669	2.873.255	1.490.152	1.398.656	2.888.813
11.	50-54	1.195.340	1.231.571	2.426.912	1.229.032	1.260.329	2.489.361	1.320.628	1.337.974	2.658.602	1.372.320	1.356.025	2.728.345	1.435.651	1.384.353	2.810.004	1.450.870	1.387.331	2.838.201
12.	55-59	1.056.358	1.108.354	2.164.712	1.100.859	1.156.162	2.257.021	1.186.339	1.235.901	2.422.240	1.276.649	1.313.330	2.589.973	1.338.429	1.332.532	2.660.961	1.381.601	1.361.432	2.743.033
13.	60-64	875.083	924.970	1.800.053	920.100	984.473	1.904.573	1.032.957	1.116.620	2.149.577	1.115.940	1.196.468	2.312.398	1.203.578	1.273.710	2.477.288	1.254.738	1.294.033	2.548.771
14.	65-69	677.073	720.897	1.397.970	721.747	779.311	1.501.058	826.391	925.632	1.752.023	931.510	1.054.255	1.985.765	1.010.153	1.133.409	2.143.562	1.092.849	1.209.423	2.302.272
15.	70-74	450.010	497.293	947.303	500.418	558.377	1.058.795	603.383	696.590	1.299.973	695.631	834.175	1.529.806	788.976	955.965	1.744.941	860.052	1.032.443	1.892.495
16.	>75	401.196	521.653	922.849	450.659	587.141	1.037.800	611.345	814.073	1.425.418	785.717	1.094.793	1.881.510	960.315	1.408.319	2.368.634	1.132.888	1.725.603	2.858.491
Total		18.866.423	18.574.539	37.540.962	19.203.434	19.030.499	38.233.933	19.937.880	19.833.650	39.771.480	20.512.479	20.495.754	41.008.233	20.932.838	21.006.701	41.939.538	21.216.474	21.368.923	42.585.397

Sumber: BPS, 2022

Berdasarkan proyeksi penduduk tersebut maka dapat dihitung proyeksi kebutuhan sarana prasarana selama 20 tahun yang akan datang.

a. Proyeksi Kebutuhan Rumah

Sebagian masyarakat di Provinsi Jawa Tengah masih belum memiliki atau tinggal di rumah layak huni. Kebutuhan rumah tinggal di Jawa Tengah mencapai 8,5 juta unit pada tahun 2022. Sehingga juga mempengaruhi angka *backlog* di Jawa Tengah yang mana angka tersebut masih terbilang cukup tinggi. Angka *backlog* di Provinsi Jawa Tengah ditinjau dari sisi kepemilikan dan kepenghunian. Pada tahun 2022, angka *backlog* kepemilikan mencapai 950.089 unit dan *backlog* kepenghunian mencapai 703.141 unit.

Tingginya angka *backlog* perumahan terjadi karena beberapa faktor di antaranya pertumbuhan jumlah penduduk, ketidakterjangkauan harga perumahan oleh masyarakat, swasta tidak mau berinvestasi untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) karena harga lahan tinggi, dan lain-lain. Jumlah penduduk yang cukup tinggi membuat angka kebutuhan perumahan juga semakin tinggi. Sehingga gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah membuat angka *backlog* yang cukup tinggi.

Pada masa mendatang jumlah *backlog* (ketiadaan ketersediaan rumah atas jumlah kebutuhan rumah) di Provinsi Jawa Tengah ini akan semakin tinggi seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan rumah tangga. Dengan melihat hal tersebut, maka kebutuhan rumah di Jawa Tengah berdasarkan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.6.

Proyeksi Kebutuhan Rumah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk	37.032.410	38.233.933	39.771.480	41.008.233	41.939.539	42.585.397
Proyeksi Kebutuhan Rumah	8.568.374	8.859.758	9.247.863	9.570.296	9.821.192	10.007.568

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

b. Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Kebutuhan air minum di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk sebesar 37.540.962 jiwa adalah sebesar 26.070 liter per detik. Sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk maka kebutuhan air minum akan terus meningkat, dan pada tahun 2045 dengan jumlah penduduk sebesar 42.585.397 jiwa diproyeksikan kebutuhan air minum sebesar 29.573 liter per detik. Proyeksi kebutuhan air minum didasarkan atas kebutuhan pokok minimal air minum sehari-hari yaitu sejumlah 60 liter/orang/hari (Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) dan proyeksi jumlah penduduk.

Kebutuhan air minum di Jawa Tengah berdasarkan proyeksi penduduk sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.7.

Proyeksi Kebutuhan Air Minum di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi	Tahun				
	Tahun 2023	2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk	37.540.962	38.233.933	39.771.480	41.008.233	41.939.539	42.585.397
Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Liter/detik)	26.070	26.551	27.619	28.478	29.125	29.573

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

c. Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik

Beban puncak sistem tenaga listrik di Provinsi Jawa Tengah tertinggi tahun 2023 sekitar 4.649 MW yang tercapai pada bulan November 2023. Sementara daya mampu pasok pembangkit di Jawa Tengah masih aman dengan kapasitas pembangkit ± 7.505 MW sehingga masih ada cadangan daya sebesar ± 2.856 MW. Kelebihan daya tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal bukan hanya untuk sektor konsumtif rumah tangga tapi disektor produktif. Dengan melihat potensi tersebut masih terbuka ruang yang lebar untuk pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah, sehingga berdampak pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu komponen utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan rakyat dan mencerdaskan kehidupan bangsa menuju masyarakat adil dan makmur yang merata. Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar yang sangat penting bagi perkembangan Provinsi Jawa Tengah. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan energi listrik masyarakat Jawa Tengah semakin meningkat karena kemajuan teknologi yang cukup pesat, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan kebutuhan kawasan industri yang semakin meningkat. Proyeksi kebutuhan energi listrik di suatu provinsi tergantung dari data historis penjualan tenaga listrik dan mempertimbangkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi, penambahan jumlah penduduk dan peningkatan rasio elektrifikasi di masa datang.

Proyeksi kebutuhan listrik di Provinsi Jawa Tengah dihitung berdasarkan proyeksi konsumsi listrik tahun 2025-2045 menggunakan metode perhitungan ekonometri

Simple-E (*Simple Econometric Simulation System*). Proyeksi menggunakan data-data historis dari tahun 2012-2023 meliputi data: 1) pertumbuhan ekonomi (PDRB), 2) tarif listrik per sektor, 3) jumlah pelanggan per sektor, 4) jumlah penduduk, dan 5) rasio elektrifikasi. Proyeksi kebutuhan listrik dibagi menjadi empat sektor yaitu rumah tangga, bisnis/komersial, industri, dan publik (sosial, pemerintah, dan penerangan jalan umum/PJU). Proyeksi kebutuhan listrik Provinsi Jawa Tengah tahun 2025–2045 dihitung dengan proyeksi rata-rata pertumbuhannya selama 20 tahun sekitar 5,8 persen, yang dirinci sebagai berikut.

Tabel 2.8.

Proyeksi Kebutuhan Listrik di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk	37.540.962	38.233.933	39.771.480	41.008.233	41.939.539	42.585.397
- Proyeksi Kebutuhan Listrik RT (GWh)	13.620	14.509	17.089	19.668	22.248	24.827
- Proyeksi Kebutuhan Listrik Bisnis (GWh)	4.171	4895	6.266	10.294	16.299	23.777
- Proyeksi Kebutuhan Listrik Publik (GWh)	2.233	2.566	3.629	5.077	7.081	10.040
- Proyeksi Kebutuhan Listrik Industri (GWh)	8.408	32687	15.928	23.602	33.602	41.644
Total Proyeksi Kebutuhan Listrik (GWh):	28.432	32.687	42.911	58.642	79.230	100.289.

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

Pada tahun 2025–2031, sektor rumah tangga diproyeksikan merupakan sektor yang mendominasi konsumsi energi listrik di Jawa Tengah. Namun, mulai tahun 2032 sektor industri diproyeksikan menjadi sektor yang mendominasi konsumsi energi listrik di Jawa Tengah dibandingkan dengan sektor lainnya. Proyeksi kebutuhan listrik tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kebutuhan suatu proyek pembangkit di masa yang akan datang. Di samping itu prakiraan kebutuhan listrik diatas juga dapat memberikan informasi kepada PT. PLN (Persero) UID Jawa Tengah dan DIY selaku penyedia kebutuhan listrik di Jawa Tengah untuk mengurangi risiko dalam pengembangan usaha. Bila prakiraan yang dihasilkan lebih tinggi dari realisasi (*over estimation*) maka akan menyebabkan adanya kelebihan pasokan (*idle capacity*) yang menyebabkan *over investment*. Demikian pula sebaliknya, apabila prakiraan yang dihasilkan lebih kecil dari realisasi (*under estimation*) maka akan terjadi kekurangan daya/berisiko terjadi pemadaman.

d. Proyeksi Persampahan

Timbulan sampah di Provinsi Jawa Tengah pada 2022 telah mencapai 6,3 juta ton per tahun dan diperkirakan akan terus meningkat dan pada tahun 2045 diperkirakan mencapai 6,9 juta ton per tahun. Asumsi peningkatan timbulan

sampah tersebut berdasarkan perkiraan pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah. Dengan tren pertumbuhan selama lima tahun terakhir maka diperkirakan sampai dengan tahun 2045 Provinsi Jawa Tengah hanya mampu mengelola 89,37 persen sampah yang dihasilkan. Proyeksi timbulan sampah di Jawa Tengah sampai dengan tahun 2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9.
Proyeksi Timbulan Sampah di Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2022	Tahun			
		2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6
Jumlah Penduduk	37.032.410	39.771.480	41.008.233	41.939.539	42.585.397
Proyeksi Timbulan Sampah (Ton)	6.363.806	6.485.914	6.698.913	6.861.990	6.994.651

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

e. Proyeksi Fasilitas Kesehatan

Kebutuhan fasilitas kesehatan diproyeksikan sejalan dengan proyeksi penduduk Jawa Tengah pada 2045. Proyeksi kebutuhan tempat tidur rumah sakit sesuai standar 1 per 1.000 penduduk telah terpenuhi saat ini, sedangkan proyeksi kebutuhan Puskesmas sesuai standar 1 per 30.000 penduduk memerlukan 1.420 Puskesmas. Pemenuhan kebutuhan Puskesmas diperlukan untuk memperkuat upaya promotif dan preventif penanggulangan masalah kesehatan utamanya pada lingkup komunitas. Proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan di Jawa Tengah tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10.
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk	37.540.962	38.233.933	39.771.480	41.008.233	41.939.539	42.585.397
Proyeksi Fasilitas Kesehatan Puskesmas	881	1.274	1.326	1.367	1.398	1.420

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

f. Proyeksi Fasilitas Pendidikan

Penyediaan fasilitas pendidikan merupakan faktor penting untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah, mengingat fasilitas pendidikan sebagai instrumen pendukung dalam pendidikan. Jenis, tipe dan standar nasional fasilitas pendidikan diatur oleh Kemendikbud dan Kementerian PUPR. Namun dalam perkembangannya terdapat pembaharuan terkait standar nasional pendidikan yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2021. PP tersebut didalamnya memuat delapan standar pendidikan, salah satunya standar sarana prasarana pendidikan yang secara rinci diatur dengan Permendikbud. Seiring berlakunya PP tersebut, maka Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007

tentang Standar Sarana Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA dinyatakan tidak berlaku lagi, diganti dengan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2023. Terdapat beberapa syarat ketentuan teknis standar sarana prasarana yang dihilangkan, antara lain: 1) minimal rombongan belajar (rombel) untuk SD/MI sebanyak 6, SMP/MTs dan SMA/MA sebanyak 3 dan maksimum rombel SD/MI sebanyak 24, SMP/MTs dan SMA/MA sebanyak 27, serta 2) satu kecamatan minimal menyediakan satu SMP/MTs dan satu SMA/MA, sedangkan SD/MI dengan 6 rombongan belajar disediakan untuk 2.000 penduduk.

Disisi lain terdapat Peraturan Menteri PU Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Kriteria Teknis Kawasan Budidaya juga mengatur mengenai kebutuhan sarana prasarana pendidikan pada kawasan peruntukan permukiman. Secara detail, dituangkan dalam SNI 03-173-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.11.
Pembakuan Tipe SD/MI, SLTP/MTs, SMU

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar	Peserta Didik (siswa)	Lokasi
SD/MI	Tipe A	12	480	Dekat dengan lokasi ruang terbuka lingkungan
	Tipe B	9	360	
	Tipe C	6	240	
SLTP/MTs	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	
SMU	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	

Sumber: SNI 03-173-2004

Dari tinjauan kedua regulasi tersebut, tidak ada ketentuan mengenai rasio ideal penduduk dengan ketersediaan sekolah. Pendekatan yang digunakan dalam penyediaan prasarana pendidikan adalah mendasarkan jumlah rombel dan siswa. Hal ini yang kemudian dijadikan dasar dalam perhitungan proyeksi kebutuhan prasarana pendidikan di Jawa Tengah tahun 2025-2045.

Metode perhitungan proyeksi kebutuhan rombel dan prasarana sekolah sejalan dengan tren pertumbuhan jumlah penduduk. Sehingga diperoleh perkiraan jumlah penduduk usia 16-18 tahun dan jumlah rombel di Jawa Tengah kurun waktu 2025-2045 cenderung fluktuatif. Dari proyeksi kebutuhan jumlah rombel dapat diperkirakan kapasitas satu rombel mampu menampung rata-rata 39 siswa. Perkiraan kebutuhan rombel dikonversi ke dalam prasarana sekolah dengan membagi 18 (asumsi minimal rombel dalam 1 sekolah/tipe B) diperoleh hasil proyeksi kebutuhan prasarana sekolah. Tren proyeksi prasarana pendidikan (sekolah) fluktuatif dengan rata-rata penambahan unit sekolah mendasarkan provinsi hanya sebesar 0,12 persen, sedangkan kabupaten/kota tumbuh sebesar 0,2 persen.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa terdapat pergeseran dalam penyediaan layanan pendidikan, tidak hanya berorientasi pada penyediaan bangunan gedung/unit sekolah secara fisik tapi lebih mengarah pada fungsi layanan pendidikan tanpa batas ruang dan waktu. Atas kondisi tersebut, maka perlu didorong penyediaan jumlah dan kualitas layanan pendidikan selain pada jalur

formal, yaitu nonformal (pendidikan kesetaraan atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat/PKBM, Sanggar Kegiatan Belajar/SKB), dan informal (*home schooling*) sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Perhitungan proyeksi kebutuhan prasarana sarana pendidikan tersebut belum mempertimbangkan berbagai aspek seperti distribusi pemerataan, kepadatan penduduk, radius akses ke layanan pendidikan, potensi siswa pada jenjang sebelumnya, penduduk usia sekolah dan kebijakan zonasi. Proyeksi kebutuhan sekolah di Jawa Tengah berdasarkan proyeksi jumlah penduduk sampai dengan tahun 2045 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.12.

Proyeksi Kebutuhan Sekolah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk						
7-12 Tahun	3.249.168	3.229.304	3.335.992	3.398.807	3.265.162	3.154.181
13-15 Tahun	1.658.373	1.644.379	1.610.146	1.690.594	1.698.695	1.630.904
16-18 Tahun	1.680.869	1.671.887	1.629.556	1.615.918	1.731.233	1.666.306
Proyeksi Fasilitas Pendidikan						
SD	8.511	8.983	9.432	9.903	9.408	8.938
SMP	3.559	3.749	3.936	4.133	3.926	3.730
SMA/SMK	2.620	2.467	2.412	2.399	2.552	2.473

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2024

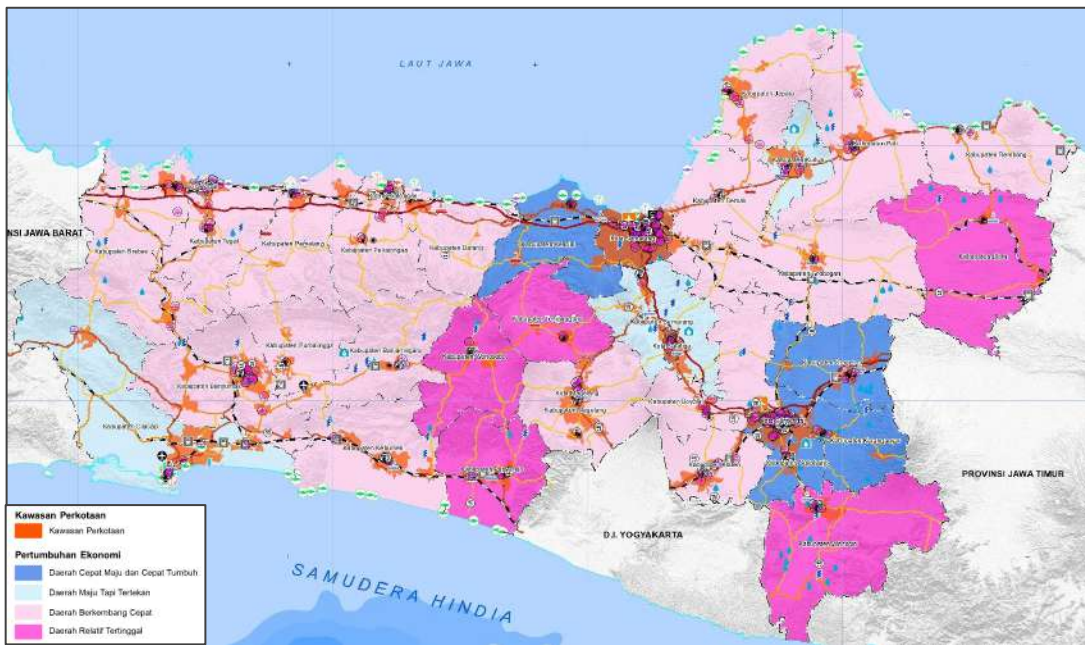
2.7. PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

Kondisi kewilayahan Jawa Tengah dapat digambarkan sebagai berikut. Pada tahun 2022 Jawa Tengah memiliki rasio jumlah penduduk perkotaan sebesar 53,43 persen dan perdesaan sebesar 45,57 persen. BPS memproyeksikan pada tahun 2045 di Jawa Tengah rasio jumlah penduduk perkotaan akan mencapai 69,34 persen dan perdesaan mencapai 33,87 persen. Perkembangan jumlah penduduk perkotaan akan terus meningkat yang membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana dan kebutuhan dasar perkotaan di seluruh Jawa Tengah.

Dalam pembangunan wilayah, adanya penyediaan infrastruktur (konektivitas, energi dan sarana prasarana dasar) menjadi faktor pendorong yang penting dan memerlukan adanya fokus dan kekuatan fiskal daerah. Akan tetapi **pembangunan antarwilayah di Jawa Tengah masih kurang merata terutama terkait dengan pembangunan ekonomi dan infrastruktur**. Penyediaan infrastruktur masih terpusat pada daerah perkotaan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta, dan Perkotaan Cilacap. Daerah tersebut masuk dalam kategori ekonomi cepat maju cepat tumbuh (Kota Semarang, Kota Surakarta) dan daerah maju tapi tertekan (Kabupaten Cilacap). Sedangkan pada kategori ekonomi daerah tertinggal memiliki sarana dan prasarana penunjang belum optimal seperti di Kabupaten Blora, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung. Sehingga masih diperlukan adanya

dukungan peningkatan infrastruktur dasar perkotaan dan perdesaan, peningkatan konektivitas penghubung antarkawasan pada kawasan yang masih tertinggal, serta peningkatan ekonomi melalui sektor unggulan.

Dalam hal penyediaan aksesibilitas (konektivitas desa kota dan aksesibilitas jalan) dengan adanya upaya penambahan ruas jalan tol dapat meningkatkan indeks aksesibilitas di beberapa kabupaten/kota, akan tetapi belum mampu meningkatkan distribusi dan pola pergerakan. Sehingga masih diperlukan dukungan pembangunan maupun peningkatan akses jalur penghubung antar PKN, PKW dan PKL khususnya untuk mendukung jalur distribusi hulu-hilir yang mendukung kegiatan perekonomian di Jawa Tengah. Kebutuhan pengembangan akses ini khususnya di perbatasan yaitu di Kabupaten Cilacap, Rembang, Blora, Brebes, dan di wilayah tengah selatan yaitu di Kabupaten Wonosobo.



Sumber: Laporan Antara Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2022

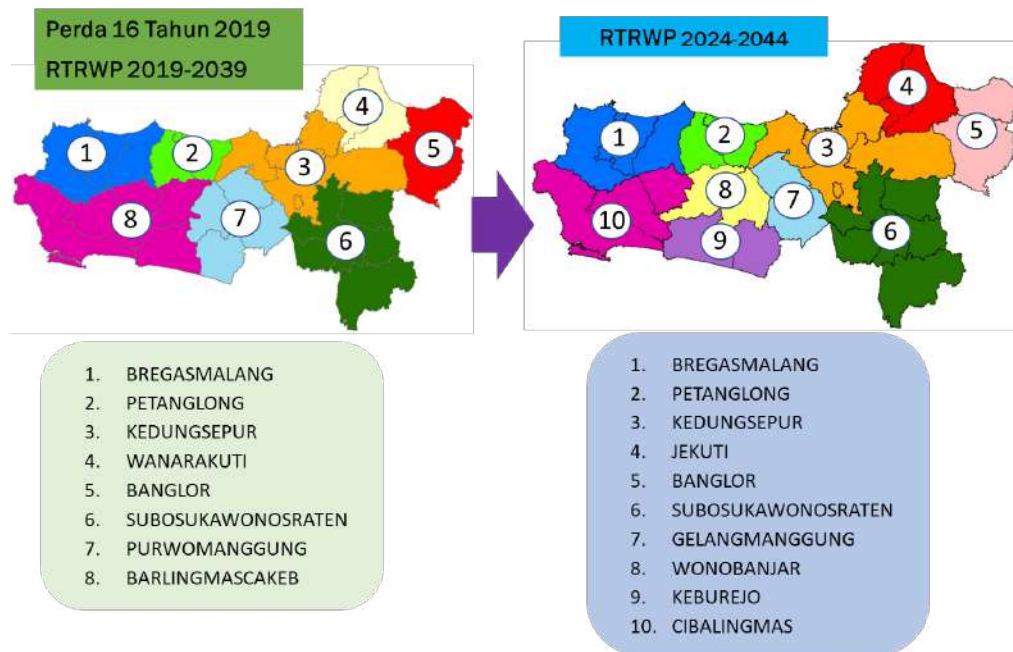
Gambar 2.35.

Pertumbuhan Ekonomi dan Persebaran Infrastruktur di Provinsi Jawa Tengah

Dalam upaya pemerataan pembangunan, pengurangan ketimpangan, serta pengembangan performa pertumbuhan pada wilayah yang rendah di Jawa Tengah dibuatlah strategi pembagian wilayah pengembangan yang membagi dan mengelompokkan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sesuai dengan kesamaan karakteristik, interaksi/pergerakan antarwilayah, dan teori basis ekonomi dimana melihat laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah.

Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah sejalan dengan perencanaan dalam dokumen penataan ruang. Dalam Perda Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2029-2039 terdapat 8 (delapan) Wilayah Pengembangan (WP) meliputi Kedungsepur, Subosukawonosraten, Petanglong, Bergasmalang, Barlingmascakeb, Purwomanggung, Wanarakuti, dan Banglor. Selanjutnya dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 terdapat perubahan pembagian WP menjadi 10 (sepuluh) WP meliputi Kedungsepur, Subosukawonosraten, Petanglong, Bergasmalang, Jekuti, Banglor, Gelangmanggung, Wonobanjar, Keburejo, dan Cibalingmas. Perubahan ini

berdasarkan kesamaan karakteristik dan ketergantungan perkembangan antarwilayah serta interaksi/pergerakan antarwilayah.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 dan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (diolah), 2024

Gambar 2.36.
Dinamika Perubahan Wilayah Pengembangan (WP)
di Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan pengembangan wilayah Jawa Tengah disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044. Tujuan penataan ruang dalam konteks untuk pengembangan wilayah Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan adalah “Mewujudkan ruang wilayah Provinsi yang maju, aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berbasis pertanian, industri, perdagangan, dan pariwisata dalam keterpaduan pengelolaan alam darat dan laut pesisir”. Guna mewujudkan tujuan tersebut didukung dengan **arah kebijakan penataan ruang** meliputi:

1. Peningkatan sistem permukiman yang mengintegrasikan pengembangan perkotaan dan perdesaan, antara lain dengan: 1) meningkatkan keterkaitan antarpusat pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), 2) mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah sekitar, 3) mendorong pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak, 4) mengarahkan dan mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan di sepanjang pantai utara dan pantai selatan, 5) mendorong pertumbuhan kawasan di Jawa Tengah bagian tengah dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung, 6) meningkatkan aksesibilitas kawasan perdesaan ke pusat pertumbuhan, 7) mengembangkan sektor-sektor primer perdesaan melalui upaya peningkatan produktivitas tanpa mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, 8) mengembangkan kegiatan industri pertanian dengan pengembangan produksi, pengolahan, dan pemasaran, 9)

- meningkatkan prasarana dan sarana di kawasan perdesaan, dan 10) meningkatkan keterkaitan sosial dan ekonomi desa-kota (*urban rural linkage*);
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata sebagai pendorong pengembangan wilayah, antara lain dengan: 1) meningkatkan sistem prasarana transportasi untuk kelancaran proses koleksi dan distribusi barang/jasa, 2) meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, 3) mengembangkan sistem prasarana transportasi laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antarwilayah dan antarpulau, 4) mengembangkan sistem prasarana transportasi jalan raya yang terpadu dengan fasilitas penyeberangan (sungai, danau, dan pulau) untuk meningkatkan aksesibilitas dan interaksi antar kawasan, 5) pengembangan sistem jaringan transportasi umum terpadu dengan mempertimbangkan kawasan yang berorientasi transit (*Transit Oriented Development*) yang mengembangkan kawasan di dalam dan di sekitar simpul transit, 6) mengembangkan dan mengoptimalkan keterpaduan sistem transportasi darat, laut, dan udara, dengan tujuan meningkatkan kemampuan tiap jenis transportasi secara baik dengan efisien dan efektif, 7) peningkatan mobilitas transportasi barang melalui pengembangan pelabuhan darat (*dryport*) sesuai kebutuhan baik di dalam maupun di luar kawasan industri, 8) mengembangkan sistem prasarana energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik, 9) mengembangkan prasarana telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan kemampuan keterhubungan dan integrasi wilayah, 10) meningkatkan kualitas jaringan transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi secara optimal, 11) mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang kegiatan sektor terkait pemanfaatan sumber daya air, serta 12) mengembangkan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional air bersih, persampahan, drainase, dan limbah;
 3. Peningkatan pelestarian kawasan lindung untuk mengurangi dampak pemanasan global dan perubahan iklim, antara lain dengan: 1) penetapan kawasan lindung sesuai dengan sifat perlindungannya, 2) membatasi dan mencegah pemanfaatan ruang yang berpotensi mengurangi dan mengganggu fungsi lindung kawasan, 3) membatasi pengembangan prasarana dan sarana yang dapat memicu perkembangan kegiatan budidaya di kawasan lindung, 4) menambah tutupan vegetasi menyerupai hutan dalam rangka penghijauan khususnya di daerah aliran sungai kritis, 5) meningkatkan keseimbangan ekosistem melalui pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, 6) pengendalian pemanfaatan ruang kawasan rawan bencana, serta 7) merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang;
 4. Pemanfaatan kawasan budidaya yang tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, antara lain dengan: 1) mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup,

- 2) mengembangkan secara selektif bangunan fisik di kawasan budidaya yang terdapat potensi bencana berdasarkan kajian teknis untuk meminimalkan potensi kejadian bencana, 3) meningkatkan kualitas lahan kritis, 4) membatasi alih fungsi lahan sawah melalui pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak sporadis untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarananya, 5) mengembangkan kawasan industri dan/atau kawasan peruntukan industri sebagai wadah pengembangan kegiatan industri berdasarkan prinsip mandiri, keberlanjutan, serta kelestarian alam, 6) mengembangkan prasarana dan sarana penangkapan dan penyimpanan karbon (*Carbon Capture Storage*), 7) mendorong pengembangan wisata yang mengedepankan pemanfaatan jasa lingkungan dalam rangka mewujudkan kelestarian alam, dan 8) mengendalikan perkembangan permukiman di kawasan rawan bencana alam;
5. Peningkatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah antara lain dengan: 1) mengelola ekosistem habitat vital di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai upaya menjaga keberadaan daerah pemijahan, daerah asuhan dan pembesaran, serta daerah mencari makan biota, 2) meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 3) meningkatkan upaya perlindungan terhadap jalur migrasi spesies-spesies yang dilindungi, 4) mengendalikan, mengurangi, mencegah dan mengantisipasi upaya terjadinya degradasi habitat vital dan sumber daya alam dan lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 5) meningkatkan upaya produktivitas dan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis daya dukung lingkungan, 6) meningkatkan upaya pengawasan, pengendalian dan pengelolaan berbagai aktivitas antropogenik di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 7) meningkatkan upaya produktivitas perikanan dan kelautan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, 8) mengembalikan fungsi hutan mangrove sebagai pelindung pantai, 9) memanfaatkan perairan pulau-pulau kecil sebagai ruang aktivitas di bidang perikanan dan kelautan, 10) mengembangkan dan mengoptimalkan keberadaan kawasan khusus yaitu Segara Anakan, Nusakambangan dan Karimunjawa secara berkelanjutan, 11) memperketat penjagaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan wilayah perairan oleh berbagai sektor, 12) meningkatkan upaya ketahanan, peringatan dini dan mitigasi bencana di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta 13) memberikan pengaturan, supervisi dan tindakan tegas terhadap penyimpangan pemanfaatan lahan di daerah pantai serta memperkuat sinergitas dan harmonisasi kegiatan berbagai sektor;
6. Pengembangan kawasan strategis provinsi antara lain dengan: 1) mendorong pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, 2) mendorong pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, 3) mendorong pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, dan 4) menerpadukan pengembangan kawasan strategis provinsi dengan rencana tata ruang kabupaten/kota;
7. Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan antara lain dengan: 1) peningkatan pengelolaan dan pengamanan aset pertahanan dan keamanan,

dan 2) pengembangan struktur ruang dan pola ruang yang dapat mendukung operasionalisasi rencana kontinjensi kondisi darurat perang

Arahan penataan ruang di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi arahan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis yang dijabarkan sebagai berikut.

1. Struktur Ruang

Rencana penataan ruang dalam bentuk rencana struktur ruang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang wilayah salah satunya memuat sistem pusat permukiman yang menetapkan fungsi kawasan perkotaan untuk melayani kegiatan dari tingkat internasional, nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan. Sistem pusat permukiman yang ada pada rencana tata ruang terbagi menjadi tiga meliputi:

- a. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi, meliputi:
 - 1) Kawasan perkotaan Semarang–Kendal–Demak–Ungaran–Salatiga–Purwodadi (Kedung-sepur);
 - 2) Kawasan perkotaan Surakarta;
 - 3) Kawasan perkotaan Cilacap;
- b. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota, meliputi:
 - 1) kawasan perkotaan Purwokerto;
 - 2) kawasan perkotaan Kebumen;
 - 3) kawasan perkotaan Wonosobo;
 - 4) kawasan perkotaan Boyolali;
 - 5) kawasan perkotaan Klaten;
 - 6) kawasan perkotaan Cepu;
 - 7) kawasan perkotaan Kudus;
 - 8) kawasan perkotaan Magelang;
 - 9) kawasan perkotaan Pekalongan; dan
 - 10) kawasan perkotaan Tegal;
- c. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan, yang berada di:
 - 1) Kabupaten Cilacap meliputi: kawasan perkotaan Kroya, kawasan perkotaan Majenang, dan kawasan perkotaan Sidareja;
 - 2) Kabupaten Banyumas meliputi: kawasan perkotaan Wangon, kawasan perkotaan Ajibarang, kawasan perkotaan Sokaraja, kawasan perkotaan Banyumas, dan kawasan perkotaan Sumpiuh;
 - 3) Kabupaten Purbalingga meliputi: kawasan perkotaan Purbalingga, dan kawasan perkotaan Bobotsari;
 - 4) Kabupaten Banjarnegara meliputi: kawasan perkotaan Banjarnegara dan kawasan perkotaan Klampok;

- 5) Kabupaten Kebumen meliputi: kawasan perkotaan Gombong Karanganyar dan kawasan perkotaan Prembun;
- 6) Kabupaten Purworejo meliputi: kawasan perkotaan Purworejo dan kawasan perkotaan Kutoarjo;
- 7) Kabupaten Wonosobo berupa kawasan perkotaan Kertek;
- 8) Kabupaten Magelang meliputi: kawasan perkotaan Mungkid, kawasan perkotaan Muntilan, kawasan perkotaan Mertoyudan, kawasan perkotaan Secang, dan kawasan perkotaan Borobudur;
- 9) Kabupaten Boyolali meliputi: kawasan perkotaan Banyudono, kawasan perkotaan Ampel, kawasan perkotaan Karanggede, dan kawasan perkotaan Simo;
- 10) Kabupaten Klaten meliputi: kawasan perkotaan Delanggu dan kawasan perkotaan Prambanan;
- 11) Kabupaten Sukoharjo meliputi: kawasan perkotaan Sukoharjo, kawasan perkotaan Kartasura, dan Kawasan perkotaan Grogol;
- 12) Kabupaten Wonogiri meliputi: kawasan perkotaan Wonogiri dan kawasan perkotaan Pracimantoro;
- 13) Kabupaten Karanganyar meliputi: kawasan perkotaan Karanganyar dan kawasan perkotaan Colomadu;
- 14) Kabupaten Sragen meliputi: kawasan perkotaan Sragen dan kawasan Perkotaan Gemolong;
- 15) Kabupaten Grobogan meliputi: kawasan perkotaan Purwodadi, kawasan perkotaan Gubug, dan kawasan perkotaan Godong;
- 16) Kabupaten Blora meliputi: kawasan perkotaan Blora dan kawasan perkotaan Randublatung;
- 17) Kabupaten Rembang meliputi: kawasan perkotaan Rembang dan kawasan perkotaan Lasem;
- 18) Kabupaten Pati meliputi: kawasan perkotaan Pati, kawasan perkotaan Juwana, dan kawasan perkotaan Tayu;
- 19) Kabupaten Jepara meliputi: kawasan perkotaan Jepara, kawasan perkotaan Kalinyamatan, dan kawasan perkotaan Bangsri;
- 20) Kabupaten Demak meliputi: kawasan perkotaan Demak dan kawasan perkotaan Mranggen;
- 21) Kabupaten Semarang meliputi: kawasan perkotaan Ungaran dan kawasan perkotaan Ambarawa;
- 22) Kabupaten Temanggung meliputi: kawasan perkotaan Temanggung dan kawasan perkotaan Parakan;
- 23) Kabupaten Kendal meliputi: kawasan perkotaan Kendal, kawasan perkotaan Boja, kawasan perkotaan Kaliwungu, kawasan perkotaan Weleri, dan kawasan perkotaan Sukorejo;
- 24) Kabupaten Batang meliputi: kawasan perkotaan Batang, kawasan Perkotaan Limpung, dan kawasan perkotaan Gringsing–Banyuputih;
- 25) Kabupaten Pekalongan meliputi: kawasan perkotaan Kajen, kawasan perkotaan Wiradesa, dan kawasan perkotaan Kedungwuni-Buaran;
- 26) Kabupaten Pemalang meliputi: kawasan perkotaan Pemalang, kawasan perkotaan Comal, kawasan perkotaan Randudongkal, kawasan perkotaan Belik, dan kawasan perkotaan Moga;

- 27) Kabupaten Tegal meliputi: kawasan perkotaan Slawi-Adiwerna dan kawasan perkotaan Lebaksiu-Balapulang;
- 28) Kabupaten Brebes meliputi: kawasan perkotaan Brebes, kawasan perkotaan Losari, kawasan perkotaan Ketanggungan-Kersana, dan kawasan perkotaan Bumiayu.

Sistem Pusat Permukiman tersebut terintegrasi dengan pusat pertumbuhan kelautan yang tersebar di Perairan Pesisir Kabupaten Cilacap, Perairan Pesisir Kabupaten Kebumen, Perairan Pesisir Kabupaten Purworejo, Perairan Pesisir Kabupaten Brebes, Perairan Pesisir Kabupaten Tegal, Perairan Pesisir Kota Tegal, Perairan Pesisir Kabupaten Pemalang, Perairan Pesisir Kabupaten Pekalongan, Perairan Pesisir Kota Pekalongan, Perairan Pesisir Kabupaten Batang, Perairan Pesisir Kabupaten Kendal, Perairan Pesisir Kota Semarang, Perairan Pesisir Kabupaten Demak, Perairan Pesisir Kabupaten Jepara, Perairan Pesisir Kabupaten Pati, Perairan Pesisir Kabupaten Rembang, dan Perairan Pesisir Kabupaten Wonogiri.

2. Pola Ruang

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Adapun rencana pola ruang wilayah provinsi berfungsi:

- a. Sebagai alokasi ruang untuk kawasan budidaya bagi berbagai kegiatan sosial ekonomi dan kawasan lindung bagi pelestarian lingkungan dalam wilayah provinsi;
- b. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
- c. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk dua puluh tahun; dan
- d. Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang skala besar pada wilayah provinsi.

Pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, sebagai berikut.

a. Kawasan Lindung

- 1) Badan air berupa badan air sungai, danau, embung, dan waduk berada di seluruh kabupaten/kota;
- 2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung yang terdapat di 24 kabupaten antara lain Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo. Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, namun akan digunakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) meliputi:

- a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pariwisata (PTB/W) berada di Kabupaten Kebumen;
 - b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan pencadangan konservasi di laut (PTB/KPL) berada di Kabupaten Kebumen; dan
 - c) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya/kawasan perikanan (PTB/IK) berada di Kabupaten Kebumen;
- 3) Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat, terdapat di 28 kabupaten antara lain Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo;
- 4) Kawasan konservasi berupa kawasan suaka alam meliputi kawasan cagar alam dan suaka marga satwa, kawasan pelestarian alam dan taman pelestarian alam, serta kawasan konservasi perairan. Kawasan konservasi terdapat pada:
- a) Kabupaten Cilacap meliputi Cagar Alam Nusakambangan Barat, Cagar Alam Nusakambangan Timur, dan Taman Wisata Alam Gunung Selok;
 - b) Kabupaten Banjarnegara meliputi Cagar Alam Telogo Dringo, Cagar Alam Telogo Sumurup, dan Cagar Alam Pringombo I dan II;
 - c) Kabupaten Wonosobo berupa Cagar Alam Pantodomas dan Taman Wisata Alam Telogo Warno/Pengilon;
 - d) Kabupaten Wonogiri berupa Cagar Alam Donoloyo dan Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/Ngargoyoso;
 - e) Kabupaten Sragen berupa Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan;
 - f) Kabupaten Blora meliputi Cagar Alam Bekutuk dan Cagar Alam Cabak I/II;
 - g) Kabupaten Rembang berupa Cagar Alam Gunung Butak, Cagar Alam Sumber Semen, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jahe;
 - h) Kabupaten Jepara meliputi Cagar Alam Keling I, Cagar Alam Keling II/III, Cagar Alam Kembang, Cagar Alam Gunung Celing, Taman Nasional Karimunjawa, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Pulau Panjang;
 - i) Kabupaten Semarang meliputi Cagar Alam Gebugan, Cagar Alam Sepakung, dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
 - j) Kabupaten Kendal berupa Cagar Alam Pager Wunung Darupono;

- k) Kabupaten Batang meliputi Cagar Alam Peson Subah I, Cagar Alam Peson Subah II, Cagar Alam Kecubung Ulolanang, dan Kawasan Konservasi Ujungnegoro;
 - l) Kabupaten Pemalang meliputi Cagar Alam Bantarbolang, Cagar Alam Curug Bengkawah, dan Cagar Alam Moga;
 - m) Kabupaten Tegal berupa Cagar Alam Sub Vak 18 C/19 B, Taman Wisata Alam Guci, dan Kawasan Konservasi Taman Wisata Perairan Karang Jeruk;
 - n) Kabupaten Brebes berupa Cagar Alam Telogo Ranjeng;
 - o) Kabupaten Magelang berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
 - p) Kabupaten Boyolali berupa Taman Nasional Gunung Merapi dan Taman Nasional Gunung Merbabu;
 - q) Kabupaten Klaten berupa Taman Nasional Gunung Merapi;
 - r) Kabupaten Karanganyar berupa Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunegara I/ Ngargoyoso dan Taman Wisata Alam Grojogan Sewu;
- 5) Kawasan pencadangan konservasi di laut meliputi:
- a) perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes;
 - b) perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang;
 - c) perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal;
 - d) perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak;
 - e) perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara;
 - f) perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang;
 - g) perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen;
 - h) perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap;
- 6) Kawasan cagar budaya berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kota Surakarta, dan Kota Semarang;
- 7) Kawasan ekosistem mangrove meliputi perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes.
- b. Kawasan Budidaya
- 1) Kawasan hutan produksi (KHP) meliputi Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung,

Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, dan Kota Semarang. Dalam KHP terdapat kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) untuk kepentingan penelitian pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan, serta religi, dan budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai KHP, namun akan digunakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) yang selanjutnya disebut:

- a) Kawasan hutan produksi/kawasan ekosistem mangrove (KHP/EM) berada di Kabupaten Jepara;
 - b) Kawasan hutan produksi/pariwisata (KHP/W) berada di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Purworejo;
 - c) Kawasan hutan produksi/kawasan pencadangan konservasi di laut (KHP/KPL) berada di Kabupaten Kebumen;
 - d) Kawasan hutan produksi/kawasan perikanan (KHP/IK) berada di Kabupaten Jepara; dan
 - e) Kawasan hutan produksi/kawasan peruntukan industri (KHP/KPI) berada di Kabupaten Batang;
- 2) Kawasan perkebunan rakyat (KR) berada di Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Wonosobo, dan Kota Semarang. Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan masih ditetapkan sebagai KR, namun akan digunakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) meliputi kawasan perkebunan rakyat/kawasan hutan produksi (KR/KHP) berada di Kabupaten Tegal.;
- 3) Kawasan pertanian (P) terdiri atas kawasan tanaman pangan dan kawasan hortikultura meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kendal, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kudus, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Wonosobo, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Kota Salatiga, Kota Semarang, dan Kota Tegal. Dalam rangka perwujudan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan provinsi ditetapkan kawasan pertanian (P) sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan

dengan luas paling sedikit 1.025.255 hektar. Kawasan yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan masih ditetapkan sebagai kawasan pertanian namun akan digunakan untuk peruntukan lain ditetapkan sebagai zona tunda (*holding zone*) meliputi kawasan pertanian/badan air (P/BA) di Kabupaten Semarang, dan kawasan pertanian/kawasan hutan produksi (P/KHP) di Kabupaten Cilacap;

- 4) Kawasan perikanan (IK) meliputi:
 - a) perikanan budidaya di darat berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal;
 - b) perikanan budidaya di laut di perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara; dan
 - c) perikanan tangkap di laut berada di perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kota Semarang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Wonogiri, perairan pesisir sekitar Kabupaten Purworejo, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kebumen, perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, dan perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan;
- 5) Kawasan pergaraman meliputi Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang;
- 6) Kawasan pertambangan dan energi meliputi wilayah pertambangan di darat dan kawasan panas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan di perairan pesisir meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Jepara, Kota Semarang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pemalang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang. Wilayah pertambangan di darat dibagi menjadi 12 wilayah pengelolaan pertambangan antara lain Kendeng Selatan, Kendeng Muria, Semarang-Demak, Ungaran-Telomoyo, Solo, Merapi, Serayu Selatan, Serayu Tengah, Slamet Tengah, Slamet Utara, Serayu Utara, Sewu Lawu. Kawasan panas bumi meliputi wilayah kerja panas bumi Dataran Tinggi Dieng, Candi Umbul Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturaden, dan Guci;
- 7) Kawasan peruntukan industri berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen,

Kabupaten Kendal, Kabupaten Kudus, Kabupaten Pati, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonogiri, dan Kota Semarang;

- 8) Kawasan pariwisata berada di Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Wonogiri, Kota Pekalongan, dan Kota Semarang. Pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah mempertimbangkan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) dan Kawasan Pariwisata Provinsi. KSPN di Jawa Tengah terdiri dari KSPN Borobudur dan sekitarnya; KSPN Dieng dan sekitarnya; KSPN Merapi–Merbabu dan sekitarnya; KSPN Karimunjawa dan sekitarnya; KSPN Sangiran dan sekitarnya; serta KSPN Karst Pacitan dan sekitarnya. Kawasan Pariwisata Provinsi terdiri dari Destinasi Pariwisata Baturaden dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Semarang–Karimunjawa dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Borobudur–Dieng dan sekitarnya; Destinasi Pariwisata Tegal–Pekalongan dan sekitarnya; serta Destinasi Pariwisata Rembang–Blora dan sekitarnya;
- 9) Kawasan permukiman berada di seluruh kabupaten/kota;
- 10) Kawasan pembuangan hasil pengerukan di laut meliputi perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Tegal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara; perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, dan perairan pesisir sekitar Kota Semarang;
- 11) Kawasan transportasi meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pati, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Rembang, Kota Semarang, Kota Tegal. perairan pesisir sekitar Kabupaten Cilacap, perairan pesisir sekitar Kabupaten Rembang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Pati, perairan pesisir sekitar Kabupaten Jepara, perairan pesisir sekitar Kabupaten Demak, perairan pesisir sekitar Kota Semarang, perairan pesisir sekitar Kabupaten Kendal, perairan pesisir sekitar Kabupaten Batang, perairan pesisir sekitar Kota Pekalongan, perairan pesisir sekitar Kota Tegal, dan perairan pesisir sekitar Kabupaten Brebes;
- 12) Kawasan pertahanan dan keamanan berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten Magelang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Semarang, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Temanggung, Kota Magelang, Kota Salatiga, dan Kota Semarang;
- 13) Kawasan pertahanan dan keamanan (HK) dalam bentuk aset wilayah pertahanan meliputi pangkalan militer atau kesatrian, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan

militer, daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya, daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya lainnya, obyek vital nasional yang bersifat strategis, dan/atau kepentingan pertahanan udara diatur lebih lanjut dalam rencana tata ruang kabupaten/kota.

3. Kawasan Strategis

Kawasan strategis merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh penting/strategis baik dari tingkat Nasional (Kawasan Strategis Nasional/KSN) maupun Provinsi (Kawasan Strategis Provinsi/KSP). Adapun kawasan strategis yang terdapat di Jawa Tengah antara lain:

a. Kawasan Strategis Nasional

KSN merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia. Adapun KSN yang terdapat di Jawa Tengah antara lain:

- 1) Sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa KSN Perkotaan Kedungsepur (Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Purwodadi);
- 2) Sudut kepentingan sosial dan budaya meliputi KSN Borobudur, KSN Candi Prambanan, dan KSN Sangiran;
- 3) Sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi KSN Pacangsanak (Pangandaran–Kalipucang–Segara Anakan–Nusakambangan), dan KSN Taman Nasional Gunung Merapi;
- 4) Sudut kepentingan pertahanan dan keamanan berupa KSN Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas;

b. Kawasan Strategis Nasional Tertentu

KSNT merupakan kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional. KSNT yang terdapat di Jawa Tengah yaitu KSNT pengendalian lingkungan hidup berupa daerah cadangan karbon biru meliputi KSNT Kepulauan Karimunjawa dan KSNT Pati, serta KSNT Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Nusakambangan;

c. Kawasan Strategis Provinsi

KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi, meliputi:

- 1) KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi:
 - a) KSP Industri Prioritas Provinsi bertujuan untuk mendorong pengembangan wilayah provinsi dan mengurangi kesenjangan antar daerah kabupaten/kota yang berada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Demak, Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Batang, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen. Arah pengembangan KSP Industri Prioritas Provinsi

- meliputi pengembangan kawasan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, pengembangan kegiatan industri yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal (hilirisasi), serta mendorong pertumbuhan ekonomi provinsi, dan mengurangi ketimpangan kabupaten/kota;
- b) KSP Agropolitan bertujuan untuk mendorong peningkatan pengelolaan pertanian hulu-hilir dan pertambahan nilai ekonomi komoditas pertanian yang berada di kawasan agropolitan Slamet, kawasan agropolitan Lawu, kawasan agropolitan Merapi-Merbabu, dan kawasan agropolitan Sumbing-Sindoro-Dieng. Arah pengembangan KSP Agropolitan meliputi penentuan komoditas unggulan masing-masing lokasi, peningkatan pengolahan hasil pertanian, peningkatan manajemen pengelolaan pertanian, dan pengembangan prasarana dan sarana antarkawasan produksi, pengolahan, dan pemasaran;
 - c) KSP Industri Maritim bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan potensi pesisir dan laut yang berada di kawasan industri perkapalan berada di Kabupaten Tegal, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang; serta kawasan sentra produksi perikanan berada di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kota Tegal, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Pati, dan Kabupaten Rembang. Arah pengembangan KSP Industri Maritim meliputi pengembangan industri perkapalan nelayan, peningkatan pengolahan hasil perikanan, peningkatan pemasaran perikanan, dan pengembangan prasarana dan sarana produksi perikanan, pengolahan, dan pemasaran;
- 2) KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup:
- a) KSP Dataran Tinggi Dieng bertujuan untuk mengendalikan pemanfaatan kegiatan budidaya yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan meningkatkan risiko bencana berada di Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Batang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Banjarnegara;
 - b) KSP Rawa Pening bertujuan untuk meningkatkan pelestarian dengan penekanan pada perlindungan Danau Rawa Pening berada di Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung;
 - c) KSP Taman Nasional Gunung Merbabu di Kabupaten Magelang, Kabupaten Semarang, dan Kabupaten Boyolali, yang seluruh KSP pada kawasan gunung bertujuan untuk menjaga tutupan vegetasi dalam rangka perlindungan ekosistem dan peningkatan konservasi air tanah;
 - d) KSP Gunung Sindoro–Sumbing berada di Kabupaten Magelang, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Wonosobo;
 - e) KSP Gunung Lawu berada di Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri;
 - f) KSP Gunung Slamet berada di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Purbalingga;
 - g) KSP Gunung Muria berada di Kabupaten Kudus, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati;

- h) KSP Gunung Ungaran berada di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Kendal;
 - i) KSP Ekosistem Esensial Mangrove bertujuan untuk menjaga ekosistem mangrove dalam rangka perlindungan habitat pesisir berada di Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Kebumen; dan
 - j) KSP Rawan Rob dan Penurunan Muka Tanah bertujuan untuk mengendalikan risiko rob dan penurunan muka tanah berada di Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Demak;
- 3) KSP Dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi:
- a) KSP pusat riset dan industri hilirisasi sumber daya alam bertujuan untuk peningkatan hasil industri petro kimia di Kabupaten Cilacap; peningkatan pengolahan dan produksi sumber daya geologi, sumber daya perkebunan dan peternakan di Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen; peningkatan pengolahan dan produksi perikanan, garam dan sumber daya mineral Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Pati;
 - b) KSP pusat pengembangan industri manufaktur berteknologi tinggi berada di Kabupaten Batang dan Kabupaten Brebes bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan iklim investasi dan kesempatan berusaha melalui keterpaduan pengembangan industri hulu dan hilir, dan mengembangkan destinasi investasi global untuk industri manufaktur;
 - c) KSP riset dan pengolahan air laut berada di Kabupaten Rembang yang bertujuan untuk membantu penyediaan air baku pada daerah yang rawan kekeringan dan peningkatan produksi garam;
 - d) KSP pusat riset energi baru dan terbarukan berada di Kabupaten Pemalang bertujuan untuk penyediaan energi alternatif yang ramah lingkungan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Permasalahan merupakan kesenjangan atau gap yang terjadi antara kinerja yang dicapai saat ini dengan rencana atau standar yang ada, serta apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang dengan kondisi riil yang terjadi saat ini. Gap yang terjadi dipengaruhi faktor penyebab, baik faktor yang mendorong keberhasilan maupun kegagalan, yang harus dilakukan analisis dalam rangka menyusun perencanaan selanjutnya.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan permasalahan pembangunan daerah makro yang sifatnya lintas sektor dan yang akan diintervensi melalui *cross cutting strategy*. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan berdasarkan hasil analisis gambaran umum daerah Jawa Tengah yang mencakup aspek geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, dan aspek pelayanan umum, serta berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja RPJPD Tahun 2005-2025. Permasalahan pembangunan daerah Jawa Tengah yang masih relevan dalam dua puluh tahun ke depan dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Aspek Geografi dan Demografi

Permasalahan pembangunan daerah pada aspek geografi yaitu **menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana**. Permasalahan ini ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 75,34 di bawah IKLH nasional yang sebesar 76,68.

Tuntutan kebutuhan akan sumber daya alam semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitasnya. Ketersediaan sumber daya alam yang terbatas, bahkan semakin menurun karena berbagai aktivitas pemanfaatan seiring dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan pembangunan multisektor. Kondisi ini mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di Jawa Tengah semakin menurun yang ditunjukkan dengan terlampauinya daya dukung daya tampung air.

Di sisi lain, beberapa tekanan lingkungan di Jawa Tengah antara lain seperti perubahan tata guna lahan yang menyebabkan degradasi keanekaragaman hayati, peningkatan produksi sampah, keterbatasan kapasitas pengelolaan sampah, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan antara lain masih rendahnya pengawasan dan pemantauan terhadap industri penghasil limbah, masih rendahnya sarana dan prasarana pengelolaan limbah, serta masih rendahnya edukasi masyarakat terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Dampak perubahan iklim juga semakin dirasakan di Jawa Tengah, terutama ditunjukkan dari semakin meningkatnya suhu udara dan anomali cuaca yang tidak dapat diprediksi. Perubahan iklim terjadi sebagai dampak dari meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) akibat aktivitas ekonomi dan penduduk yang belum diimbangi dengan upaya untuk menurunkan emisi GRK.

Permasalahan lain terkait kualitas lingkungan hidup adalah penurunan vegetasi tutupan hutan dan peningkatan luasan lahan kritis. Kondisi tersebut yang menyebabkan penurunan daya dukung DAS, ancaman terhadap keanekaragaman hayati yang disebabkan terganggunya/rusaknya habitat, peningkatan alih fungsi kawasan hutan untuk keperluan nonkehutanan, pemanfaatan hutan yang belum optimal (kayu, nonkayu, jasa lingkungan), ancaman kerusakan kawasan hutan (kebakaran hutan dan lahan, pencurian sumber daya hutan dan perambahan kawasan hutan), dan kurangnya kapasitas sumber daya manusia kehutanan. Wilayah pesisir dan laut di Jawa Tengah juga saat ini mengalami degradasi yang ditunjukkan antara lain kerusakan ekosistem mangrove, terjadinya abrasi, dan rob terutama pada wilayah pesisir di pantai utara Jawa Tengah.

Permasalahan sumber daya air tidak hanya terkait ketersediaan air, namun lebih luas permasalahannya adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air. Belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air disebabkan kurangnya sarana tampungan air baku dan rusaknya jaringan irigasi untuk pertanian. Sementara itu, terkait dengan permasalahan belum optimalnya pengendalian daya rusak air ditunjukkan dengan adanya kerusakan prasarana sarana sungai dan pengendali banjir.

Selain permasalahan sumber daya air permukaan sebagaimana digambarkan sebelumnya, di Jawa Tengah juga terjadi peningkatan pemanfaatan air tanah yang berpotensi mempercepat terjadinya amblesan tanah atau *land subsidence*. Amblesan tanah merupakan salah satu ancaman bencana yang terjadi dalam waktu yang relatif lama (*silent killer*) namun berdampak cukup luas yang umumnya terjadi di wilayah-wilayah perkotaan, industri, dan pemukiman padat seperti yang telah terjadi di Wilayah Pantura Jawa Tengah. Untuk itu pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah harus tetap dilaksanakan untuk menurunkan laju amblesan tanah utamanya pada wilayah cekungan air tanah (CAT) Zona Rusak.

Penurunan kualitas lahan juga terjadi di Jawa Tengah sebagai akibat belum optimalnya produktivitas pertambangan dan pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Potensi pertambangan di Jawa Tengah memiliki sebaran komoditas yang beragam dan cukup melimpah. Potensi mineral bukan logam dan batuan harus dipetakan dengan detail berdasarkan depositnya dan perlu mendasari aspek tata ruang karena rangkaian aktivitas pertambangan sering bersinggungan dengan lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan, antara lain, berkurangnya vegetasi hutan, tumbuhan, dan lapisan tanah. Perlu dorongan untuk melaksanakan pertambangan dengan baik (*good mining practice*) agar dapat mewujudkan keseimbangan antara nilai ekonomis dan nilai lingkungan.

Selain lingkungan hidup, kondisi geografi juga mempengaruhi kondisi kebencanaan. Gambaran kebencanaan ditunjukkan dari indikator Indeks Risiko Bencana (IRB) yang dari tahun ke tahun IRB Jawa Tengah terus membaik menjadi sebesar 109,01 pada tahun 2023. Kondisi geografi Jawa Tengah dengan kemiringan yang bervariasi, kondisi sesar dan patahan, kondisi kegunungapian, serta alur-alur sungai memberikan tantangan dalam penanggulangan bencana khususnya bencana yang terjadi sewaktu-waktu atau bencana yang memiliki waktu evakuasi singkat, seperti gerakan tanah dan banjir bandang. Jumlah dan

kepadatan penduduk menyebabkan wilayah konservasi (termasuk wilayah rawan bencana) digunakan sebagai wilayah budidaya sehingga potensi keterpaparan penduduk terhadap ancaman bencana semakin tinggi. Tata kelola kebencanaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana juga masih menjadi permasalahan yang perlu diselesaikan. Perencanaan penanggulangan bencana, sistem peringatan dini (*early warning system/EWS*), literasi masyarakat tentang kebencanaan, serta kapasitas lembaga baik pemerintah maupun nonpemerintah masih perlu ditingkatkan.

Permasalahan lainnya adalah terkait dengan ketahanan pangan yaitu **belum optimalnya** penjaminan akses dan keterjangkauan pangan dan gizi; pemenuhan hak dasar atas pangan secara berkelanjutan; pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi yang cukup, beragam, seimbang, dan aman; diversifikasi dan hilirisasi pangan lokal; sistem rantai pasok pangan; jaminan keamanan dan mutu pangan; riset, inovasi, dan teknologi pangan; pengendalian harga bahan pangan; serta peran serta masyarakat untuk penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan; serta pencegahan pemborosan pangan (*food waste*). Selain itu, terdapat kecenderungan penurunan daya dukung pangan yang akan mempengaruhi kecukupan ketersediaan dan keterjangkauan pangan di masa yang akan datang.

Sedangkan terkait dengan **kependudukan**, saat ini belum muncul permasalahan yang dapat mempengaruhi keberlangsungan pembangunan daerah. Saat ini, Jawa Tengah masih berada pada masa bonus demografi dimana mayoritas penduduk Jawa Tengah didominasi oleh Generasi Z, Generasi Milenial, dan Generasi X. Proporsi Generasi Z sebanyak 25,31 persen dari total populasi, Generasi Milenial sebanyak 24,93 persen dari total populasi, dan Generasi X sebanyak 22,53 persen dari total populasi Jawa Tengah. Seiring dengan membaiknya kualitas hidup masyarakat, usia harapan hidup masyarakat Jawa Tengah juga semakin meningkat yang berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penduduk lansia. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa Jawa Tengah ke depan harus mulai mempersiapkan diri untuk memasuki masa transisi menuju *ageing population*.

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah meliputi sebagai berikut.

1. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diindikasikan dengan angka kemiskinan. Cukup tingginya kemiskinan di Jawa Tengah masih menjadi permasalahan utama dalam pembangunan daerah. Kondisi ini ditunjukkan dari persentase penduduk miskin Jawa Tengah masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka nasional meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin Jawa Tengah pada periode Maret 2023 sebesar 10,77 persen, lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang sebesar 9,36 persen.

Di sisi lain, rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antarpenduduk miskin cukup besar. Kondisi ini menggambarkan bahwa bukan hanya jumlah absolut penduduk miskin yang menjadi permasalahan utama di Jawa Tengah, tetapi juga

ketimpangan pendapatan/pengeluaran penduduk miskin. Karakteristik penduduk miskin di Jawa Tengah sebagian besar, antara lain merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan sampai dengan SD/SLTP, penduduk yang tidak bekerja atau bekerja di sektor informal, pengeluaran penduduk lebih banyak untuk makanan, dan penghasilan utama bersumber dari sektor pertanian, serta kelompok penduduk yang masuk dalam kategori pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS).

Selain melihat karakteristik umum, kemiskinan merupakan masalah kompleks dan bersifat multidimensi, tidak hanya menggambarkan ketidakberdayaan ekonomi, tetapi juga dari permasalahan sumber daya manusia seperti rendahnya tingkat pendidikan dan derajat kesehatan penduduk miskin yang disebabkan belum optimalnya akses layanan pendidikan dan kesehatan. Selain itu, kondisi kemiskinan juga ditandai dengan permasalahan penyediaan rumah yang layak huni, layanan air minum dan sanitasi aman, serta masih adanya kawasan permukiman kumuh yang sebagian besar merupakan kawasan tempat tinggal penduduk miskin.

Di sisi lain, permasalahan infrastruktur dasar serta permasalahan aksesibilitas di daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang tinggi masih menjadi tantangan dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan kondisi geografis, setiap wilayah memiliki karakteristik yang ditentukan oleh letak geografis, kondisi topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, penggunaan lahan hingga tingkat kerawanan terhadap bencana. Kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap karakteristik potensi sumber daya alam yang menjadi salah satu modal dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

Peran program perlindungan sosial sebagai salah satu instrumen pengelolaan kesejahteraan masyarakat belum menunjukkan kinerja yang optimal. Tata kelola dan disharmoni kebijakan pusat dan daerah juga masih menjadi hambatan dalam implementasi. Program perlindungan sosial yang memiliki dua skema, yaitu jaminan sosial dan bantuan sosial masih diasosiasikan hanya untuk melindungi penduduk miskin, namun belum secara adaptif digunakan perlindungan terhadap dampak kejadian bencana dan perubahan iklim. Perlindungan sosial pada lingkungan yang belum inklusif masih belum optimal menjangkau kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas dan kelompok lansia. Program jaminan sosial masih dihadapkan pada permasalahan cakupan kepesertaan khususnya pada sektor informal, nilai klaim yang tidak sesuai dengan nilai keekonomian, serta kepatuhan pembayaran premi. Program bantuan sosial masih dihadapkan pada permasalahan cakupan dan kualitas pendataan yang antara lain disebabkan oleh kepemilikan identitas kependudukan, keterbatasan petugas pendataan dibandingkan sasaran, serta tata kelola data yang belum terintegrasi antarsektor.

Sementara itu, rendahnya konsumsi listrik per kapita di Jawa Tengah juga masih menjadi salah satu permasalahan. Konsumsi listrik per kapita Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 baru mencapai 757,35 kWh per kapita yang lebih rendah jika dibandingkan dengan provinsi lain. Tingkat konsumsi listrik ini erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Potensi konsumsi listrik Jawa Tengah masih harus terus didorong dan ditingkatkan, utamanya mendorong pemanfaatan listrik untuk kegiatan sektor produktif.

2. Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat

Membangun Jawa Tengah berbudaya adalah bagaimana membentuk karakter, wajah, cerminan, dan kearifan lokal Jawa sebagai warisan leluhur masyarakat Jawa yang adiluhung. Hal tersebut tercermin dengan etika luhur, berbudi luhur, moral luhur, dan norma luhur yang menjadi pola pikir dan ideologi setiap masyarakat Jawa Tengah, dan mewujud dalam perilaku masyarakat Jawa Tengah yang santun, memiliki tata krama tinggi, *tepo sliro*, *unggah unggah*, kerukunan, serta gotong royong, sehingga diharapkan akan memberikan dampak pada terciptanya lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, tenteram, dan tanpa konflik.

Dinamika modernisasi dan globalisasi yang terjadi saat ini, memiliki dua sisi implikasi kebudayaan masyarakat, implikasi positif dan negatif. Implikasi positif tentunya bukan menjadi masalah, namun berbagai implikasi negatifnya menjadi permasalahan yang berpengaruh terhadap ketahanan budaya dan masyarakat. Permasalahan yang dijumpai antara lain pergeseran karakter, pola pikir dan ideologi, budaya dan pranatanya. Hal tersebut terlihat dari antara lain perilaku masyarakat yang tidak sesuai etika, norma dan moral, hilangnya peminatan akan pelestarian kesenian tradisional, tradisi kehidupan masyarakat seperti gotong royong, musyawarah untuk mufakat, rasa saling tolong menolong yang berangsur menghilang, regenerasi budayawan dan seniman yang terhambat, apresiasi masyarakat terhadap budaya dan kesenian menurun, perhatian pemerintah yang kurang terhadap pelestarian budaya dan kesenian, pelaksanaan dan penegakan regulasi terkait pelestarian budaya dan seni belum optimal, serta tidak adanya sinergi pembudayaan Jawa antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Pergeseran karakter dan budaya akibat pengaruh budaya dari luar juga memberikan pengaruh pada perubahan kondisi lingkungan masyarakat salah satunya adalah potensi terjadinya intoleransi, radikalisasi dan ekstremisme yang mengarah pada aksi terorisme. Permasalahan tersebut terjadi juga tidak terlepas dari peran keluarga dan perempuan yang memegang peranan penting sebagai pendidik awal bagi anak dalam proses pembentukan sumber daya manusia yang memiliki karakter dan identitas budaya Jawa sejak usia dini. Kondisi ini dapat tercermin dari kinerja indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Jawa Tengah yang pada tahun 2022 sebesar 59,43. Meskipun lebih baik dari IPK nasional yang sebesar 55,13 pada tahun 2022, namun di beberapa dimensi IPK masih menunjukkan kinerja yang rendah yaitu dimensi budaya literasi, serta ekspresi budaya dan ekonomi budaya.

C. Aspek Daya Saing

Permasalahan berdasarkan aspek daya saing di Jawa Tengah meliputi sebagai berikut:

1. Daya saing dan produktivitas perekonomian daerah belum optimal

Perekonomian Jawa Tengah masih harus terus didorong untuk tetap tumbuh positif di tengah tantangan perekonomian global yang tidak pasti. Perekonomian Jawa Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, pertumbuhan sektor-sektor unggulan (pertanian dalam arti luas termasuk pangan, industri pengolahan, perdagangan, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pariwisata), kemudahan investasi, infrastruktur untuk mendukung konektivitas dan distribusi barang jasa,

serta wilayah yang kondusif. Tantangan ke depan adalah mewujudkan perekonomian daerah dengan produktivitas tinggi dengan tetap menerapkan ekonomi hijau. Selain itu, tantangan lainnya adalah bagaimana mewujudkan pertumbuhan yang inklusif dalam rangka menurunkan kesenjangan pendapatan antarmasyarakat dan antarwilayah. Kondisi tersebut adalah dalam upaya meningkatkan nilai PDRB per kapita Jawa Tengah yang sampai dengan tahun 2023 sebesar 45,20 juta rupiah, jauh dibawah PDRB per kapita nasional yang sebesar 74,96 juta rupiah.

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan perekonomian daerah masih dijumpai berbagai permasalahan yang perlu ditangani, terutama terkait dengan faktor-faktor yang memengaruhi perekonomian daerah. Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan

Permasalahan yang terjadi dalam upaya peningkatan pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan di Jawa Tengah sebagai berikut:

1) Sektor pertanian (dalam arti luas)

Pertanian adalah salah satu sektor unggulan Jawa Tengah yang mampu berkontribusi secara signifikan terhadap PDRB. Namun demikian, masih terdapat banyak permasalahan diantaranya **belum optimalnya** produksi dan produktivitas sektor pertanian, modernisasi pertanian, integrasi hulu-hilir termasuk sistem distribusi produk pertanian, pengelolaan pertanian secara mandiri dan keterjangkauan biaya produksi pertanian, pengembangan pertanian berbasis korporasi, serta kapasitas dan kompetensi pelaku usaha sektor pertanian. Selain itu permasalahan lain adalah masih tingginya alih fungsi lahan dan rendahnya regenerasi pelaku usaha sektor pertanian. Semua permasalahan tersebut perlu diselesaikan sebagai upaya menjadikan Jawa Tengah salah satu penumpu pangan nasional yang berkelanjutan dan memberikan dampak yang nyata pada kesejahteraan petani.

2) Sektor industri pengolahan

Sektor lain yang menjadi sektor unggulan Jawa Tengah adalah sektor industri pengolahan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang memengaruhi kinerja sektor industri pengolahan antara lain belum optimalnya produksi dan produktivitas industri, terutama industri kecil dan menengah, rendahnya nilai tambah produk industri, serta masih rendahnya kapasitas pelaku industri, terutama industri kecil dan menengah. Faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut antara lain **belum optimalnya** kapasitas industri kecil dan menengah untuk mampu memiliki nilai tambah tinggi, pengembangan industri, kapasitas industri berbahan baku lokal, integrasi rantai pasok antarindustri, kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan, serta digitalisasi industri pengolahan.

Kondisi tersebut juga dipengaruhi oleh **belum optimalnya** ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri, infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan, iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan, serta penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru.

3) Sektor perdagangan

Sektor perdagangan juga menjadi salah satu sektor yang berkontribusi cukup besar pada perekonomian daerah Jawa Tengah. Namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan dan tantangan yang dapat memengaruhi kontribusi sektor perdagangan ini, antara lain **belum optimalnya** ekspor unggulan daerah, pengurangan ketergantungan impor, standarisasi produk-produk unggulan daerah, pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi, kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan, iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, serta sistem distribusi produk perdagangan.

4) Sektor koperasi dan UMKM

Sektor lain yang menjadi unggulan perekonomian Jawa Tengah adalah usaha kecil dan menengah, serta koperasi. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kontribusi sektor koperasi dan usaha kecil menengah terhadap PDRB Jawa Tengah. Beberapa permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan koperasi serta usaha kecil dan menengah di Jawa Tengah, antara lain **belum optimalnya** kualitas produk unggulan UMKM, akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM, kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM, wirausaha baru, pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, serta kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi.

5) Sektor pariwisata

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor andalan Jawa Tengah dalam menyokong perekonomian daerah. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu sumber potensial untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, penyediaan lapangan pekerjaan, pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan menengah pendukung pariwisata. Namun, kontribusi sektor pariwisata pada pendapatan asli daerah dan pada PDRB belum optimal. Kondisi belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah maupun PDRB disebabkan beberapa permasalahan, antara lain, kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara masih belum optimal, dan masih rendahnya pengeluaran wisatawan. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain **belum optimalnya** promosi pariwisata, kondisi destinasi wisata termasuk kondisi sarana prasarana destinasi wisata, diversifikasi daya tarik pariwisata, infrastruktur konektivitas antardestinas wisata, integrasi antardestinas wisata, kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, serta kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata.

6) Sektor ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu menjadi kekuatan baru untuk peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah. Namun demikian saat ini perkembangan ekonomi kreatif di Jawa Tengah belum memperlihatkan hasil yang optimal. Beberapa faktor penyebabnya antara lain **belum optimalnya** kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa, pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif, sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif, infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan

terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, sistem regulasi ekonomi kreatif, apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, jejaring kabupaten/kota kreatif, desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan, serta standarisasi produk dan praktek usaha ekonomi kreatif.

b. Rendahnya daya saing tenaga kerja

Pembangunan ketenagakerjaan yang berdaya saing mencakup kualitas tenaga kerja yang unggul, tingkat produktivitas tenaga kerja yang tinggi, kesempatan kerja yang terbuka luas, hingga adanya perlindungan tenaga kerja. Beberapa faktor penyebab rendahnya daya saing tenaga kerja antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan, belum optimalnya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, yang disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, sistem perlindungan tenaga kerja, industri masih bersifat padat karya (belum padat modal/teknologi tinggi), iklim ketenagakerjaan termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, serta informasi pasar kerja.

c. Belum optimalnya riset dan inovasi

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Namun demikian, kondisi saat ini riset dan inovasi belum optimal dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Beberapa penyebabnya antara lain **belum optimalnya** peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor, tata kelola kelembagaan riset dan inovasi, pemanfaatan hasil riset dan inovasi di semua sektor, kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah, inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

d. Ketimpangan ekonomi antarwilayah

Ketimpangan ekonomi antarwilayah di Jawa Tengah masih terjadi. Hal ini terjadi antara lain disebabkan oleh faktor geografis dan demografis, belum meratanya penyebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, belum meratanya penyediaan prasarana dan sarana pendukung ekonomi, belum optimalnya konektivitas antarwilayah, dan belum optimalnya tingkat kemandirian desa. Permasalahan lainnya antara lain adalah tingkat produktivitas ekonomi antarwilayah perkotaan dan perdesaan yang masih belum merata yang disebabkan beberapa faktor antara lain terkait potensi daerah sebagai sektor unggulan daerah yang belum dioptimalkan, serta ketersediaan sumber daya manusia berkualitas yang tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

2. Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan mengingat peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak serta bagian dari proses dan tujuan pembangunan. Pembangunan sumber daya manusia Jawa Tengah selama ini dilakukan dengan menjamin tercukupinya

kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Namun demikian kualitas hidup sumber daya manusia Jawa Tengah masih belum optimal yang disebabkan karena belum optimalnya penyediaan layanan kebutuhan dasar masyarakat secara merata dan inklusif, terutama kualitas akses pendidikan, dan kesehatan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah pada tahun 2023 sebesar 73,39 yang masih di bawah angka IPM nasional yang sebesar 74,39. Meskipun demikian, jika dilihat dari indikator Indeks Modal Manusia (IMM) Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 0,55 lebih baik dibandingkan dengan nasional yang sebesar 0,54.

Kualitas pendidikan masyarakat ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah dan harapan sekolah yang capaiannya masih di bawah nasional. Rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah yang masih rendah tersebut diperkuat dengan masih dijumpainya anak tidak sekolah (ATS) yang mencapai 500.000 jiwa, tertinggi ketiga secara nasional. Sementara harapan lama sekolah yang masih di bawah nasional disebabkan masih belum optimalnya perluasan akses dan kualitas layanan pendidikan di Jawa Tengah, yang ditandai antara lain masih rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, adanya kesenjangan layanan pendidikan, serta masih kurangnya mutu pendidikan.

Permasalahan kesehatan mengalami perubahan pola ke arah semakin kompleks sebagai akibat adanya pengaruh perubahan lingkungan dan perilaku. Usia harapan hidup penduduk Jawa Tengah menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, namun belum diimbangi dengan peningkatan usia harapan sehat. Transisi demografi, perubahan gaya hidup, serta mobilitas antarwilayah memicu transisi epidemiologi yang mengarah pada peningkatan kasus tidak menular pada usia produktif (termasuk tren meningkatnya masalah kesehatan jiwa), serta masih adanya beban penyakit menular terabaikan dan penyakit menular baru serta *zoonosis*. Belum optimalnya deteksi dini, imunisasi, upaya kesehatan masyarakat dan penyelesaian faktor risiko mengakibatkan besarnya beban pembiayaan kesehatan untuk penyakit katastropik yang menurunkan kualitas hidup. Pada aspek gizi, beban ganda masalah kelebihan dan kekurangan gizi (*underweight, wasting, stunting, overweight*), pengetahuan dan perilaku pemenuhan kebutuhan gizi, serta ketahanan pangan pada level keluarga masih menjadi faktor determinan yang memengaruhi status gizi masyarakat. Dari sudut pandang akses dan kualitas, rendahnya komitmen kepemimpinan daerah, belum efisiennya pengelolaan fiskal dan pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif, serta belum optimalnya tata kelola kesehatan berdampak pada masih tingginya kesenjangan layanan kesehatan antarwilayah.

3. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah

Ketersediaan prasarana sarana menjadi satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, terutama dalam hal kelancaran distribusi barang dan jasa. Salah satu permasalahan yang masih dijumpai dalam penyediaan prasarana sarana adalah masih belum meratanya jaringan jalan di Jawa Tengah, belum optimalnya kualitas jalan utamanya jalan provinsi yang belum memenuhi standar

jalan kolektor dan masih terdapat ruas jalan yang kondisinya rusak. Selain itu masih terdapat titik rawan longsor di ruas-ruas jalan provinsi yang memerlukan antisipasi maupun penanganan darurat atau khusus saat terjadi bencana.

Kualitas pelayanan transportasi juga masih perlu ditingkatkan terutama dalam rangka peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan keselamatan dan kelancaran perjalanan transportasi, peningkatan kualitas layanan angkutan umum, dan peningkatan pelayanan di simpul transportasi serta integrasi antarmoda. Salah satu akar masalah sektor transportasi adalah pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah yang perlu dikendalikan. Hal lain yang masih perlu dikembangkan terkait peningkatan kelembagaan pengelolaan transportasi dan sistem logistik yang lebih efisien.

Permasalahan lainnya dalam penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah adalah belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air yang disebabkan masih kurangnya sarana tampungan air baku. Air baku selain dimanfaatkan untuk penyediaan air minum dan pertanian juga dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi utamanya kebutuhan industri dan kebutuhan kawasan prioritas (pengembangan pariwisata). Pemenuhan sarana prasarana yang mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat juga masih perlu didorong untuk ditingkatkan seperti pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta penyediaan sarana air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat.

4. Belum optimalnya kondusivitas wilayah

Kondusivitas wilayah menjadi salah satu tantangan yang harus dijaga dalam mendukung perwujudan daya saing daerah. Adanya kejadian konflik di Provinsi Jawa Tengah merupakan persoalan yang perlu menjadi perhatian khusus, karena hal tersebut sering kali menghambat proses pembangunan. Hingga saat ini kejadian konflik masih tergolong tinggi dan upaya dalam pencegahan konflik belum optimal.

D. Aspek Pelayanan Umum

Permasalahan berdasarkan aspek pelayanan umum di Jawa Tengah adalah **belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi**. Kondisi ini ditunjukkan dengan kinerja indikator Indeks Reformasi Birokrasi Jawa Tengah yang sampai tahun 2023 sebesar 83,13. Meskipun membaik dari tahun-tahun sebelumnya namun perubahannya tidak signifikan dan masih belum bisa menggambarkan dampak langsung terhadap capaian pembangunan daerah. Permasalahan dan tantangan yang muncul antara lain kelembagaan instansi publik dan proses bisnis yang masih terfragmentasi dan tidak efektif, efisien dan adaptif, lemahnya implementasi dan pemantauan regulasi, belum optimalnya transformasi digital pada aspek tata kelola pemerintahan, belum meratanya kualitas pelayanan publik termasuk pada bidang-bidang strategis, penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berintegritas, serta belum meratanya kualitas sumber daya aparatur. Permasalahan lainnya adalah pemerintah belum mengoptimalkan ruang kolaborasi dengan menjadi kolaborator bagi seluruh pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Hal lain yang masih perlu didorong adalah mewujudkan demokrasi substansial semakin baik ke depan. Demokrasi yang berkembang saat ini masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis pemilihan dan hubungan formal kelembagaan. Yang perlu didorong ke depan antara lain bagaimana memperkuat peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat, mengarusutamakan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, serta memperkuat integritas partai politik.

Untuk menggambarkan keterkaitan gambaran kondisi daerah pada bab sebelumnya dengan permasalahan pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Keterkaitan Gambaran Kondisi Daerah Dengan Permasalahan Pembangunan Daerah

Gambaran Kondisi Daerah	Permasalahan
Aspek Geografi dan Demografi	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dengan jumlah penduduk yang tinggi menghasilkan timbulan sampah yang tinggi dan Tingkat ketergantungan energi fosil yang masih tinggi, pemanfaatan kehati belum optimal, peningkatan lahan kritis, pengelolaan mineral dan batuan belum optimal ▪ 18 DAS prioritas yang perlu dipulihkan daya dukungnya ▪ Jawa Tengah merupakan daerah yang rawan bencana ▪ Dampak perubahan iklim dan emisi GRK cukup tinggi ▪ Daya dukung air sudah terlampaui 	<p>Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana</p>
Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah penduduk miskin masih tinggi, tingkat pengangguran terbuka juga masih cukup tinggi ▪ Perlindungan sosial belum optimal untuk melindungi seluruh kelompok sasaran ▪ Masih terjadi ketimpangan pendapatan masyarakat ▪ Pembangunan kebudayaan, dan pembangunan keluarga masih belum optimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat ▪ Terjadinya pergeseran karakter dan nilai-nilai budaya masyarakat
Aspek Daya Saing Daerah	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan nasional dan provinsi lain di Pulau Jawa ▪ Kontribusi sektor unggulan belum optimal ▪ Kapabilitas inovasi yang belum optimal ▪ Masih terjadi ketimpangan baik ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan ekonomi antarwilayah ▪ Akses dan mutu pendidikan masih kurang ▪ Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan didominasi tamatan SD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Belum optimalnya pertumbuhan dan kontribusi sektor-sektor unggulan ▪ Belum optimalnya kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia ▪ Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana pendukung perekonomian daerah ▪ Belum optimalnya kondusivitas wilayah

Gambaran Kondisi Daerah	Permasalahan
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tingkat produktivitas tenaga kerja belum optimal ▪ Masih terjadi konflik 	
Aspek Pelayanan Umum	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reformasi birokrasi perlu didorong lebih optimal dan menuju pada birokrasi yang berorientasi pada <i>outcome</i> ▪ Pelayanan publik dan kapasitas institusi yang belum optimal 	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi

3.2. ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis daerah Jawa Tengah diidentifikasi dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan daerah sebagaimana diuraikan sebelumnya. Selain itu berbagai isu strategis global, nasional, maupun daerah yang tertuang dalam berbagai dokumen kebijakan pembangunan, serta potensi yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah menjadi peluang sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan.

3.2.1. Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah Sebelumnya

Isu yang menjadi pertimbangan dalam penentuan isu strategis daerah Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan terkait dengan isu-isu yang ada dalam SDG's, isu nasional dalam RPJPN, isu-isu dalam KLHS, maupun isu RPJPD pada periode sebelumnya. Berbagai isu tersebut tergambar dalam tabel isu strategis global, nasional, dan daerah sebagai berikut.

Tabel 3.2.
Isu Strategis Global, Nasional, dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJPN)	Isu KLHS	Isu Daerah (RPJPD periode sebelumnya)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemiskinan 2. Pangan dan Gizi 3. Kesehatan 4. Pendidikan 5. Gender 6. Air bersih dan sanitasi 7. Energi 8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja 9. Infrastruktur 10. Kesenjangan Kota dan Permukiman 11. Produksi dan konsumsi berkelanjutan 12. Perubahan iklim 13. Sumberdaya kelautan 14. Ekosistem daratan 15. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan 16. Kemitraan global 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Isu ekonomi: rendahnya produktivitas, produktivitas tenaga kerja relatif tertinggal, pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip berkelanjutan, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas, belum optimalnya integrasi ekonomi domestik, rendahnya peran perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ancaman keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi masih relatif rendah 3. Ketimpangan Akses dalam Peningkatan Kualitas Hidup Sumber Daya Manusia 4. Belum optimalnya penuntasan kemiskinan dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosial budaya dan kehidupan beragama 2. Ekonomi 3. Iptek 4. Sarpras 5. Politik dan Tata Pemerintahan 6. Keamanan dan Ketertiban 7. Hukum dan Aparatur 8. Wilayah dan Tata Ruang 9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJPN)	Isu KLHS	Isu Daerah (RPJPD periode sebelumnya)
	<p>2. Isu sosial: kemiskinan menuju nol persen, akses dan kualitas belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial</p> <p>3. Isu tata kelola pemerintahan: pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel, memberikan pelayanan publik yang berkualitas</p> <p>4. Isu supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, diplomasi tangguh</p> <p>5. Isu ketahanan sosial budaya dan ekologi</p> <p>6. Ketimpangan antar wilayah Jawa dan luar Jawa masih tinggi</p> <p>7. Isu kesinambungan pembangunan: konsistensi perencanaan penganggaran, konsisten perencanaan pusat daerah, kapasitas pembiayaan terbatas</p>	<p>peningkatan kesejahteraan masyarakat secara inklusif</p> <p>5. Peningkatan intensitas bencana dan ancaman perubahan iklim</p> <p>6. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintah yang Akuntabel dan Berbasis Teknologi Informasi</p>	

3.2.2. Tantangan Pembangunan Daerah

Pembangunan daerah Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan dipengaruhi oleh berbagai macam tren perubahan global yang saat ini terjadi dan melanda global, nasional, dan regional. Perubahan global ini menjadi tantangan yang perlu diantisipasi karena berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat masif, yang dapat berdampak pada proses pembangunan daerah Jawa Tengah jangka panjang. Perubahan global ini yang disebut **Megatren**.

Megatren adalah suatu perubahan besar bahkan sangat besar dalam banyak aspek, bisa saja dalam masalah sosial, ekonomi, industri, politik, lingkungan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang lambat terbentuk, tetapi begitu terjadi akan memberikan pengaruh terhadap berbagai aktivitas, proses, dan persepsi, yang mungkin saja akan terjadi selama beberapa dekade. Megatren adalah kekuatan mendasar yang mendorong terjadinya perubahan besar pada ekosistem global dan kehidupan. Megatren juga merupakan rambu-rambu yang sangat berharga, berwawasan, dan memberikan peranan penting untuk masa depan. Megatren global yang akan dihadapi dalam dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

a. Demografi

Kondisi demografi Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan (sebagaimana proyeksi BPS) diperkirakan akan mengalami perlambatan pertumbuhan penduduk yang mengancam pada pasokan penduduk usia muda/produktif. Diperkirakan rasio ketergantungan Jawa Tengah pasca tahun 2030 di atas 50 yang mengindikasikan peluang bonus demografi akan berakhir. Di sisi lain perlambatan pertumbuhan penduduk juga akan menjadikan proporsi penduduk usia tua/*ageing population* menjadi meningkat seiring dengan meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH). Dengan kondisi ini maka Jawa Tengah perlu untuk mempercepat dalam memanfaatkan kondisi bonus demografi sekaligus mengantisipasi transisi demografi menuju penduduk tua dengan kebijakan pro lansia.

b. Pergeseran kekuatan ekonomi

Pertumbuhan penduduk menjadi parameter utama dari pergeseran kekuatan ekonomi, di mana negara-negara berkembang sekarang akan menjadi pasar pertumbuhan. Dalam kurun waktu kurang dari satu generasi, ekonomi negara berkembang telah beralih dari produsen barang untuk negara maju, menjadi tujuan penting bagi barang dan jasa konsumen. Munculnya prediksi bahwa Cina akan menjadi negara adikuasa global yang baru dan perubahan demografi global di Asia yang diperkirakan mencapai populasi lebih dari 5 miliar orang pada tahun 2050 tentunya akan menjadi salah satu poros utama pertumbuhan ekonomi dunia di masa depan.

c. Terobosan teknologi

Kemajuan teknologi dan inovasi digital yang sangat pesat terutama kecerdasan buatan (AI) dan pembelajaran mesin, bisa dibilang menjadi inti masalah dari semua megatren. Laju perubahan teknologi yang eksponensial (tidak lagi linier) cenderung memiliki implikasi luas yang telah mengganggu hampir semua industri. Orang dapat digantikan dengan mesin, robot dan AI dapat belajar lebih cepat daripada manusia. Fakta penting lainnya saat ini adalah data telah memposisikan dirinya sebagai komponen penggerak utama revolusi industri keempat yang hampir tidak pernah terbayangkan sebelum ini.

Tantangan lainnya adalah kemampuan daerah dalam memanfaatkan teknologi itu sendiri. Berdasarkan identifikasi Dewan TIK Nasional (Wantiknas) minimal terdapat 8 teknologi penting dalam menghadapi transformasi digital. Teknologi tersebut adalah *Artificial Intelligence*, *Internet Of Things (IoT)*, *3D Printing*, *Robotic*, *Blockchain*, *Drone*, *Virtual Reality*, dan *Augmented Reality*. Kehadiran teknologi tersebut disatu sisi akan memudahkan pencapaian pembangunan apabila kita

mampu memanfaatkan dengan baik tetapi bisa juga menjadi permasalahan pembangunan apabila kita tidak tepat dan bijak dalam pemanfaatannya.

d. Perubahan sosial

Perubahan demografi global (populasi dunia, kepadatan, etnis, tingkat pendidikan, dan aspek lain dari populasi manusia) akan membawa pergeseran tatanan dan perubahan sosial yang signifikan dan pastinya akan menjadi tantangan dan peluang untuk kehidupan dan masa depan yang lebih baik. Megatren ini mendasari terjadinya pergeseran struktural lainnya seperti perkembangan teknologi dan pergeseran kekuatan ekonomi. Sementara perubahan yang terjadi akan berbeda di setiap wilayah, perubahan tersebut akan memberikan dampak besar terhadap pasar, juga masyarakat lokal dan global. Perubahan struktur populasi global, dunia yang akan lebih banyak diisi oleh orang tua dan keluarga dengan jumlah anak yang lebih sedikit diprediksi akan menjadi tren di masa depan yang harus dihadapi.

e. Perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung

Salah satu dampak perubahan iklim adalah terjadinya fenomena pemanasan global dimana terjadi peningkatan gas rumah kaca pada lapisan atmosfer dan berlangsung untuk jangka waktu tertentu. Perubahan iklim disebabkan oleh berbagai faktor dan menimbulkan dampak bagi kehidupan manusia. Perubahan iklim berdampak terjadinya bencana seperti curah hujan yang tinggi, kenaikan muka air laut, dan cuaca ekstrem. Dampak lain adanya perubahan iklim antara lain:

- Terjadinya kenaikan permukaan air laut disebabkan oleh pemanasan global menyebabkan kerusakan tambak di daerah pesisir;
- Ekosistem laut, pesisir dan pantai memburuk;
- Peningkatan intensitas cuaca ekstrem, memanasnya cuaca yang menyebabkan terjadinya kekeringan berkepanjangan, kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, gagal panen, dan gelombang tinggi, serta meningkatnya penyakit Demam Berdarah *Dengue* (DBD) dan malaria;
- Pemanasan global mempengaruhi keanekaragaman hayati, perubahan distribusi, jumlah populasi, kepadatan populasi dan kebiasaan flora dan fauna.

Selain perubahan iklim, kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang. Krisis pangan, air dan energi berpotensi menjadi pemicu terjadinya konflik. Isu sumber daya strategis tersebut bisa menjadi sumber konflik baru dan mendorong terjadinya benturan kepentingan terutama jika gagal dalam pengelolaannya. Daya dukung sumber daya alam merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antara keduanya. Penentuan daya dukung sumber daya alam dilakukan melalui beberapa konsep pendekatan yang berkaitan dengan lahan pertanian, fungsi lindung, sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya energi, keanekaragaman hayati, dan sebagainya.

3.2.3. Isu Strategis Daerah

Dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka **isu strategis daerah Jawa Tengah** dua puluh tahun ke depan sebagai berikut.

1. Perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang belum optimal salah satunya disebabkan oleh tingkat produktivitas sektor-sektor ekonomi yang belum optimal, serta belum memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam sebagai sumber produksi ekonomi daerah. Oleh karena itu, isu ke depan adalah bagaimana mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan dengan melakukan transformasi ekonomi untuk memperkuat perekonomian daerah Jawa Tengah. Transformasi ekonomi dilakukan dengan mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah antara lain sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Transformasi ekonomi tersebut dilakukan dengan menerapkan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Ekonomi biru menjadi strategi yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang berwawasan lingkungan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian ekosistem. Transformasi ekonomi akan tercapai juga apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan ekonomi Jawa Tengah. Di samping itu, belum optimalnya pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah salah satunya juga disebabkan oleh belum optimalnya pembangunan desa dan perdesaan yang dapat dioptimalkan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur, pemberdayaan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin, pengembangan ekonomi desa, kualitas lingkungan dan pelayanan dasar, serta penguatan peran supra desa.

2. Ketahanan pangan yang berkelanjutan

Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi semua orang dan daerah/wilayah yang tercermin dari ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Ketersediaan pangan yang bersumber dari pertanian, peternakan, dan perikanan harus dapat memenuhi kebutuhan penduduk di suatu wilayah dalam jangka panjang dan lintas generasi. Ketersediaan pangan akan dapat dicapai dan dijamin keberlanjutannya jika pembangunan memperhatikan sarana prasarana pertanian, konversi lahan/alih fungsi lahan yang terkendali, peningkatan produktivitas, diversifikasi pangan, dan *up-skilling* SDM pertanian. Faktor penting lainnya adalah memastikan keterjangkauan pangan oleh

masyarakat yang dicerminkan oleh distribusi yang lancar dari produsen ke konsumen antarwaktu antarwilayah, stok pangan dan harga yang selalu terjaga. Selain itu perlu upaya yang lebih konkret bahwa pangan yang tersedia dan dapat dijangkau oleh setiap penduduk memiliki manfaat bagi tubuhnya. Hal ini dapat didukung dengan pola konsumsi yang seimbang dan beraneka ragam, kecukupan gizi, keamanan dan mutu pangan serta pengembangan pengolahan pangan lokal. Selain itu diperlukan pengembangan pertanian dalam arti luas sesuai dengan karakteristik dan potensi unggulan masing-masing daerah dalam provinsi yang terintegrasi dalam pengembangan kewilayahan di Jawa Tengah.

3. Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Isu strategis lainnya berkaitan dengan upaya memperkuat perekonomian daerah dan mendukung perwujudan kualitas hidup masyarakat adalah penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Pembangunan prasarana dan sarana menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah dalam hal kelancaran dan keselamatan perjalanan, distribusi barang dan jasa, serta dalam upaya meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Penyediaan prasarana transportasi dan fasilitas publik yang ramah bagi seluruh kelompok masyarakat khususnya kelompok rentan dan kelompok berkebutuhan khusus perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan pembangunan inklusif. Penataan prasarana transportasi dan fasilitas publik juga berkaitan dengan upaya membangun gaya hidup sehat masyarakat dengan menempatkan fasilitas publik pada jarak jangkauan yang sesuai untuk mendorong masyarakat bergerak aktif. Pembangunan prasarana dan sarana tetap berprinsip lebih ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan, mengurangi risiko kerusakan lingkungan, kerugian akibat bencana, serta berpedoman pada rencana tata ruang. Selain dari sisi penyediaan prasarana dan sarana, pertumbuhan jumlah kendaraan juga menjadi isu yang cukup penting untuk dikendalikan. Selain itu penyediaan prasarana dan sarana bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin adalah suatu kebutuhan yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu akses terhadap infrastruktur dasar yang memastikan bahwa masyarakat miskin memiliki akses yang memadai terhadap infrastruktur dasar seperti perumahan, air bersih, sanitasi layak, energi listrik, dan transportasi.

4. Keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana

Keberlanjutan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana menjadi salah satu isu strategis pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan. Isu ini berkaitan dengan isu kerusakan lingkungan hidup seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kerusakan pesisir, pemulihan daya dukung DAS, kawasan lindung/konservasi, perlindungan karst, pertambangan, yang penanganan dan pengelolaannya dinilai belum optimal. Isu lain yang terkait adalah isu tentang penanggulangan bencana terutama terkait dengan meningkatnya kejadian banjir, tanah longsor, dan kekeringan akibat perubahan iklim. Selain itu, isu tentang sampah dan limbah juga masih menjadi isu lingkungan yang penting dan terus berkembang seiring dengan pertambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah.

Keberlangsungan proses pembangunan dapat terwujud apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dimanfaatkan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung untuk peningkatan kualitas fungsi lingkungan sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya bencana alam. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Pengendalian kerusakan lingkungan serta kapasitas mitigasi struktural dan nonstruktural masih menjadi isu yang perlu diprioritaskan. Pengetahuan lokal dan kebiasaan perilaku masyarakat dalam pengelolaan kebencanaan juga menjadi modal sosial yang dapat dioptimalkan untuk mitigasi dan adaptasi.

5. Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia

Isu berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia yang semakin baik dengan menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat agar terwujud manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Perwujudan kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah dilakukan dengan mendorong akses pendidikan untuk seluruh lapisan masyarakat, kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial.

6. Kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat

Isu strategis daerah Jawa Tengah yang juga penting adalah kekuatan budaya sebagai karakter dan jati diri masyarakat. Membangun kekuatan budaya ini adalah dalam upaya mitigasi dan adaptasi dampak modernisasi dan globalisasi yang masif saat ini. Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting.

Pembangunan kualitas keluarga sebagai komunitas terkecil dalam masyarakat juga masih menjadi isu yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. Perubahan tren gaya hidup dan arus informasi yang semakin luas berpotensi memengaruhi pola hubungan dan struktur keluarga. Perilaku salah seperti kekerasan, perundungan, dan eksploitasi kelompok perempuan dan anak, ketidaksetaraan gender, serta pergeseran norma dan nilai dalam lingkungan keluarga masih menjadi isu yang dapat mengancam karakter dan jati diri masyarakat.

Untuk itu budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa. Selain itu, budaya yang kuat diharapkan akan mampu menangkal segala bentuk ancaman yang sifatnya tindak kriminal, ekstremisme, radikalisme, dan terorisme, sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

7. Tata kelola pemerintahan yang dinamis

Isu strategis yang tidak bisa diabaikan adalah isu transformasi tata kelola pemerintahan dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dengan tetap taat pada asas yang berlaku dan mekanisme koreksi antaraktor dapat dioptimalkan (kolaboratif). Hal tersebut perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi dan sumber daya aparatur yang semakin berintegritas, serta adanya proses untuk mencapai pembangunan demokrasi yang lebih substansif guna peningkatan kualitas kebijakan publik. Transformasi tata kelola pemerintahan akan menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi di Jawa Tengah dalam pembangunan dua puluh tahun ke depan.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1. LOGFRAME PEMBANGUNAN JAWA TENGAH 2025-2045

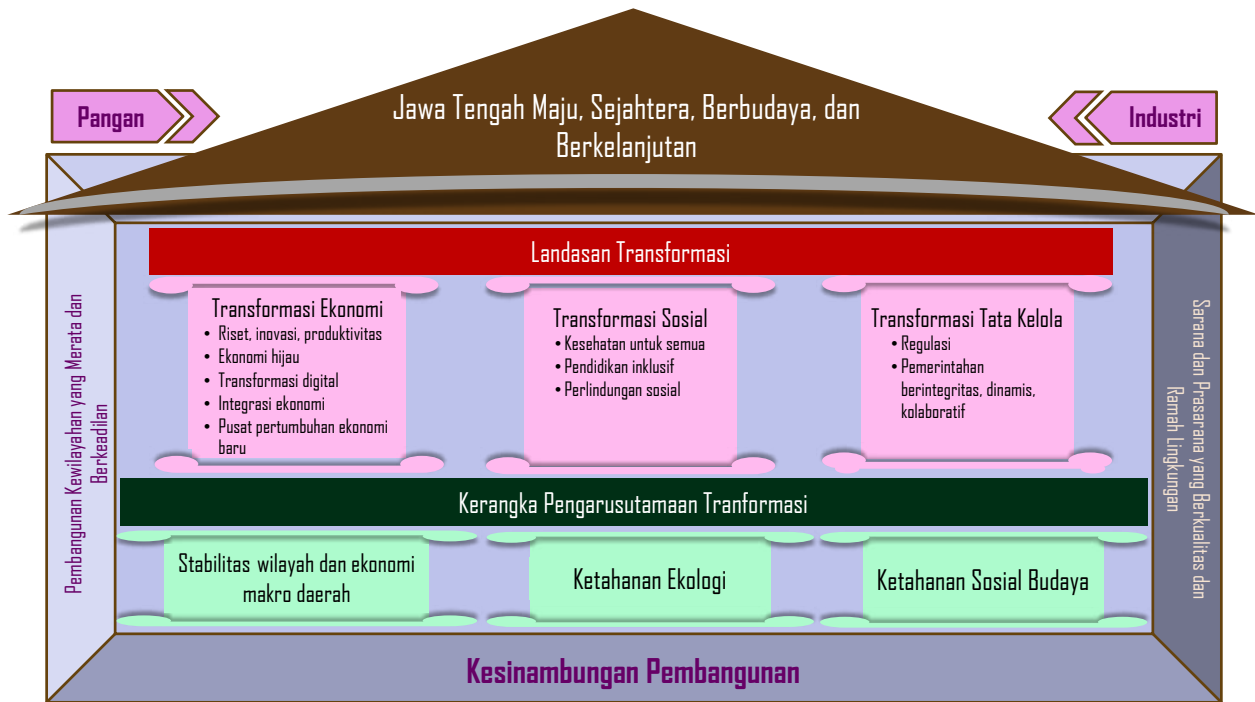
Pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan tahapan pembangunan jangka panjang daerah tahun 2005-2025, dimana visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2005-2025 sebagaimana tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah Jawa Tengah Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Lestari. Rencana pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan juga dalam upaya menjawab isu strategis daerah jangka panjang meliputi perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana, kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang dinamis.

Pembangunan Jawa Tengah 2025-2045 juga adalah dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita besar Bangsa Indonesia dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan Indonesia tahun 2045 yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Guna mendukung cita-cita besar menjadi Indonesia Emas 2045, Jawa Tengah turut andil menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu kebijakan pembangunan nasional untuk didukung oleh Jawa Tengah adalah menempatkan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan rantai nilai industri nasional dalam dua puluh tahun ke depan.

Pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan juga adalah dalam rangka menghadapi dinamika global dan nasional yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya. Dinamika tersebut terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoeкономи. Hal tersebut menuntut respon mitigasi dan adaptasi yang cepat dengan segala potensi yang dimiliki. Respon terhadap dinamika yang serba cepat ini diperlukan percepatan pembangunan dengan pendekatan transformasi dalam setiap aspek pembangunan. Transformasi untuk merespon dinamika harus juga diseimbangkan dengan ketahanan sumber daya alam dan budaya agar tetap tangguh dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang.

Dengan landasan berpikir tersebut, serta mempertimbangkan berbagai pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu strategis daerah, dan tantangan global, ditetapkan pembangunan daerah Jawa Tengah 2025-2045 diarahkan pada cita-cita Jawa Tengah maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan arah pembangunan nasional untuk Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan rantai nilai industri nasional. Kerangka berpikir tersebut

dapat digambarkan dalam *logframe* pembangunan Jawa Tengah 2025-2045 sebagai berikut.



Gambar 4.1.

***Logframe* Pembangunan Jawa Tengah 2025-2045**

Logframe pembangunan Jawa Tengah tersebut menggambarkan bahwa cita-cita Jawa Tengah 2045 adalah Jawa Tengah maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan, dan mampu menjadi penumpu pangan dan industri secara nasional. Perwujudan cita-cita pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun kedepan ini dilakukan dengan landasan transformasi agar lebih dapat mencapai pembangunan yang kompetitif yang didorong oleh produktivitas tinggi secara merata dan berkelanjutan. Upaya transformasi difokuskan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagai landasannya.

Upaya transformasi dapat terwujud dan dijalankan dengan optimal apabila ditopang dengan kondisi stabilnya wilayah dan ekonomi makro daerah. Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat yang terbangun sejak dini dan dari keluarga diharapkan akan mampu membentuk masyarakat yang berketahanan sosial dan budaya, sehingga memiliki kemampuan turut membangun Jawa Tengah mewujudkan cita-cita sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Jawa Tengah. Selanjutnya hal pokok lainnya sebagai salah satu kerangka pengarusutamaan dalam upaya mendukung transformasi adalah ketahanan ekologi. Berjalannya kehidupan dan pembangunan bersumber pada ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik, serta yang tahan terhadap risiko bencana. Ketiga hal tersebut menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi yang akan mendukung perwujudan upaya transformasi di Jawa Tengah.

Perwujudan cita-cita Jawa Tengah maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan dilaksanakan dalam kerangka implementasi berupa pembangunan kewilayahan yang merata, didukung sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Upaya perwujudan cita-cita tersebut dapat tercapai apabila didukung dengan upaya menjaga kesinambungan pembangunan agar seluruh tahapan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.

4.2. VISI DAERAH

Berdasarkan kerangka berpikir pembangunan jangka panjang yang tergambar dalam *logframe* tersebut dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu strategis daerah, dan tantangan global, ditetapkan **Visi Daerah Jawa Tengah Tahun 2025-2045** yaitu:

“JAWA TENGAH SEBAGAI PENUMPU PANGAN DAN INDUSTRI NASIONAL YANG MAJU, SEJAHTERA, BERBUDAYA, DAN BERKELANJUTAN”



Gambar 4.2.

Visi Pembangunan Jawa Tengah 2025-2045

Penjabaran visi pembangunan Jawa Tengah 2025-2045 sebagai berikut:

PENUMPU PANGAN DAN INDUSTRI NASIONAL

Jawa Tengah dengan faktor iklim, geologis dan letak geografis yang strategis memiliki potensi pertanian dalam arti luas, dan selama ini telah menunjukkan potensi sebagai salah satu lumbung pangan di Indonesia. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan di Jawa Tengah mampu memberikan kontribusi PDRB sektor pertanian peringkat tiga besar di Indonesia. Dengan potensi yang dimiliki, Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan memiliki kemampuan untuk tetap menjadi penumpu pangan nasional dengan didukung oleh modernisasi pertanian yang berdasarkan riset, teknologi, pengembangan inovasi, SDM dan kelembagaan pertanian yang semakin meningkat kapasitasnya, serta pengendalian alih fungsi lahan.

Di sisi lain sejalan dengan transformasi ekonomi, pembangunan industri dalam dua puluh tahun ke depan fokus pada peningkatan nilai tambah secara signifikan sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penurunan angka pengangguran dan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan antarwilayah. Hilirisasi menjadi faktor kunci karena mampu memberikan peningkatan nilai tambah komoditas, memperkuat nilai ekspor, menciptakan perluasan penyediaan lapangan pekerjaan, serta *multiplier effect* yang lain. Keberadaan kawasan strategis

industri di sepanjang pantura menjadikan posisi Jawa Tengah menjadi sangat penting dalam rantai nilai industri Nasional.

MAJU

Jawa Tengah Maju merupakan bentuk upaya menjawab tantangan nasional sebagai kontributor perekonomian nasional untuk mencapai posisi nomor lima terbesar di dunia, serta menjawab isu strategis daerah yaitu perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia. Jawa Tengah Maju akan menjadi Jawa Tengah yang memiliki perekonomian berdaya saing tinggi berbasis riset, modern dengan tingkat peradaban tinggi dalam penguasaan teknologi, serta inovatif, mandiri dengan tidak ketergantungan, tangguh, didukung dengan wilayah yang kondusif.

Daya Saing: Perekonomian Jawa Tengah tahun 2045 mampu tumbuh bersaing dengan daerah lain terutama di wilayah Pulau Jawa, dan mampu berkontribusi tinggi pada perekonomian nasional. Jawa Tengah berdaya saing diwujudkan dengan pengembangan potensi sektor-sektor unggulan daerah, ekonomi kreatif, dan hilirisasi berbasis riset dan teknologi, dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup menuju pada perwujudan ekonomi hijau dan ekonomi biru. Tumbuhnya perekonomian juga didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang mampu bersaing dengan sumber daya manusia daerah lainnya. Daya saing perekonomian daerah juga akan meningkat didukung dengan peningkatan kualitas, kapasitas dan pemerataan infrastruktur, keterpaduan dan integrasi antarmoda transportasi, pelayanan transportasi yang andal, nyaman, selamat, terjangkau dan berkelanjutan guna meningkatkan kelancaran perjalanan orang, distribusi barang dan jasa, mengurangi ketimpangan antarwilayah serta mendukung perwujudan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Modern: Jawa Tengah maju modern dengan masyarakat dalam tingkat peradaban tinggi dengan kemampuan pemanfaatan teknologi dan layanan terkini untuk memenuhi kebutuhannya. Infrastruktur juga didukung dengan teknologi yang modern yang memungkinkan masyarakat Jawa Tengah terhubung dengan global.

Inovatif: Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk memperkuat perekonomian daerah adalah sumber daya manusia yang berilmu pengetahuan dan mampu memanfaatkan teknologi terkini, yang mampu menciptakan inovasi produk dan layanan di berbagai sektor agar mampu berdaya saing tinggi di pasar global maupun nasional. Kemampuan inovatif ini juga menjadi penting dalam menghadapi segala persoalan dan tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan global dan nasional.

Mandiri: Jawa Tengah mandiri digambarkan dengan kemampuan membangun berdasarkan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki agar terhindar dari jebakan ketergantungan dengan pihak eksternal. Jawa Tengah mandiri juga dilakukan dengan mengeksplorasi seluruh potensi ekonomi, politik, sosial, dan budaya untuk meningkatkan kekuatan sendiri, dengan tidak mengingkari realitas globalisasi atau mengisolasi diri dan menutup peluang kerja sama dengan berbagai pihak. dan dilakukan dengan kerja sama para pihak, dalam dan luar negeri. Kemandirian

daerah salah satunya dengan kemandirian dalam penyediaan pangan, energi, dan produk-produk ekonomi lainnya.

Tangguh: Jawa Tengah yang maju juga digambarkan sebagai Jawa Tengah yang tangguh, mampu menghadapi tantangan dan krisis dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun budaya.

Aman: Rasa aman juga dibutuhkan dalam menciptakan kondisi Jawa Tengah yang maju. Perekonomian akan semakin meningkat dengan salah satu persyaratan adanya kondisi lingkungan yang kondusif. Rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat sebagai implikasi dari lingkungan yang kondusif akan mampu mendorong masyarakat lebih berkembang, produktif, dan mampu berkontribusi pada pembangunan daerah.

SEJAHTERA

Jawa Tengah Sejahtera digambarkan sebagai kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga didukung dengan tersedianya prasarana sarana seperti perumahan, air bersih, prasarana sarana pelayanan publik, transportasi, dan teknologi, serta akses terhadap lingkungan hidup berkualitas dan sumber daya alam. Jawa Tengah Sejahtera juga dapat memberikan jaminan pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun nonfisik, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, akses terhadap informasi, serta hubungan antarmasyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, dan *tepo seliro*.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bersifat dinamis, dari waktu ke waktu akan mengalami perubahan sesuai dengan aspirasi dan tuntutan yang berkembang di masyarakat. Untuk itu pemenuhannya baik secara fisik dan nonfisik harus dilakukan secara terus menerus mengikuti dinamika perubahan, serta dibuka ruang yang seluas-luasnya untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera secara berkesinambungan.

BERBUDAYA

Cita-cita menjadikan Jawa Tengah maju di tengah globalisasi dan modernisasi yang saat ini terjadi baik dari aspek teknologi maupun komunikasi berimplikasi terhadap lunturnya nilai-nilai luhur suatu bangsa dan berdampak pada perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Untuk itu, Jawa Tengah berbudaya menjadi salah satu cita-cita pembangunan Jawa Tengah 2045 dengan mengedepankan peran dan fungsi agama secara mendalam dan inklusif dalam upaya mewujudkan Jawa Tengah yang berbudaya melalui aktualisasi nilai-nilai agama dalam kehidupan budaya masyarakat. Masyarakat Jawa Tengah yang berbudaya yang ingin diwujudkan adalah dengan membangun identitas Jawa Tengah dalam karakter, wajah, cerminan, dan kearifan lokal Jawa sebagai warisan leluhur masyarakat Jawa yang adiluhung berupa etika luhur, berbudi luhur, moral luhur, norma luhur ke dalam pola pikir dan ideologi masyarakat. Jawa Tengah berbudaya mewujudkan dalam perilaku masyarakat yang santun, memiliki tata krama tinggi, *tepo seliro*, unggah ungguh, dan kerukunan antarkelompok masyarakat.

Esensi dari konsep berbudaya adalah adanya perasaan seorang individu sebagai bagian integral dari kebudayaan miliknya serta kemampuan kebudayaan mendefinisikan dirinya sendiri sebagai sebuah sistem yang berbeda dengan kebudayaan yang lain. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat dua hal penting yang secara bersama-sama berperan bagi hadirnya identitas kebudayaan. *Pertama*, kemampuan masyarakat mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian kebudayaan. Hal ini dapat dilihat dari pola pikir, pola rasa dan tindakan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan dirinya sebagai bagian dari kebudayaan tertentu. *Kedua*, kemampuan suatu kebudayaan sebagai suatu obyek sekaligus subyek yang dinamis di tengah pergulatan interaksi kebudayaan. Hal terakhir ini dapat dilihat dari karakter, kekhasan dan atau ciri khusus di dalam aspek-aspek tertentu dari suatu kebudayaan yang dapat dijadikan sebagai pembeda dengan ragam kebudayaan lain. Kedua hal tersebut secara bersama-sama menunjukkan karakteristik umum dan gagasan-gagasan yang dengan jelas menjadi penanda bagi munculnya identitas. Dari pemikiran tersebut dilihat dengan jelas bahwa apabila akan meneguhkan diri dengan identitas kebudayaan, maka mau tidak mau masyarakat harus mengaktualisasikan karakteristik umum bangsa Jawa dengan segenap nilai dan perwujudannya.

Jawa Tengah berbudaya juga akan terintegrasi dalam pembangunan manusia yang utuh dan berkarakter yang melibatkan individu, keluarga, masyarakat dalam semua sektor, baik sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. Jawa Tengah yang berbudaya ini juga akan menjadi kendali akan kemajuan dan modernisasi yang tanpa batas pada semua sektor.

BERKELANJUTAN

Dengan semakin menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan saat ini, sedangkan di sisi lain tuntutan pembangunan ekonomi semakin meningkat, maka menjadi penting untuk membangun daerah Jawa Tengah dengan terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pembangunan yang berkelanjutan adalah pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang layak bagi kehidupan, dengan memperhatikan prinsip bahwa apa yang saat ini dinikmati oleh generasi sekarang akan dapat juga dinikmati oleh generasi yang akan datang, memperhatikan kearifan lokal, serta mempertimbangkan efek domino kerusakan lingkungan yang akan terjadi, serta meningkatnya dampak perubahan iklim. Jawa Tengah yang berkelanjutan akan menciptakan kualitas hidup masyarakat yang semakin baik, mendapatkan lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman yang layak dan nyaman, bebas pencemaran air, udara, sampah, serta kondisi hutan dan lahan, sumber daya air baik air permukaan, air tanah, serta pesisir laut yang semakin terjaga dengan baik. Selain itu, Jawa Tengah berkelanjutan juga mempertimbangkan risiko bencana dalam setiap proses pembangunan mengingat Jawa Tengah memiliki potensi dan keterpaparan jenis bencana alam yang beragam.

SASARAN VISI

Pencapaian Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi sebagai berikut.

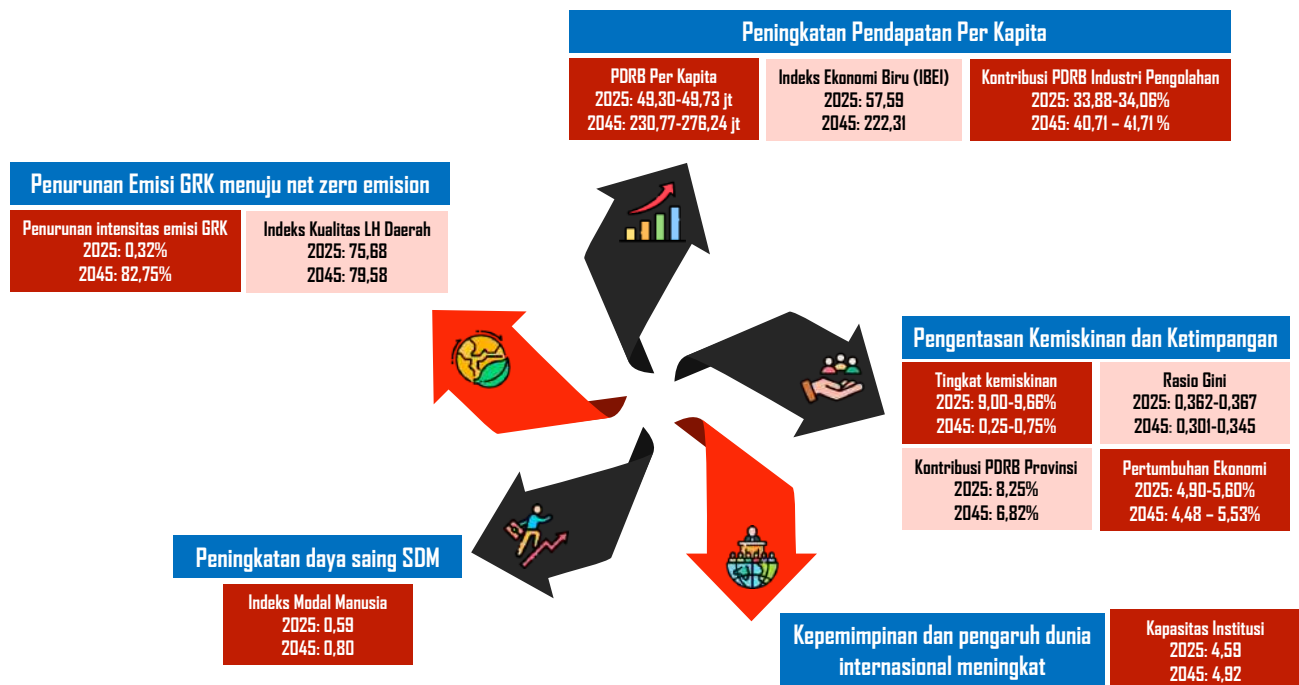
Sasaran pertama, peningkatan pendapatan per kapita, mendukung pencapaian sasaran visi nasional dalam meningkatkan pendapatan per kapita setara negara maju. Peningkatan pendapatan per kapita Jawa Tengah ditunjukkan dengan PDRB per kapita mencapai sekitar 230,77-276,24 juta rupiah pada tahun 2045. Upaya peningkatan pendapatan per kapita terutama didorong oleh peningkatan pembangunan sektor industri, perikanan dan kelautan. Pembangunan sektor tersebut ditunjukkan dengan pencapaian indikator kontribusi PDRB industri pengolahan sebesar 40,71-41,71 persen, dan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) sebesar 222,31 pada tahun 2045.

Sasaran kedua, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, mendukung pencapaian sasaran visi nasional yaitu kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang. Sejalan dengan meningkatnya pendapatan per kapita, maka diharapkan kemiskinan dan ketimpangan akan semakin menurun. Sasaran ini ditunjukkan dengan indikator tingkat kemiskinan yang semakin menurun pada kisaran 0,25-0,75 persen, rasio gini yang semakin rendah berkisar antara 0,301-0,345, meningkatnya kontribusi PDRB provinsi menjadi sebesar 6,82 persen pada tahun 2045, dan pertumbuhan ekonomi menjadi sebesar 4,48-5,53 persen pada tahun 2045.

Sasaran ketiga, kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, selaras dengan sasaran visi nasional, dan sejalan dengan hasil kinerja pembangunan Jawa Tengah yang juga semakin meningkat. Sasaran tersebut diukur dengan indikator kapasitas institusi menjadi sebesar 4,92 pada tahun 2045.

Sasaran keempat, peningkatan daya saing sumber daya manusia, mendukung pencapaian sasaran nasional yaitu daya saing sumber daya manusia yang meningkat. Sasaran ini didukung dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan, sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi, inovasi dan kreativitas serta kesehatan. Sasaran tersebut diukur dengan Indeks Modal Manusia menjadi sebesar 0,80 pada tahun 2045.

Sasaran kelima, penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju *net zero emission*, mendukung sasaran visi pembangunan nasional yaitu intensitas emisi GRK menuju *net zero emission*. Sasaran kelima ini merupakan gambaran komitmen Jawa Tengah untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau. Sasaran ini diukur dengan indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menjadi sebesar 82,75 persen pada tahun 2045 dalam rangka mendukung pencapaian *net zero emission* pada tahun 2060, serta indeks kualitas lingkungan hidup daerah menjadi sebesar 79,58 pada tahun 2045.



Gambar 4.3.
Sasaran Visi Pembangunan Jawa Tengah 2025-2045

Tabel 4.1.
Sasaran Visi, Indikator dan Target Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan	Peningkatan pendapatan per kapita	PDRB per Kapita	Rp. Juta	49,30-49,73	63,71-68,86	101,22-106,30	157,13-162,19	230,77-276,24
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Angka	57,59	74,41	103,45	145,95	222,31
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	33,88-34,06	35,42 - 36,42	39,89 - 40,89	43,10 - 44,10	40,71-41,71
	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	%	9,00-9,66	7,25-7,90	5,06-5,71	2,88-3,53	0,25-0,75
		Rasio Gini	Angka	0,362-0,367	0,351-0,362	0,336-0,358	0,321-0,353	0,301-0,345
		Kontribusi PDRB Provinsi	%	8,25	4,92	5,00	5,60	6,82
		Pertumbuhan Ekonomi	%	4,90-5,60	5,00-5,70	5,20-6,10	5,40-6,30	4,48 - 5,53
	Kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat	Kapasitas Institusi	Angka	4,59	4,7	4,79	4,87	4,92
	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	Angka	0,59	0,60	0,62	0,67	0,80

Visi	Sasaran Visi	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025- 2029	2030- 2034	2035- 2039	2040- 2045
	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK	%	0,32	27,57	58,38	72,81	82,75
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	75,68	75,87	76,11	76,36	79,58

4.3. MISI DAERAH

Visi pembangunan Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan pada tahun 2045 akan dapat terwujud melalui 8 (delapan) misi pembangunan daerah.



Gambar 4.1.
Misi Pembangunan Jawa Tengah 2025-2045

Delapan misi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Misi 1. Transformasi Sosial

Transformasi sosial diperlukan dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin sehingga tercapai manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Transformasi sosial dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif, terutama penyediaan akses pendidikan yang semakin inklusif, kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial yang adaptif. Dengan transformasi sosial, pemerintah daerah menjamin bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki hak yang sama dan inklusif dalam mendapatkan pelayanan dasar tanpa memandang latar belakang, identitas, dan status.

Misi 2. Transformasi Ekonomi

Transformasi ekonomi Jawa Tengah 2045 ditunjukkan dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, terutama dengan menggerakkan sektor-sektor unggulan daerah. Transformasi ekonomi juga dilakukan dengan menggerakkan sumber daya manusia di tengah tantangan meningkatnya jumlah penduduk usia produktif agar menjadi bonus/deviden demografi yang perlu prasyarat investasi yaitu dengan memasukan ilmu, pengetahuan dan vokasi/keterampilan ke dalam sumber daya pikir agar lebih kreatif, produktif dan inovatif sehingga mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global. Sektor unggulan daerah Jawa Tengah yang sampai saat ini memberikan kontribusi cukup besar pada perekonomian Jawa Tengah yaitu sektor pertanian (dalam arti luas), sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, dan sektor pariwisata. Peningkatan produktivitas sektor-sektor tersebut didorong melalui hilirisasi didukung digitalisasi ekonomi berbasis riset dan inovasi.

Selain itu juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Transformasi ekonomi tersebut diarahkan dengan menerapkan ekonomi hijau yaitu model pembangunan ekonomi yang menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi dan akumulasi modal yang lebih hijau (*green investment*), infrastruktur hijau, dan pekerjaan yang ramah lingkungan (*green jobs*) untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan. Selain itu, transformasi ekonomi juga dilakukan melalui transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, penguatan ekonomi dan keuangan syariah, serta pembedayaan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat miskin.

Misi 3. Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata kelola menjadi penting dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola pemerintahan ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, senantiasa bergerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih *agile*) dengan tetap menjaga integritas semakin kuat. Birokrasi yang dinamis tercermin dari pelayanan publik yang semakin berkualitas, manajemen organisasi dan proses bisnis yang semakin adaptif dan berorientasi pada hasil, kelembagaan yang efektif, digitalisasi tata kelola pemerintahan, manajemen sumber daya aparatur yang efektif dan efisien, regulasi, pengawasan yang independen dan berintegritas, pengembangan budaya kerja, pola pikir birokrasi, serta komitmen. Birokrasi kolaboratif juga menjadi hal penting untuk diwujudkan dalam konteks membangun tata kelola pemerintahan yang dinamis. Hal tersebut didasari karena adanya dependensi antardaerah yang pada akhirnya akan semakin besar. Tidak hanya kolaborasi antardaerah, kolaborasi dengan pemangku

kepentingan lainnya pun perlu semakin diperkuat agar tujuan pembangunan daerah dapat dicapai.

Misi 4. Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Upaya perwujudan visi pembangunan daerah jangka panjang melalui transformasi akan dapat berjalan semakin optimal dengan didukung kondisi keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilnya ekonomi makro daerah. Keamanan daerah yang tangguh akan menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, rasa aman dan nyaman, serta wilayah yang kondusif bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah. Selanjutnya, perwujudan demokrasi substansial akan mampu menghasilkan pemerintahan yang semakin efektif dan responsif. Sedangkan stabilnya kondisi ekonomi makro daerah akan mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat dan usaha kecil menengah dalam mengakses layanan keuangan, mendorong pertumbuhan inklusif dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan terciptanya kondisi tersebut, diharapkan akan mendukung implementasi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, menarik investasi, menciptakan pekerjaan yang layak, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif.

Misi 5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Modernisasi dan globalisasi memiliki dua sisi implikasi terhadap kehidupan masyarakat. Di satu sisi, kehidupan modern dan maju perlu direspon agar tidak terjadi ketertinggalan. Di sisi lain, modernisasi dan globalisasi juga memberikan implikasi negatif pada pola pikir dan perilaku masyarakat yang kehilangan identitas dan jati dirinya, sehingga muncul karakter baru yang tidak sejalan dengan budaya asli Jawa Tengah, mengabaikan aspek moral, serta menganggap bahwa nilai spiritual menjadi tidak penting. Untuk itu ketahanan budaya menjadi hal penting untuk kemudian akan mampu mengembalikan karakter masyarakat Jawa Tengah pada identitas dan jati diri yang sesuai dengan budaya luhur Jawa.

Salah satu yang menjadi penting dalam konteks membangun ketahanan budaya adalah dengan menempatkan peran dan fungsi agama secara kuat di masyarakat. Dengan menganut agama secara mendalam dan inklusif maka masyarakat diharapkan akan mampu melihat perubahan dan kemajuan yang terjadi di dunia secara jernih sekaligus dapat membentengi diri dari terjangan budaya asing yang banyak tidak sesuai dengan karakter dan budaya Jawa.

Selain itu, membangun ketahanan budaya setidaknya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh masyarakat. *Pertama*, kemampuan memelihara sistem nilai budaya Jawa yang dianut karena budaya adalah endapan dari perilaku manusia. Budaya masyarakat itu sendiri dapat berubah karena terjadi transformasi nilai dari masyarakat terdahulu ke masyarakat saat ini dan kemudian, tetapi dengan tetap memelihara nilai-nilai luhur Jawa. *Kedua*, kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. Masyarakat akan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan serta memanfaatkan peluang yang timbul untuk menjadi unggul. *Ketiga*, adanya fungsi integrasi semua unsur masyarakat yang beraneka ragam secara menerus sehingga terbentuk kekuatan sentripetal yang semakin menyatukan masyarakat. *Keempat*, masyarakat harus memiliki

tujuan bersama dari masa ke masa untuk bertransformasi karena terus akan diperbaiki oleh dinamika masyarakatnya dan oleh para pemimpinnya.

Untuk membentuk ketahanan budaya, nilai agama dan nilai budaya ditanamkan sejak dini melalui pendidikan karakter dari dalam keluarga, sehingga hal ini juga berkaitan dengan pentingnya ketahanan keluarga sebagai pondasi pembentukan karakter masyarakat sejak dini. Setelah itu, penanaman pondasi karakter juga mulai dilakukan di sektor pendidikan formal untuk melengkapi proses karakterisasi anak-anak sejak dini. Penanaman nilai budaya tidak terbatas pada pembelajaran seni, tradisi dan warisan budaya semata, namun juga upaya menumbuhkembangkan budaya mencintai alam lingkungan dan mitigasi bencana, serta budaya literasi dalam berbagai aspek. Ketahanan budaya yang kuat dan kokoh akan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat, selain itu sebaliknya ketahanan budaya akan tercapai apabila didukung dengan kondisi lingkungan wilayah yang kondusif yang akan menjamin lancar dan amannya semua pihak dalam proses pembangunan Jawa Tengah.

Di sisi lain, pembangunan akan dapat berjalan dengan optimal tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, ketahanan sumber daya alam dan ekologi harus kuat mengingat daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Jawa Tengah mulai terlampaui. Maka menjadi penting untuk menjaga kelestarian sumber daya alam untuk menjaga keberlanjutan pembangunan daerah Jawa Tengah. Ketahanan ekologi fokus pada pemantapan ketahanan sumber daya lahan dan pesisir, ketahanan air, ketahanan pangan, ketahanan energi, ketahanan sumber daya mineral, kualitas lingkungan hidup (baik pada lingkup air, udara, tutupan lahan, dan air laut), penataan ruang, ketahanan perubahan iklim, dan ketangguhan bencana. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestariannya lingkungan hidup akan dapat mengurangi potensi terjadinya bencana. Pemantapan ketahanan ekologi salah satu upayanya adalah dengan memperkuat ketangguhan individu, keluarga, komunitas masyarakat, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Dengan memperkuat ketahanan individu, keluarga dan masyarakat menjadi bagian dalam menciptakan ketahanan sosial budaya dan ekologi termasuk untuk menghadapi tantangan di dalam keluarga maupun tantangan lingkungan termasuk teknologi dan informasi serta ancaman bencana. Perwujudan ketahanan individu, keluarga, dan masyarakat memerlukan kesiapan dalam membangun keluarga termasuk kesetaraan peran antar anggota keluarga serta kemampuan untuk memenuhi hak dan menyediakan perlindungan bagi anggota keluarga, termasuk keluarga yang memiliki kebutuhan spesifik seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Peningkatan pengetahuan dan kesadaran individu dalam keluarga, penyediaan lingkungan yang kondusif bagi keberfungsian peran keluarga, serta penciptaan akses partisipasi keluarga dalam pembangunan dapat menjadi penyokong terwujudnya ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Misi 6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Misi selanjutnya yang dilaksanakan dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan, dan sebagai salah satu kerangka implementasi transformasi adalah pembangunan kewilayahan. Arah pembangunan kewilayahan di Jawa Tengah adalah untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budidaya dan lindung, serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir.

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah dan kelompok pendapatan, yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor.

Misi 7. Sarana dan Prasarana yang Berkualitas Dan Ramah Lingkungan

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, serta menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung upaya transformasi. Dukungan pembangunan sarana dan prasarana tersebut berkaitan dalam hal pergerakan orang, distribusi barang dan jasa (efisiensi biaya perjalanan dan logistik), serta upaya peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Upaya yang dilakukan terutama dengan penyediaan jalan dan jembatan dalam kondisi mantap dan sesuai dengan standar, peningkatan kelancaran serta keselamatan perjalanan dan transportasi, didukung juga dengan peningkatan kualitas, pemerataan simpul dan jaringan transportasi, serta integrasi pelayanan transportasi umum.

Sarana prasarana lainnya yang menjadi penting untuk mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah adalah sarana prasarana sumber daya air terutama untuk penyediaan air baku, jaringan listrik, energi, komunikasi dan informasi. Penyediaan sarana prasarana bagi masyarakat juga menjadi salah satu prasyarat untuk mendukung aktivitas masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat terutama dalam penyediaan perumahan, permukiman, air minum aman, dan sanitasi aman. Pembangunan sarana prasarana tersebut tetap berprinsip pada sarana prasarana yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Untuk itu menjadi penting bahwa pembangunan sarana prasarana harus berpedoman pada rencana tata ruang yang sudah ditetapkan agar kualitas ruang tetap terjaga dan lestari.

Misi 8. Kestinambungan Pembangunan

Dalam rangka perwujudan visi pembangunan Jawa Tengah 2045 agar tercapai maka diperlukan implementasi pembangunan yang berkesinambungan. Kestinambungan pembangunan Jawa Tengah sampai dengan tahun 2045 didukung dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang memadai. Kaidah pelaksanaan merupakan norma yang mengatur mekanisme proses pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian, sistem insentif, perubahan, dan komunikasi kepada publik. Selain itu, upaya perwujudan visi pembangunan Jawa Tengah 2045 agar tetap berkesinambungan akan memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai dengan menciptakan lingkungan pembiayaan yang kondusif, dan pengembangan inovasi pembiayaan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. ARAH KEBIJAKAN

Kerangka kerja pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah tahun 2025-2045 dijabarkan dalam empat tahapan arah kebijakan dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah. Arah kebijakan lima tahunan diarahkan guna penekanan prioritas pembangunan yang ditetapkan secara berkesinambungan antara satu periode dengan periode berikutnya. Arah kebijakan setiap tahapan lima tahunan dijabarkan sebagai berikut.

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Periode pertama dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada kebijakan **“Penguatan Landasan Transformasi”**. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Transformasi sosial diarahkan pada peningkatan perluasan layanan pendidikan bermutu berorientasi pada *demand-supply side* dan penguatan kelembagaan, penuntasan layanan kesehatan dasar sesuai standar, serta penguatan tata kelola dan perluasan cakupan penyelenggaraan perlindungan sosial.

Transformasi ekonomi diarahkan pada inisiasi penerapan ekonomi hijau, penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, transformasi industri pada daerah yang memiliki sektor agraris unggulan, penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan kemandirian desa, didukung dengan penguatan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.

Transformasi tata kelola diarahkan pada penataan regulasi, manajemen organisasi serta proses bisnis yang efektif dan efisien berbasis risiko dan kebutuhan daerah, peningkatan kualitas dan integritas penyelenggara pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pelayanan publik, transformasi dalam upaya pembentukan masyarakat digital, serta peningkatan peran serta masyarakat dan *stakeholder* terkait.

Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya penguatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan wilayah yang kondusif, peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat, serta pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, guna mendukung pelaksanaan dan pengawasan pembangunan maka kebijakan ke depan diarahkan pada upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perluasan dan

perlindungan ruang sipil, peningkatan hubungan diplomasi dan peningkatan peran daerah dalam forum internasional, pemenuhan hak asasi manusia, serta stabilitas ekonomi makro daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada penguatan karakter masyarakat Jawa Tengah dengan memperkuat landasan strategi pemajuan kebudayaan yang berorientasi pada perlindungan dan pengembangan, internalisasi budaya dalam pendidikan lokal bersentral pada perlindungan dan pembinaan, pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter, mengedepankan habituasi dimulai dalam lingkup keluarga maupun satuan pendidikan formal maupun nonformal, penguatan landasan kohesi sosial dengan menempatkan organisasi, komunitas agama, dan sosial masyarakat sebagai kolaborator. Pada tahap ini pembangunan keluarga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang peran dan fungsi keluarga dalam mencegah terjadinya perilaku salah dan ketidaksetaraan dalam keluarga, membentuk karakter masyarakat, serta menghadapi ancaman lingkungan termasuk ancaman bencana. Tahap ini juga diarahkan pada peningkatan kinerja jasa lingkungan melalui pembenahan tata kelola lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan dan kehati, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyediaan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim, serta penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana.

Pembangunan kewilayahan disertai sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada peningkatan pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, peningkatan pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, peningkatan fasilitas keselamatan, pengguna angkutan umum, dan kualitas simpul transportasi serta konektivitas jaringan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan, penguatan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, peningkatan penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan kawasan permukiman, didukung dengan percepatan penyusunan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR)), penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang, percepatan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta percepatan pelaksanaan reforma agraria.

Pembiayaan pembangunan, diarahkan pada upaya penguatan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah.

5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada kebijakan **“Akselerasi Transformasi”**. Tahap kedua ini dilakukan dengan akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan akselerasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta akselerasi penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan akselerasi transformasi ini didukung implementasi pembangunan

kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

Transformasi sosial diarahkan pada akselerasi partisipasi pendidikan, akselerasi pemerataan akses dan mutu kesehatan yang inklusif untuk mewujudkan ketahanan kesehatan di daerah, dan akselerasi penyelenggaraan perlindungan sosial yang menyeluruh, dalam upaya mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas guna percepatan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi ekonomi diarahkan pada penerapan ekonomi hijau, akselerasi penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan pengembangan industri baru berbasis sumber daya dan bahan lokal, penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan kemandirian desa, didukung dengan akselerasi penguatan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.

Transformasi tata kelola diarahkan pada akselerasi mewujudkan ASN kompeten dan sejahtera serta manajemen karir berbasis meritokrasi, kelembagaan yang kolaboratif, peningkatan kualitas regulasi, percepatan pelayanan publik berbasis sistem informasi, penguatan integritas ASN dan partai politik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sebagai penguatan kehidupan demokrasi.

Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya akselerasi penguatan ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan wilayah yang kondusif, pelaksanaan diplomasi guna membentuk konektivitas global, penguatan integritas partai politik melalui penerapan kode etik, penguatan sistem kaderisasi, pemenuhan hak asasi manusia, serta stabilitas ekonomi makro daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada akselerasi penguatan karakter masyarakat Jawa Tengah dengan akselerasi pemajuan kebudayaan melalui akselerasi perlindungan dan pengembangan internalisasi budaya dalam pendidikan muatan lokal berfokus pada pengembangan pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter berorientasi pada peran sentral perempuan, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, serta pengembangan kohesi sosial melalui penciptaan ekosistem kerja sama inklusif. Pada tahap ini pembangunan keluarga difokuskan pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan peran dan fungsi keluarga serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif dan berkeadilan dalam pembangunan. Tahap ini juga diarahkan pada regenerasi ekosistem melalui akselerasi peningkatan pengelolaan dan pencadangan sumber daya alam, *mainstreaming* teknologi hijau dan rendah emisi pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyediaan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.

Pembangunan kewilayahan disertai sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, diarahkan pada akselerasi pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, peningkatan pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, pemerataan simpul transportasi, inisiasi pemanfaatan teknologi transportasi dan pengembangan integrasi antarmoda serta sinergi peningkatan keselamatan, penguatan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, peningkatan penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan kawasan permukiman, didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang, penguatan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pelaksanaan reforma agraria.

Pembiayaan pembangunan diarahkan pada optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan nonpemerintah.

5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada kebijakan **“Pemantapan Transformasi”**. Tahap ketiga ini dilakukan dengan pemantapan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pemantapan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan pemantapan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta pemantapan pembiayaan pembangunan.

Transformasi sosial diarahkan pada pemantapan partisipasi dan mutu pendidikan berbasis teknologi, pemantapan dan diversifikasi pelayanan kesehatan untuk memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat, memfasilitasi industri kesehatan serta memperkuat ekosistem kesehatan, serta pemantapan penyelenggaraan perlindungan sosial yang berkelanjutan, untuk penguatan daya saing sumber daya manusia agar semakin produktif dan inovatif dalam rangka pemantapan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Transformasi ekonomi diarahkan pada pemantapan penerapan ekonomi hijau, pemantapan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri secara spesifik berbasis sektor unggulan dalam jangka panjang seperti sektor makanan dan minuman, farmasi, dan elektronik, pemantapan ekonomi kreatif, serta peningkatan kemandirian desa, didukung dengan pemantapan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.

Transformasi tata kelola diarahkan pada kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif, regulasi efektif, efisien dan akuntabel, ASN kompetitif, sejahtera dan berintegritas, manajemen organisasi modern berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang aktif dan sadar berdemokrasi.

Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya pemantapan ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan wilayah yang kondusif, perluasan konektivitas diplomasi dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional, perwujudan

partai politik modern, budaya politik yang inklusif berlandaskan Pancasila, masyarakat sipil mandiri, pemenuhan hak asasi manusia, serta pemantapan stabilitas ekonomi makro daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi dititikberatkan pada pemantapan karakter masyarakat Jawa Tengah dengan pemantapan pemajuan kebudayaan berorientasi pada pemanfaatan dan pembinaan, internalisasi budaya dalam pendidikan muatan lokal dengan tetap mempertahankan perlindungan, pembinaan, dan upaya pengembangan secara komprehensif, pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter secara holistik dengan menyinergikan sumber daya manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem, serta kohesi sosial dengan moderasi beragama yang lebih baik. Pembangunan keluarga pada tahap ini difokuskan pada mewujudkan keluarga yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi ancaman kerentanan keluarga dan ancaman lingkungan termasuk ancaman bencana, serta mampu berperan dalam pembangunan tanpa kehilangan karakter dan jati diri. Tahap ini juga diarahkan pada pemantapan penguatan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian dan pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyediaan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta resiliensi dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana.

Pembangunan kewilayahan disertai sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada pemantapan pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, pemantapan efektivitas pergerakan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan penurunan fatalitas kecelakaan, pemantapan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, penyediaan rumah layak huni untuk semua, serta pemantapan kawasan permukiman layak, didukung dengan pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang, pemantapan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta pemantapan pelaksanaan reforma agraria.

Pembiayaan pembangunan diarahkan pada optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan nonpemerintah.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Jawa Tengah diarahkan pada kebijakan **“Perwujudan Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan”**. Tahap keempat ini dilakukan dengan perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta stabilitas keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan perwujudan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang semakin merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta pembiayaan pembangunan yang semakin menguat.

Transformasi sosial diarahkan pada perwujudan sumber daya manusia Jawa Tengah yang sejahtera dan memiliki kualitas hidup baik, yang ditunjukkan dengan perwujudan sumber daya manusia yang adaptif, berakhlak mulia, berbudaya, maju, unggul, dan berdaya saing dengan pemenuhan layanan pendidikan bermutu yang inklusif, derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan ketangguhan ketahanan kesehatan daerah, serta perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif.

Transformasi ekonomi diarahkan pada perwujudan ekonomi Jawa Tengah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan sebagai penumpu pangan dan industri nasional, dengan perwujudan ekonomi hijau, perwujudan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah, perwujudan pertumbuhan sektor industri yang berbasis pangan dan berorientasi teknologi, perwujudan ekonomi kreatif, perwujudan kemandirian desa didukung perwujudan daya saing sumber daya manusia yang produktif, inovatif, kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi.

Transformasi tata kelola diarahkan pada perwujudan manajemen organisasi, regulasi dan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, modern, berintegritas, serta bebas korupsi.

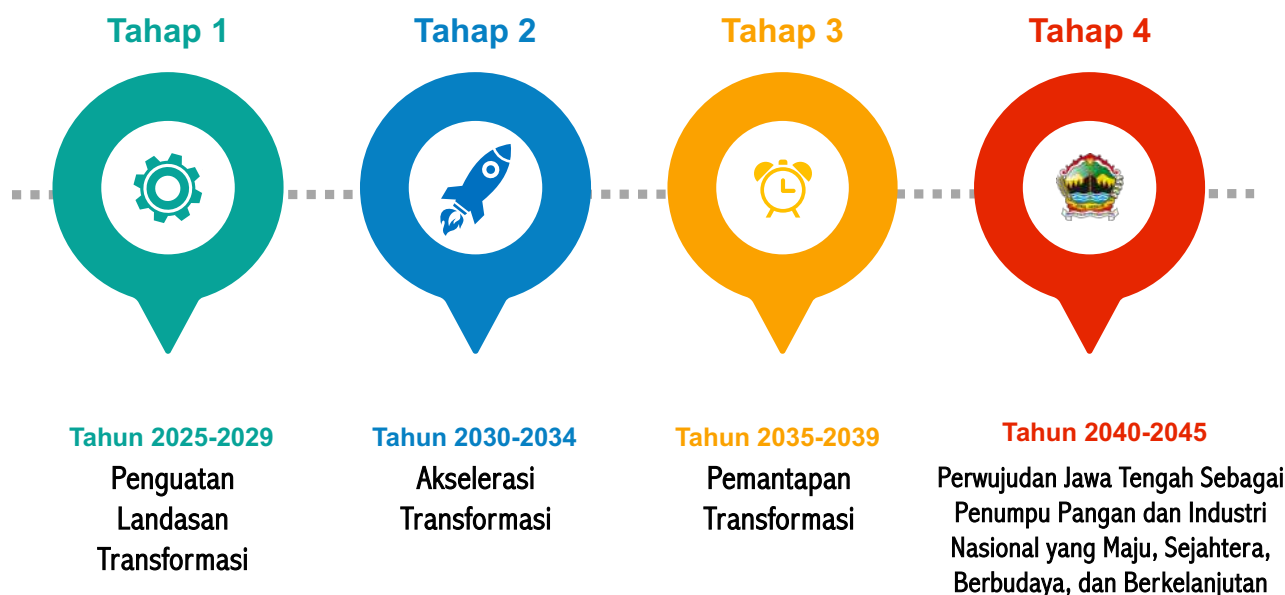
Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah diarahkan pada upaya perwujudan keamanan daerah tangguh, perwujudan diplomasi tangguh, perwujudan demokrasi substansial, pemenuhan hak asasi manusia, serta perwujudan stabilitas ekonomi makro daerah.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi diarahkan pada perwujudan karakter masyarakat Jawa Tengah dengan perwujudan pemajuan kebudayaan berorientasi pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, internalisasi budaya dalam pendidikan muatan lokal secara komprehensif dan berkesinambungan, pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter yang mampu menciptakan sumber daya manusia berkarakter, unggul, kohesi sosial dan keberagaman yang lebih baik. Pembangunan keluarga pada tahap ini dilaksanakan untuk memastikan terwujudnya keluarga yang berkualitas secara menyeluruh dan berkesinambungan. Tahap ini juga diarahkan pada perwujudan pengelolaan sumber daya alam yang semakin optimal, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyediaan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta berdampak pada semakin kuatnya ketahanan daerah akan risiko bencana dan ketahanan iklim menuju *Nett Zero Emission*.

Pembangunan kewilayahan disertai sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan diarahkan pada perwujudan pemerataan pembangunan dengan pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, perwujudan pelayanan transportasi yang andal, nyaman, selamat, terjangkau dan berkelanjutan, jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi yang berkualitas, pemenuhan rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan, serta perwujudan kawasan permukiman layak, didukung dengan pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang,

pemantapan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta pemantapan pelaksanaan reforma agraria.

Pembiayaan pembangunan diarahkan pada perwujudan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat dengan sinergi dan pemanfaatan pendanaan pemerintah dan nonpemerintah yang semakin optimal.



Gambar 5.1.
Tahapan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Secara ringkas, arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2045 sebagaimana yang telah diuraikan di atas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan		Penguatan Landasan Transformasi	Akselerasi Transformasi	Pemantapan Transformasi	Perwujudan Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan
	1. Transformasi Sosial	Peningkatan perluasan layanan pendidikan bermutu berorientasi pada <i>demand-</i>	Akselerasi partisipasi pendidikan, akselerasi pemerataan akses dan mutu kesehatan yang	Pemantapan partisipasi dan mutu pendidikan berbasis teknologi, pemantapan	Perwujudan sumber daya manusia Jawa Tengah yang sejahtera dan memiliki

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		supply side dan penguatan kelembagaan, penuntasan layanan kesehatan dasar sesuai standar, serta penguatan tata kelola dan perluasan cakupan penyelenggaraan perlindungan sosial	inklusif untuk mewujudkan ketahanan kesehatan di daerah, dan akselerasi penyelenggaraan perlindungan sosial yang menyeluruh, dalam upaya mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas guna percepatan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	dan diversifikasi pelayanan kesehatan untuk memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat, memfasilitasi industri kesehatan serta memperkuat ekosistem kesehatan, serta peman-tapan penyelenggaraan perlindungan sosial yang berkelanjutan, untuk penguatan daya saing sumber daya manusia agar semakin produktif dan inovatif dalam rangka pemantapan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat	kualitas hidup baik, yang ditunjukkan dengan perwujudan sumber daya manusia yang adaptif, berakhlak mulia, berbudaya, maju, unggul, dan berdaya saing dengan pemenuhan layanan pendidikan bermutu yang inklusif, derajat kesehatan masyarakat yang optimal dan ketangguhan ketahanan kesehatan daerah, serta perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif
	2. Transformasi Ekonomi	Inisiasi penerapan ekonomi hijau, penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, transformasi industri pada daerah yang memiliki sektor agraris unggulan, penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan kemandirian desa, didukung dengan penguatan daya saing sumber daya manusia	Penerapan ekonomi hijau, akselerasi penguatan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, penguatan pengembangan industri baru berbasis sumber daya dan bahan lokal, penguatan ekonomi kreatif, serta peningkatan kemandirian desa, didukung dengan akselerasi penguatan daya saing sumber daya manusia	Pemantapan penerapan ekonomi hijau, pemantapan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan di daerah, mendorong pertumbuhan dan pengembangan industri secara spesifik berbasis sektor unggulan dalam jangka panjang seperti sektor makanan dan minuman, farmasi, dan elektronik, pemantapan ekonomi kreatif,	Perwujudan ekonomi Jawa Tengah yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan sebagai penumpu pangan dan industri nasional, dengan perwujudan ekonomi hijau, perwujudan produksi dan hilirisasi sektor-sektor unggulan daerah, perwujudan pertumbuha

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		agar lebih produktif, inovatif, kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi	agar lebih produktif, inovatif, kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi	serta peningkatan kemandirian desa, didukung dengan pemantapan daya saing sumber daya manusia agar lebih produktif, inovatif, kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi	n sektor industri yang berbasis pangan dan berorientasi teknologi, perwujudan ekonomi kreatif, perwujudan kemandirian desa didukung perwujudan daya saing sumber daya manusia yang produktif, inovatif, kreatif, berbasis riset, inovasi, dan digitalisasi
	3. Transformasi Tata Kelola	Penataan regulasi, manajemen organisasi serta proses bisnis yang efektif dan efisien berbasis risiko dan kebutuhan daerah, peningkatan kualitas dan integritas penyelenggara pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada pelayanan publik, transformasi dalam upaya pembentukan masyarakat digital, serta peningkatan peran serta masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait	Akselerasi mewujudkan ASN kompeten dan sejahtera serta manajemen karir berbasis meritokrasi, kelembagaan yang kolaboratif, peningkatan kualitas regulasi, percepatan pelayanan publik berbasis sistem informasi, penguatan integritas ASN dan partai politik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan sebagai penguatan kehidupan demokrasi	Kelembagaan yang adaptif dan kolaboratif, regulasi efektif, efisien dan akuntabel, ASN kompetitif, sejahtera dan berintegritas, manajemen organisasi modern berbasis teknologi informasi, dan masyarakat sipil yang aktif dan sadar berdemokrasi	Perwujudan manajemen organisasi, regulasi dan tata kelola yang adaptif, kolaboratif, modern, berintegritas, serta bebas korupsi
	4. Keamanan Daerah	Penguatan ketentraman	Akselerasi penguatan	Pemantapan ketentraman	Perwujudan keamanan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	dan ketertiban umum untuk menciptakan wilayah yang kondusif, peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat, serta pengarusutamaan internalisasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, guna mendukung pelaksanaan dan pengawasan pembangunan maka kebijakan ke depan diarahkan pada upaya peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, perluasan dan perlindungan ruang sipil, peningkatan hubungan diplomasi dan peningkatan peran daerah dalam forum internasional, pemenuhan hak asasi manusia, serta stabilitas ekonomi makro daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat	ketentraman dan ketertiban umum untuk menciptakan wilayah yang kondusif, pelaksanaan diplomasi guna membentuk konektivitas global, penguatan integritas partai politik melalui penerapan kode etik, penguatan sistem kaderisasi, pemenuhan hak asasi manusia, serta stabilitas ekonomi makro daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat	dan ketertiban umum untuk menciptakan wilayah yang kondusif, perluasan konektivitas diplomasi dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional, perwujudan partai politik modern, budaya politik yang inklusif berlandaskan Pancasila, masyarakat sipil mandiri, pemenuhan hak asasi manusia, serta pemantapan stabilitas ekonomi makro daerah terutama dalam menjaga stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat	daerah tangguh, perwujudan diplomasi tangguh, perwujudan demokrasi substansial, pemenuhan hak asasi manusia, serta perwujudan stabilitas ekonomi makro daerah
	5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan karakter masyarakat Jawa Tengah dengan	Akselerasi penguatan karakter masyarakat Jawa Tengah	Pemantapan karakter masyarakat Jawa Tengah dengan	Perwujudan karakter masyarakat Jawa Tengah dengan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		memperkuat landasan strategi pemajuan kebudayaan yang berorientasi pada perlindungan dan pengembangan, internalisasi budaya dalam pendidikan lokal bersentral pada perlindungan dan pembinaan, pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter, mengedepankan habituasi dimulai dalam lingkup keluarga maupun satuan pendidikan formal maupun nonformal, penguatan landasan kohesi sosial dengan menempatkan organisasi, komunitas agama, dan sosial masyarakat sebagai kolaborator. Pada tahap ini pembangunan keluarga diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran keluarga tentang peran dan fungsi keluarga dalam mencegah terjadinya perilaku salah dan	dengan akselerasi pemajuan kebudayaan melalui akselerasi perlindungan dan pengembangan internalisasi budaya dalam pendidikan muatan lokal berfokus pada pengembangan pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter berorientasi pada peran sentral perempuan, tenaga pendidik, tokoh masyarakat dalam keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, serta pengembangan kohesi sosial melalui penciptaan ekosistem kerja sama inklusif. Pada tahap ini pembangunan keluarga difokuskan pada penciptaan lingkungan yang kondusif bagi pelaksanaan peran dan fungsi keluarga serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif dan berkeadilan dalam pembangunan. Tahap ini juga diarahkan pada regenerasi ekosistem melalui	pemantapan pemajuan kebudayaan berorientasi pada pemanfaatan dan pembinaan, internalisasi budaya dalam pendidikan muatan lokal dengan tetap mempertahankan perlindungan, pembinaan, dan upaya pengembangan secara komprehensif, pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter secara holistik dengan menyinergikan sumber daya manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem, serta kohesi sosial dengan moderasi beragama yang lebih baik. Pembangunan keluarga pada tahap ini difokuskan pada mewujudkan keluarga yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi ancaman kerentanan keluarga dan ancaman lingkungan termasuk ancaman bencana, serta mampu berperan dalam	perwujudan pemajuan kebudayaan berorientasi pada perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, internalisasi budaya dalam pendidikan muatan lokal secara komprehensif dan berkesinambungan, pengejawantahan nilai agama dan budaya dalam pendidikan karakter yang mampu menciptakan sumber daya manusia berkepribadian, unggul, kohesi sosial dan keberagaman yang lebih baik. Pembangunan keluarga pada tahap ini dilaksanakan untuk memastikan terwujudnya keluarga yang berkualitas secara menyeluruh dan berkesinambungan. Tahap ini juga diarahkan pada

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		ketidaksetaraan dalam keluarga, membentuk karakter masyarakat, serta menghadapi ancaman lingkungan termasuk ancaman bencana. Tahap ini juga diarahkan pada peningkatan kinerja jasa lingkungan melalui pembenahan tata kelola lingkungan hidup, pemulihan fungsi lingkungan dan kehati, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyediaan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim, serta penguatan kapasitas pengurangan risiko bencana	akselerasi peningkatan pengelolaan dan pencadangan sumber daya alam, <i>mainstreaming</i> teknologi hijau dan rendah emisi pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyediaan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta peningkatan ketahanan dan resiliensi dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana	pembangunan tanpa kehilangan karakter dan jati diri. Tahap ini juga diarahkan pada pemantapan penguatan pengelolaan sumber daya alam, pengendalian dan pemantauan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyediaan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta resiliensi dampak perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana	perwujudan pengelolaan sumber daya alam yang semakin optimal, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, penyediaan sanitasi dan air minum aman, ketahanan pangan, ketahanan energi, serta berdampak pada semakin kuatnya ketahanan daerah akan risiko bencana dan ketahanan iklim menuju <i>Nett Zero Emission</i>
	6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan 7. Sarana Prasarana Berkualitas	Peningkatan pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, peningkatan pemenuhan prasarana	Akselerasi pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, peningkatan pemenuhan prasarana	Pemantapan pemerataan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar, pemenuhan prasarana sarana sumber	Perwujudan pemerataan pembangunan dengan pemerataan kualitas jalan dan jembatan

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	dan Ramah Lingkungan	sarana sumber daya air, peningkatan fasilitas keselamatan, pengguna angkutan umum, dan kualitas simpul transportasi serta konektivitas jaringan yang lebih berpihak kepada kelompok rentan, penguatan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, peningkatan penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan kawasan permukiman, didukung dengan percepatan penyusunan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan rencana detail tata ruang (RDTR)), penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang, percepatan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta percepatan pelaksanaan reforma agraria	sarana sumber daya air, pemerataan simpul transportasi, inisiasi pemanfaatan teknologi transportasi dan pengembangan integrasi antarmoda serta sinergi peningkatan keselamatan, penguatan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, peningkatan penyediaan rumah layak huni, serta perbaikan kawasan permukiman, didukung dengan penguatan pemanfaatan dan pengendalian rencana tata ruang, penguatan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta penguatan pelaksanaan reforma agraria	daya air, pemantapan efektivitas pergerakan transportasi yang lebih ramah lingkungan dan penurunan fatalitas kecelakaan, pemantapan jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi, penyediaan rumah layak huni untuk semua, serta pemantapan kawasan permukiman layak, didukung dengan pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang, pemantapan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta pemantapan pelaksanaan reforma agraria	sesuai standar, pemenuhan prasarana sarana sumber daya air, perwujudan pelayanan transportasi yang andal, nyaman, selamat, terjangkau dan berkelanjutan, jaringan energi, listrik, dan jaringan komunikasi yang berkualitas, pemenuhan rumah layak huni terjangkau dan berkelanjutan, serta perwujudan kawasan permukiman layak, didukung dengan pemantapan pengendalian pemanfaatan rencana tata ruang, pemantapan pengadaan dan pencadangan tanah untuk kepentingan umum, serta pemantapan pelaksanaan reforma agraria

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	8. Kestinambungan Pembangunan	Penguatan keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah	Optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan nonpemerintah	Optimalisasi keberlanjutan kapasitas fiskal daerah dan perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, terutama yang bersumber dari pendanaan nonpemerintah	Perwujudan kapasitas fiskal daerah yang semakin kuat dengan sinergi dan pemanfaatan pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin optimal

5.2. SASARAN POKOK

Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang bersifat progresif.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah 2025-2045 ditetapkan **6 (enam) sasaran pokok** dengan **17 (tujuh belas) arah pembangunan** daerah Jawa Tengah (17 *Central Java*/17CJ). Visi pembangunan Jawa Tengah yang akan diwujudkan pada tahun 2045 adalah Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan lebih lanjut dijabarkan dalam misi, sasaran pokok, dan arah pembangunan daerah sebagai berikut.

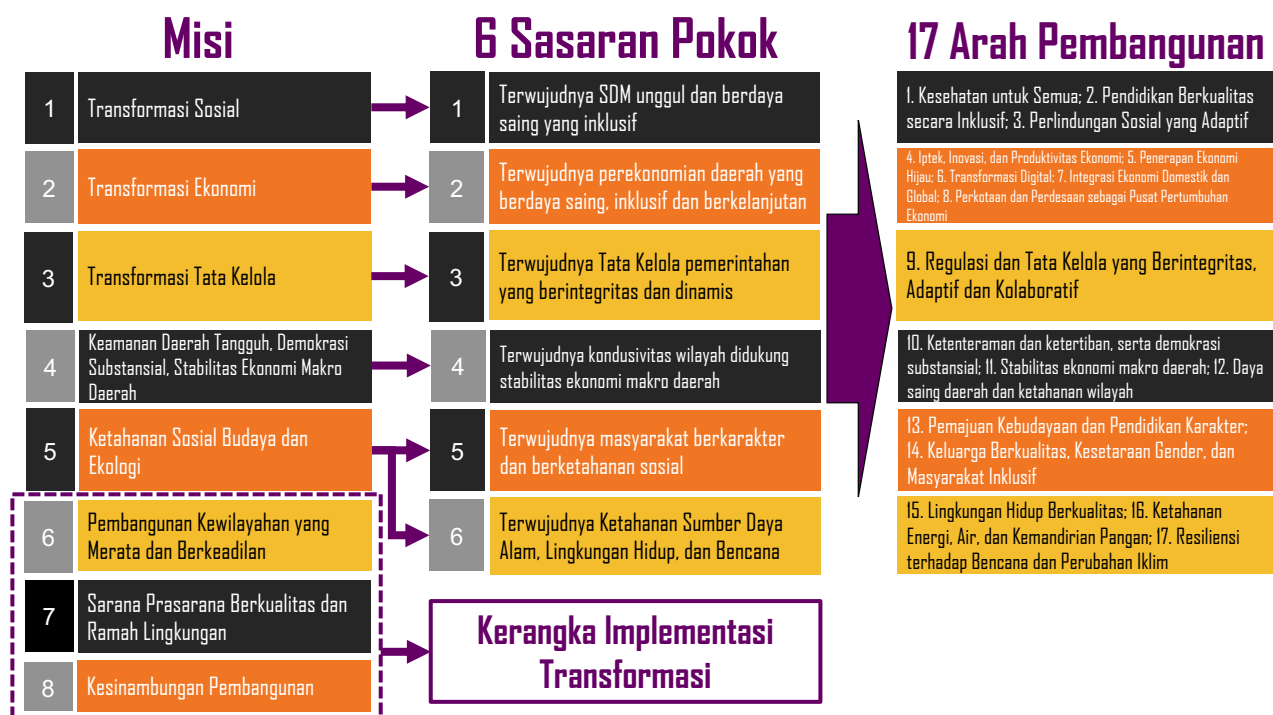
Transformasi sosial dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif, terutama penyediaan akses pendidikan yang semakin inklusif, kesehatan untuk semua, dan perlindungan sosial yang adaptif. Misi transformasi sosial ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah yaitu **terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif**. Pencapaian sasaran pokok difokuskan pada tiga arah pembangunan meliputi: CJ01. Kesehatan untuk semua; CJ02. Pendidikan berkualitas secara inklusif; dan CJ03. Perlindungan sosial yang adaptif.

Transformasi ekonomi dilakukan dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi. Misi transformasi ekonomi ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah yaitu **terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan**. Pencapaian sasaran pokok difokuskan pada lima arah pembangunan meliputi: CJ04. Iptek, inovasi, dan produktivitas ekonomi; CJ05. Penerapan ekonomi hijau; CJ06. Transformasi digital; CJ07. Integrasi ekonomi domestik dan global; serta CJ08. Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

Transformasi tata kelola mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, senantiasa bergerak cepat, tanggap dalam menghadapi situasi maupun gejolak apapun dan dapat langsung beradaptasi pada segala bentuk perubahan yang terjadi (lebih *agile*) dengan tetap menjaga integritas semakin kuat. Misi transformasi tata kelola ini dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran pokok daerah yaitu **terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis**. Pencapaian sasaran pokok difokuskan pada satu arah pembangunan yaitu CJ09. Regulasi dan tata kelola yang berintegritas, adaptif dan kolaboratif.

Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk mendukung perwujudan transformasi agar semakin optimal. Untuk itu, dalam misi ini diarahkan pada pencapaian sasaran pokok daerah yaitu **terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah**. Pencapaian sasaran pokok difokuskan pada tiga arah pembangunan meliputi: CJ10. Ketenteraman dan ketertiban, serta demokrasi substansial; CJ11. Stabilitas ekonomi makro daerah; serta CJ12. Daya saing daerah dan ketahanan wilayah.

Ketahanan sosial budaya dan ekologi dilakukan dalam rangka menjaga dan mempertahankan karakter dan budaya masyarakat Jawa Tengah ditengah gempuran modernisasi dan globalisasi. Di sisi lain, pembangunan akan dapat berjalan dengan optimal tidak terlepas dari kebutuhan akan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik. Oleh karena itu, ketahanan sumber daya alam dan ekologi harus kuat mengingat daya dukung dan daya tampung Jawa Tengah mulai terlampaui. Untuk itu, misi ini dilakukan dalam rangka pencapaian dua sasaran pokok daerah yaitu **terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial, serta terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana**. Pencapaian sasaran pokok **terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial** difokuskan pada dua arah pembangunan meliputi: CJ13. Pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter; serta CJ14. Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif. Pencapaian sasaran pokok **terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana** difokuskan pada tiga arah pembangunan meliputi: CJ15. Lingkungan hidup berkualitas; CJ16. Ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan; serta CJ17. Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.



Gambar 5.2.

Misi, Sasaran Pokok, dan Arah Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Pencapaian sasaran pokok diukur dengan indikator kinerja yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2045. Sasaran pokok, arah pembangunan, arah kebijakan, dan indikator kinerjanya lebih rinci dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1. Sasaran 1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif

Pencapaian sasaran tersebut dilakukan dengan memastikan penyediaan layanan dasar secara merata dan inklusif dalam rangka menjamin tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat dan kecukupan ekonomi masyarakat sehingga tercapai manusia Jawa Tengah yang sehat, cerdas, kreatif, unggul, berdaya saing, dan semakin sejahtera. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

CJ01. Kesehatan Untuk Semua

Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif dilaksanakan untuk menjamin tersedianya akses dan layanan kesehatan berkualitas secara merata dan berkeadilan. Pelayanan kesehatan yang paripurna dan inklusif akan dicapai jika prasyaratnya dipenuhi yaitu tersedianya sumber daya kesehatan yang adekuat, terlaksananya upaya kesehatan yang komprehensif, tersedianya regulasi untuk mendukung penyempurnaan sistem kesehatan, serta tersedianya ekosistem yang mampu memfasilitasi tumbuhnya industri kesehatan. Arah kebijakan untuk mewujudkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang inklusif di Jawa Tengah adalah: 1) pemerataan pelayanan dan prasarana sarana kesehatan promotif, preventif, kuratif (termasuk deteksi dini, vaksinasi terutama imunisasi rutin lengkap, penemuan kasus dan pengobatan secara masif), rehabilitatif, dan paliatif, dengan inovasi pelayanan kesehatan sesuai kondisi wilayah termasuk gugus Pulau

Karimunjawa dan pegunungan; 2) pengendalian produksi, konsumsi, dan peredaran produk yang memberikan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, 3) penanggulangan permasalahan gizi makro dan gizi mikro, percepatan penuntasan permasalahan *stunting* dan kelebihan gizi melalui peningkatan pola konsumsi pangan yang beragam, pengayaan zat gizi, dan jaminan gizi pada periode pra-konsepsi hingga 1.000 hari pertama kehidupan, 4) penguatan pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, usia produktif, dan lanjut usia; kesehatan mental, kesehatan kerja, kesehatan tradisional; pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular serta eliminasi penyakit menular terutama tuberkulosis, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi, penyakit bersumber binatang dan *zoonosis* serta penuntasan penyakit tropis terabaikan, 5) pengembangan kebijakan perencanaan keluarga untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang yang didukung dengan peningkatan pemahaman dan perubahan perilaku masyarakat, jaminan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi dari sisi tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana yang merata di seluruh tingkatan wilayah, 6) perluasan investasi pelayanan kesehatan primer yang komprehensif sampai dengan tingkat desa dan kelurahan termasuk kelembagaan kader kesehatan yang didukung komitmen politik, kepemimpinan, pembiayaan dan tata kelola yang berkolaborasi antarsektor, profesi dan pemangku kepentingan, serta mewujudkan partisipasi masyarakat termasuk swasta dalam pembangunan kesehatan, 7) pemenuhan kualitas pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat termasuk pengurangan waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, 8) pemenuhan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan yang berkelanjutan dengan fokus pada penerapan belanja strategis untuk mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan, 9) penguatan tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien melalui pemanfaatan sumber daya finansial baik dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, desa dan masyarakat termasuk sektor swasta, 10) penguatan pendataan dan perluasan cakupan pemberian jaminan kesehatan kepada kelompok masyarakat miskin ekstrem, disabilitas, penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta masyarakat marginal, 11) penguatan partisipasi dan kemitraan masyarakat dalam solidaritas dalam pembiayaan upaya kesehatan, 12) pemenuhan jumlah dan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan berkualitas, kompeten, dan responsif sesuai kondisi wilayah, percepatan produksi dokter spesialis dan dokter subspecialis dengan rumah sakit, 13) peningkatan pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan bersumber dari pemerintah, nonpemerintah, pembiayaan asuransi, peningkatan efektivitas dan efisiensi pembiayaan kesehatan yang berorientasi pada hasil, serta peningkatan kemandirian pembiayaan rumah sakit pemerintah, 14) penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan *farmakoviligans*, 15) penguatan riset, data dan informasi untuk mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti, pemantauan, dan evaluasi, pengembangan riset dan inovasi bidang kesehatan berbasis rumah sakit dan perguruan tinggi, penerapan teknologi dan inovasi bidang kesehatan, serta 16) penetapan sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah dan subsistem di dalamnya, peningkatan tata kelola pembangunan kesehatan dan penguatan

kepemimpinan, serta peningkatan kapasitas pembangunan kesehatan di kabupaten/kota.

CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif

Pendidikan menjadi hal penting yang berperan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menciptakan sumber daya manusia yang berakhlak, inovatif dan berdaya saing sehingga dapat terwujud masyarakat yang lebih sejahtera. Dalam mewujudkan kondisi tersebut, kebijakan pembangunan pendidikan Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada transformasi pendidikan, meliputi transformasi tata kelola pendidikan, akses layanan pendidikan, serta mutu pendidikan berorientasi nilai, relevansi dan berbasis teknologi. Arah kebijakan untuk mewujudkan pendidikan berkualitas secara inklusif untuk dua puluh tahun ke depan adalah: 1) percepatan wajib belajar 13 tahun, yang difokuskan pada pemerataan akses pendidikan menengah dan khusus melalui: (a) perluasan bantuan pembiayaan pendidikan, (b) penyediaan sarana prasarana sesuai standar dan aman bencana, (c) prioritas pada daerah afirmasi Pegunungan Sewu dan area *blankspot* layanan pendidikan lainnya untuk distribusi dan pemberian insentif guru dan tenaga kependidikan, pengembangan sekolah *virtual* dan kelas jauh berbasis digital, serta penguatan sekolah *boarding* dan semi *boarding*; 2) penyelenggaraan pendidikan berkualitas yang difokuskan pada: (a) penguatan kurikulum pendidikan menengah umum dan kejuruan secara adaptif berbasis *softskill* dan karakter, digital dan teknologi informasi, STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*), dan potensi lokal daerah (termasuk potensi bencana), serta (b) peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan; 3) penguatan revitalisasi dan relevansi pendidikan vokasi dengan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) berbasis potensi dan keunggulan daerah, teknologi serta berorientasi pada kompetensi STEAM (*Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics*); serta 4) solidasi penyelenggaraan pendidikan melalui penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi serta pemberdayaan masyarakat terutama di Pegunungan Sewu dan area *blankspot* layanan pendidikan.

CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial diperuntukkan bagi seluruh masyarakat Jawa Tengah tanpa terkecuali sesuai tingkat kerentanan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Perlindungan sosial ditujukan untuk mendukung percepatan penanggulangan kemiskinan. Kebijakan perlindungan sosial untuk masyarakat Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien, 2) perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan pemasangan instalasi listrik bersubsidi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal,

rentan, dan masyarakat, 3) perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat, 4) pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, 5) percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, 6) percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga, serta 7) peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.

Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif Jawa Tengah tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.2.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia Unggul dan Berdaya Saing yang Inklusif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya sumber daya manusia unggul dan berdaya saing yang inklusif	CJ01. Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,92	75,79	77,59	78,29	81,06
		2. Kesehatan Ibu dan Anak:						
	a) Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	111	77,00	50,00	30,00	15,00	
	b) Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	18,00	15,70	11,70	8,70	4,50	
	3. Insidensi Tuberkulosis:							
	a) Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	%	92,00	94,00	96,00	98,00	100	
	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	%	92,00	93,00	94,00	96,00	98,00	
	4. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	96,34	98,00	99,00	99,00	99,50	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
	CJ02. Pendidikan Berkualitas Secara Inklusif	5. Hasil Pembelajaran:						
		a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
		i) Literasi Membaca	%	78,31-78,49	80,36 - 81,08	82,93 - 84,31	85,49 - 87,55	88,57 - 91,43
		ii) Numerasi	%	37,28-37,46	42,97 - 43,68	50,07 - 51,46	57,18 - 59,24	65,71 - 68,57
		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						
		i) Literasi Membaca	%	66,28-66,46	69,05 - 69,60	72,52 - 73,52	75,98 - 77,44	80,14- 82,14
		ii) Numerasi	%	49,76-49,95	53,25 - 53,80	57,61 - 58,62	61,98 - 63,43	67,21- 69,21
		c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8,73 - 8,74	9,19 - 9,21	9,77 - 9,79	10,35 - 10,38	11,04 - 11,08
		d) Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,07	13,34 - 13,35	13,70 - 13,71	14,05 - 14,06	14,48 - 14,49
		6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	8,18	9,17	10,40	11,63	8,18 - 13,11
		7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian	%	66,89	68,51	70,54	72,57	75,00

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Menengah Tinggi						
		Tingkat Kemiskinan	%	9,00-9,66	7,25-7,90	5,06 - 5,71	2,88 - 3,53	0,25-0,75
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	39,97	48,05	58,16	68,26	80,39
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	20,00	27,00	35,75	44,50	55,00

5.2.2. Sasaran 2. Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan

Perwujudan sasaran pokok tersebut dilakukan secara bertahap dengan proses secara menerus untuk mendorong sektor-sektor ekonomi yang saat ini memiliki produktivitas rendah menjadi sektor-sektor ekonomi yang memiliki produktivitas tinggi, dan juga dilakukan dengan menggerakkan sumber daya manusia agar lebih produktif dan inovatif agar mampu menghasilkan produk-produk yang memiliki nilai tambah dan bersaing di pasar global, serta dengan meningkatkan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional dan internasional. Upaya yang dilakukan fokus pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor unggulan daerah yang dilakukan dengan mendorong hilirisasi didukung dengan digitalisasi ekonomi, serta berbasis pada riset dan inovasi. Selain itu juga didorong untuk pengembangan ekonomi kreatif dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Untuk memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi sampai ke generasi berikutnya, maka diterapkan pembangunan ekonomi hijau. Penerapan ekonomi hijau akan menjamin ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki dengan tetap dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Upaya perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan dengan produktivitas yang semakin meningkat dan menerapkan prinsip ekonomi hijau, diharapkan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang semakin merata. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan difokuskan pada lima arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

Salah satu upaya perwujudan perekonomian yang berdaya saing adalah meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan daerah Jawa Tengah dan memberikan nilai tambah produksi agar mampu lebih bersaing di pasar global maupun nasional. Peningkatan produktivitas salah satunya dengan mendorong hilirisasi produk berbasis riset, teknologi, dan inovasi, serta didukung dengan

digitalisasi ekonomi yang memadai dan terjangkau. Selain itu ekonomi berdaya saing didukung penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan *halal value chain*, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital.

Pertanian

Sektor pertanian (dalam arti luas) menjadi salah satu sektor unggulan daerah Jawa Tengah yang sampai dua puluh tahun ke depan masih akan menjadi unggulan untuk menopang perekonomian Jawa Tengah. Sektor pertanian yang saat ini masih fokus pada peningkatan produksi dan produktivitas, peningkatan nilai tambah produk, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pertanian. Kebijakan peningkatan produktivitas dan hilirisasi sektor pertanian menjadi salah satu kebijakan penting dalam transformasi ekonomi Jawa Tengah yang diharapkan akan berdampak pada kesejahteraan pelaku sektor pertanian terutama petani/nelayan. Kebijakan jangka panjang sektor pertanian ini diarahkan antara lain melalui: 1) peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dalam arti luas yang terintegrasi hulu-hilir melalui pengembangan kawasan strategis pertanian di wilayah Jragung-Tuntang-Serang-Lusi-Juana-Opak dan Bengawan Solo dengan mendorong hilirisasi yang didukung digitalisasi ekonomi dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan petani dalam arti luas, 2) peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui implementasi teknologi (*smart farming, smart agriculture, smart fishing, logistic system, geomembrane*, teknologi sensor, modifikasi cuaca) dan modernisasi dalam pembangunan sektor pertanian berbasis riset, teknologi, dan inovasi baik di sisi hulu maupun hilir, 3) penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global, 4) pengembangan pertanian dalam arti luas yang berkelanjutan melalui penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan terjangkau (termasuk untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya), 5) peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi pelaku usaha pertanian dalam arti luas guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang implementatif (pengetahuan nilai dan musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama dan pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui *digital marketplace/platform*), 6) perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dalam arti luas, pengembangan *closed loop* model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta kolaborasinya dengan pasar dan bank, perluasan diversifikasi pertanian, regenerasi pelaku usaha sektor pertanian, penguatan sistem distribusi produk pertanian, serta perlindungan terhadap pelaku usaha sektor pertanian, 7) penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi yang mendukung produktivitas pertanian dalam arti luas dan daya saing produk pertanian dalam arti luas, serta 8) modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan, pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah, pengendalian dan pengawasan sumber daya

perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.

Industri pengolahan

Sektor industri pengolahan di Jawa Tengah menjadi salah satu sektor penyumbang terbesar pada perekonomian Jawa Tengah. Untuk itu, dalam dua puluh tahun ke depan kebijakan peningkatan produktivitas sektor ini menjadi penting dalam upaya akselerasi peningkatan perekonomian daerah yang memiliki daya saing global maupun nasional. Arah kebijakan peningkatan produktivitas industri pengolahan di Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan antara lain meliputi: 1) hilirisasi industri, 2) penguatan industri kecil dan menengah berbasis potensi lokal, 3) pengembangan industri berbasis teknologi, riset dan inovasi, dan ramah lingkungan (*green investment*), 4) pengembangan industri berbahan baku lokal, 5) penguatan integrasi rantai pasok antarindustri didukung dengan ketersediaan infrastruktur konektivitas dan logistik pendukung industri, 6) peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung industri pengolahan ramah lingkungan, 7) penguatan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha industri pengolahan agar lebih produktif, inovatif, dan kreatif, 8) digitalisasi industri pengolahan, 9) penciptaan iklim usaha yang sehat dan iklim kemitraan yang mendorong produktivitas industri pengolahan, serta 10) peningkatan penumbuhan kawasan industri/kawasan peruntukan industri baru.

UMKM dan Koperasi

Perekonomian Jawa Tengah mampu tumbuh dan berkembang salah satunya ditopang oleh sektor UMKM dan koperasi yang dinilai mampu menghadapi goncangan pasar global dan nasional maupun dinamika global lainnya. Sektor ini juga mampu banyak menyerap tenaga kerja baik yang berpendidikan rendah sampai berpendidikan tinggi. Untuk itu, agar sektor ini ke depan tetap mampu berkontribusi tinggi pada perekonomian daerah didorong untuk lebih meningkatkan produktivitas agar memiliki nilai tambah lebih dan mampu bersaing secara global dan nasional. Kebijakan yang diterapkan untuk penguatan sektor UMKM dan koperasi dalam jangka panjang antara lain meliputi: 1) peningkatan kualitas produk unggulan UMKM dan IKM berbasis riset, inovasi, dan teknologi, 2) fasilitasi perluasan akses pasar, kemitraan, modal/pembiayaan inovatif, kemasan, standar produk, dan manajemen usaha, 3) akselerasi digitalisasi dan penggunaan teknologi bagi pelaku UMKM dan IKM disertai dengan penyediaan akses internet dan teknologi yang memadai dan terjangkau, 4) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku UMKM dan IKM untuk mampu mengembangkan produk UMKM dan IKM yang memiliki standar pasar, berbasis riset, inovasi, dan teknologi, 5) pengembangan wirausaha baru, 6) penguatan koperasi produksi sebagai konsolidator UMKM terutama bagi usaha mikro kecil, 7) perbaikan mekanisme pengawasan dan penjaminan koperasi simpan pinjam, 8) industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, 9) peningkatan kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia koperasi, serta 10) peningkatan produktivitas BUMD.

Pariwisata

Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang cukup tinggi yang mampu menarik kunjungan wisatawan sehingga mampu memberikan dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat dan mendorong perekonomian daerah. Untuk itu, pembangunan pariwisata ke depan menjadi penting sebagai bentuk transformasi ekonomi Jawa Tengah. Arah kebijakan pembangunan pariwisata Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan antara lain meliputi: 1) pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan, 2) penguatan promosi pariwisata berbasis digital, 3) peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan sarana prasarana destinasi wisata, 4) penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital, 5) peningkatan infrastruktur konektivitas antardestinasi wisata, 6) penguatan integrasi antardestinasi wisata, 7) penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata, 8) penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata, 9) *city beautification* dalam rangka membangun citra, karakter, dan *dignity* kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata *urban tourism*, terutama pada kawasan perkotaan, 10) pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, *ancillary services*, aktivitas, *available packages*) pada kawasan megapolitan/metropolitan (*urban tourism*), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang-Yogyakarta-Surakarta.

Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif saat ini menjadi salah satu sektor ekonomi yang mampu menjadi kekuatan baru untuk peningkatan perekonomian daerah Jawa Tengah. Sektor ekonomi kreatif mampu menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ditengah pelambatan pertumbuhan ekonomi secara global. Pengembangan sektor ekonomi kreatif akan mampu menciptakan nilai tambah tinggi berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia dan berbasis ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Arah kebijakan di sektor ekonomi kreatif di Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan antara lain mencakup: 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia ekonomi kreatif, 2) pengembangan dan penguatan sistem kelembagaan ekonomi kreatif dan jejaringnya sampai tingkat desa, 3) peningkatan pemasaran dan promosi produk ekonomi kreatif, 4) pengembangan sistem pembiayaan dan pendanaan bagi pengembangan ekonomi kreatif, 5) penyediaan infrastruktur fisik dan nonfisik yang memadai dan terjangkau untuk mendukung pengembangan kreativitas, 6) peningkatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya alam dan warisan budaya lokal sebagai bahan baku usaha ekonomi kreatif, 7) pengembangan sistem regulasi yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif, 8) peningkatan apresiasi masyarakat terhadap kreativitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual, 9) pengembangan dan penguatan jejaring kabupaten/kota kreatif, 10) pengembangan dan penguatan desa kreatif terutama pada produk kreatif unggulan, 11) mengembangkan ekonomi kreatif yang mendukung industri

pariwisata melalui penciptaan iklim yang kondusif, serta 12) mengembangkan riset ekonomi kreatif.

Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas semua sektor ekonomi daerah didukung dengan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan kompeten, adaptif, inovatif, dan mampu menguasai pasar kerja, termasuk dalam menghadapi peluang adanya *green jobs*. Guna meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar mampu berkontribusi dalam peningkatan produktivitas ekonomi daerah, arah kebijakan yang akan dilaksanakan dalam dua puluh tahun ke depan antara lain: 1) penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, disertai dengan penguatan regulasi tentang vokasi, 2) penguatan keahlian dan kompetensi digital, riset dan inovasi, 3) penguatan sistem perlindungan tenaga kerja, 4) penguatan iklim ketenagakerjaan yang mendukung pasar kerja yang inklusif termasuk penerapan upah minimum yang berkeadilan, 5) penuntasan pekerja anak, serta 6) penyediaan informasi pasar kerja dalam jangkauan luas berbasis digital terintegrasi dengan dunia usaha dunia industri.

Penguatan Riset dan Inovasi

Riset dan inovasi menjadi salah satu faktor pendukung untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi dan memperkuat struktur ekonomi jangka panjang. Penguatan riset dan inovasi akan terus didorong dalam dua puluh tahun ke depan melalui arah kebijakan antara lain: 1) penguatan peran dan kapasitas pusat riset dan inovasi di semua lembaga dan perusahaan, serta perguruan tinggi mitra pemerintah, 2) penguatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi di semua sektor, 3) penguatan tata kelola kelembagaan riset dan inovasi, 4) penguatan relevansi dan produktivitas hasil riset dan inovasi di semua sektor pembangunan, 5) penguatan kerja sama riset dan inovasi antarpelaku usaha, swasta, dan pemerintah, serta 6) penguatan inkubasi hasil riset dan inovasi, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual dan hak paten atas hasil riset dan inovasi.

CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau

Perwujudan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di Jawa Tengah dalam dua puluh tahun kedepan diarahkan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Dengan menerapkan ekonomi hijau diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap tinggi dan tetap sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup agar tetap lestari dan berkelanjutan. Penerapan *green economy* di Jawa Tengah dilakukan dengan tujuan Pembangunan Rendah Karbon/*Low Carbon Development* (PRK/LCD) yang berketahanan iklim. PRK yang berketahanan iklim merupakan serangkaian strategi dan rencana kerja untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui aktivitas dengan emisi GRK maupun intensitas emisi GRK yang rendah, serta mengurangi penggunaan sumber daya alam. Kebijakan penerapan *green economy* dibagi dalam empat kelompok sebagai berikut: 1) penerapan *circular economy* secara bertahap dengan mentransformasikan

dari *brown industry* menuju *green industry* baik untuk perusahaan besar, menengah, UMKM dan IKM, dengan mengadopsi prinsip-prinsip *circular economy* (R0-R9), yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu: a) membuat dan menggunakan produk dengan lebih cerdas (R0: *refuse*, R1: *rethink*, R2: *reduce*); b) memperpanjang usia pakai produk (R3: *reuse*, R4: *repair*, R5: *refurbish*, R6: *remanufacture*, R7: *repurpose*); dan c) mengambil manfaat dari material (R8: *recycle*, R9: *recover*), 2) penerapan konservasi energi agar lebih efisien dan mendorong transisi energi ke sumber energi terbarukan yang dicapai melalui pembangunan infrastruktur EBT, gerakan penghematan energi, desa mandiri energi berbasis potensi lokal yang terjangkau, inklusif, dan pendampingan energi, 3) pengelolaan hutan lestari, lahan pertanian, lahan budidaya perikanan dan kelautan serta produk-produk turunannya dan bioprospeksi secara berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan mendukung hilirisasi sektor pertanian, serta 4) pengembangan *green financing* dan penerapan *carbon pricing* untuk mendukung investasi dan produk-produk hijau.

CJ06. Transformasi Digital

Transformasi ekonomi dapat terwujud didukung dengan transformasi digital yang adaptif, inklusif, memberdayakan, berdaulat, dan berkelanjutan. Kebijakan transformasi digital dilaksanakan dengan membangun ekosistem digital tangguh yang diarahkan pada: 1) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan *broadband* hingga menjangkau ke seluruh pelosok, 2) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis, serta 3) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau *digital skill* (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

Integrasi ekonomi domestik dan global diharapkan akan semakin mendorong perekonomian daerah Jawa Tengah lebih produktif dan tumbuh semakin optimal. Kebijakan terkait integrasi ekonomi domestik dan global di Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) penguatan ekspor produk unggulan daerah, 2) pengurangan ketergantungan impor, 3) penguatan standarisasi produk-produk unggulan daerah sehingga mampu bersaing di pasar global dan nasional, 4) pengendalian harga dalam upaya mengendalikan tingkat inflasi yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli masyarakat, 5) peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku sektor perdagangan untuk mampu menciptakan produk yang berdaya saing tinggi dan memasarkannya di pasar global maupun nasional, 6) penguatan iklim kemitraan pasar produk unggulan daerah, 7) penguatan sistem distribusi produk perdagangan, serta 8) penyederhanaan regulasi, penguatan kapasitas hukum, persaingan usaha, termasuk kelembagaan persaingan usaha. Kebijakan ini didukung dengan kebijakan percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik handal yang akan mendorong penguatan keterkaitan nilai tambah antarwilayah secara lebih terintegrasi.

CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu upaya untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi daerah adalah pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi menuju kota dan desa maju, inklusif, dan berkelanjutan. Kebijakan secara umum pembangunan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi terutama diarahkan pada: 1) pemantapan jalan dan jembatan sesuai standar merata di seluruh wilayah guna memperlancar distribusi barang dan jasa, 2) peningkatan keselamatan perjalanan transportasi, efisiensi sistem logistik dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pemantapan kualitas pelayanan transportasi terutama angkutan umum massal di kawasan aglomerasi perkotaan dan lintas wilayah pengembangan, termasuk penguatan koordinasi dan kerja sama pengelolaannya dalam hal pembentukan regulasi dan kelembagaan, untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah, serta penerapan transportasi ramah lingkungan, 3) penguatan pemenuhan dan pemerataan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, serta 4) penguatan implementasi penataan ruang terutama dalam perwujudan struktur ruang. Selanjutnya untuk semakin memperkuat pembangunan perdesaan terutama dalam upaya mewujudkan desa yang mandiri, kebijakannya diarahkan pada: 1) peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas SDM lokal, 2) pemenuhan dan pemerataan kebutuhan akses layanan dasar desa, 3) penguatan peran lembaga perekonomian desa melalui optimalisasi potensial lokal desa, 4) penguatan kerja sama kawasan perdesaan sebagai upaya pemerataan pusat pertumbuhan, serta 5) penguatan peran supra desa dalam penyelarasan pembangunan desa sesuai pembagian kewenangan.

Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan Jawa Tengah tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.3.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	CJ04. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11. Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	33,88-34,06	35,42 - 36,42	39,89 - 40,89	43,10 - 44,10	40,71-41,71
		12. Pengembangan Pariwisata:						
	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi	%	3,50	4,40	5,52	6,65	8,00	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau		Makan dan Minum						
		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	66,81	125,26	198,33	271,39	359,07
		13. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	12,61	12,18	11,64	11,10	10,46
		14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:						
		a) i) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	%	10,39	10,81	11,26	11,73	12,13
		ii) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	%	6,01	6,89	8,00	9,10	10,43
		b) Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,21	4,76	6,36	8,04	9,06
		c) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	2,00	2,73	3,49	4,27	5,02
		d) <i>Return on Asset (ROA) BUMD</i>	%	1,44	2,19	3,14	4,08	5,22
		15. Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik						
		a) Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,42-4,81	4,18-4,28	3,70-3,80	3,22-3,32	2,24-3,25
		b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	42,00	50,20	60,45	70,70	83,00
		16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	59,75	63,00	67,00	71,00	75,80
		17. Tingkat Penguasaan IPTEK: - Kapabilitas Inovasi	Angka	4,80	4,86	4,92	4,96	4,98
		18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau						
		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Angka	62,23	67,02	75,02	84,73	90,03

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Sasaran 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	21,32	22,55	24,67	25,29	27,11
	CJ06. Transformasi Digital	19. Indeks Pembangunan Teknologi Infomasi dan Komunikasi	Angka	6,00	6,56	6,92	7,38	7,70
	CJ07. Integrai Ekonomi Domestik dan Global	20. Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Angka	7,38	6,79	6,19	5,70	4,82
		21. Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	30,19	28,95	26,74	24,26	22,89
		22. Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	10,97	11,58	12,53	13,67	14,58
	CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan:						
		a) Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	%	2,41	2,57	2,82	3,13	3,37
		b) Rumah Tangga dengan Askes Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	72,80	78,88	86,48	94,08	100
		c) Persentase Desa Mandiri	%	9,10	12,65	19,91	27,73	32,54
		d) Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	%	91,36	91,82	92,53	93,24	93,95
		e) Indeks Pelayanan Transportasi	Angka	6,308	6,882	7,382	7,887	8,397
		f) Persentase Keterwujudan Penataan Ruang	%	77,47	83,42	87,89	91,99	94,44

5.2.3. Sasaran 3. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis

Transformasi tata kelola menjadi penting dalam rangka mendorong pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan untuk bekerja lebih efektif dan akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik lebih optimal. Transformasi tata kelola ke depan mengarah pada tata kelola pemerintahan yang dinamis dengan memperkuat pemerintahan yang semakin adaptif dan kolaboratif, dengan

integritas yang semakin kuat. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis difokuskan pada satu arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif

Kebijakan dalam rangka perwujudan regulasi dan tata kelola berintegritas, adaptif, dan kolaboratif di Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat (*open government*), 2) penguatan manajemen pemerintahan yang semakin adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada hasil, berbasis riset, dan risiko, 3) penguatan kelembagaan yang efektif, 4) digitalisasi tata kelola pemerintahan, 5) akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan manajemen talenta secara efektif dan efisien, 6) penyederhanaan regulasi dan penguatan penegakan hukum, 7) penguatan manajemen pengawasan yang independen dan berintegritas dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi, 8) penguatan kolaborasi dan kerja sama antardaerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka perwujudan cita-cita pembangunan daerah, serta 9) penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan masyarakat termasuk partai politik.

Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan dinamis Jawa Tengah tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.4.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Dinamis	CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif, dan Kolaboratif	24. Indeks Reformasi Hukum	Angka	79,10	83,30	88,50	93,70	100
		25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	4,50	4,65	4,80	4,95	5,00
		26. Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,28	4,50	4,70	4,80	5,00
		27. Indeks Integritas Nasional	Angka	80,97	84,23	88,3	92,37	98,28

5.2.4. Sasaran 4. Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Keberhasilan pencapaian transformasi di Jawa Tengah secara menyeluruh perlu didukung dengan wilayah yang kondusif dan stabilitas ekonomi makro daerah. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah difokuskan pada tiga arah pembangunan meliputi ketenteraman dan ketertiban serta demokrasi substansial, stabilitas ekonomi makro daerah, serta daya saing dan ketahanan wilayah. Penjabaran arah kebijakannya adalah sebagai berikut.

CJ10. Ketenteraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial

Dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban serta demokrasi substansial di Jawa Tengah, arah kebijakannya dalam dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas, 2) pemenuhan hak asasi manusia, 3) penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, serta 4) penguatan integritas partai politik.

CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah

Perwujudan stabilitas ekonomi makro daerah Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada kebijakan meliputi: 1) peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah, 2) penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, 3) sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, 4) penguatan pengendalian inflasi daerah, serta 5) perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas.

CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah

Perwujudan daya saing daerah dipengaruhi oleh kemampuan kepemimpinan kepala daerah dalam membangun daerahnya, termasuk dalam menjaga ketahanan wilayah. Arah kebijakan dalam upaya mewujudkan daya saing daerah dan ketahanan wilayah Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan meliputi: 1) peningkatan partisipasi kepala daerah dalam forum internasional, 2) penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila, 3) penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan tindak kriminal, serta 4) dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan militer, serta sarana dan prasarana pertahanan lainnya di daerah.

Terwujudnya kondusivitas wilayah didukung stabilitas ekonomi makro daerah Jawa Tengah tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.5.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya Kondusivitas Wilayah Didukung Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	CJ10. Ketenteraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial	28. Indeks Pembangunan Hukum: - Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	Angka	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00
		29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	74,56	78,90	83,25	87,59	91,94
		30. Indeks Demokrasi Indonesia	Kategori	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Tinggi
	CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1,38	1,41	1,52	1,71	2,30
		32. Tingkat Inflasi	%	1,50 - 3,50	2,00-4,00	2,00-4,00	2,00-4,00	0,90 – 2,80
		33. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan:						
		a) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	25,29	53,58	59,90	62,09	77,40
		b) Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0,43	1,15	2,04	2,94	4,01
		c) Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Rupiah	3.700.540,29	15.709.622,46	30.720.975,17	45.732.327,88	63.745.951,13
		d) Total Kredit/PDRB	%	23,20	34,56	48,41	58,23	74,40
		34. Inklusi Keuangan	%	92,07	93,46	95,20	96,94	99,02
	CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah	35. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Kategori	n.a	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi
		36. Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Kategori	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Cukup Tangguh	Tangguh	Tangguh

5.2.5. Sasaran 5. Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial

Ketahanan sosial budaya harus diwujudkan dalam proses pembangunan Jawa Tengah selama dua puluh tahun ke depan di tengah modernisasi dan globalisasi yang dapat memberikan ancaman terhadap pola pikir, perilaku, identitas, dan karakter masyarakat. Membangun ketahanan sosial budaya setidaknya ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh masyarakat. *Pertama*, kemampuan memelihara sistem nilai budaya Jawa yang dianut karena budaya adalah endapan dari perilaku manusia. *Kedua*, kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan dunia yang berubah dengan cepat. *Ketiga*, adanya fungsi integrasi semua unsur masyarakat yang beraneka ragam secara menerus. *Keempat*, masyarakat harus memiliki tujuan bersama dari masa ke masa. Ketahanan sosial budaya juga adalah dalam rangka mencegah berbagai dampak negatif pengaruh global yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada masyarakat. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial difokuskan pada dua arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan pemajuan kebudayaan dan pendidikan karakter di Jawa Tengah meliputi: 1) peningkatan strategi pemajuan kebudayaan, 2) penguatan internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai agama sebagai landasan spiritual, etika, dan moral dalam kehidupan masyarakat, 3) penguatan penanaman nilai-nilai budaya Jawa sejak dini dengan edukasi budaya Jawa mulai dari dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat terkecil, 4) internalisasi kurikulum kebudayaan Jawa di semua jenjang pendidikan, disertai peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam implementasi budaya Jawa pada anak-anak sekolah, 5) edukasi di keluarga dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya untuk mengajarkan identitas Jawa Tengah melalui tutur kata sehari-hari, termasuk melakukan *parenting* untuk para orang tua terkait pembelajaran karakter masyarakat Jawa Tengah dalam kehidupan sehari-hari, 6) pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, kearifan lokal, tradisi, kesenian sebagai salah satu sumber perekonomian daerah, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, 7) penguatan komitmen pemerintah dalam memperkuat pembentukan karakter masyarakat Jawa Tengah yang salah satunya tercermin dari politik kebudayaan untuk memprioritaskan pendidikan kebudayaan dan kesenian untuk masyarakat Jawa Tengah, serta 8) pemantapan kohesi sosial melalui edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan kepada seluruh lapisan masyarakat sejak dini.

CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Arah kebijakan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif di Jawa Tengah meliputi: 1) peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, 2) penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan, 3) pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang

disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang, serta 4) pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.

Terwujudnya masyarakat berkarakter dan berketahanan sosial Jawa Tengah tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.6.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Terwujudnya Masyarakat Berkarakter dan Berketahanan Sosial	CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	62,24 - 62,31	64,32 - 64,49	66,91 - 67,22	69,51 - 69,94	72,62 - 73,21
		38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	78,65 - 79,20	81,52- 82,26	83,46- 84,09	85,28- 85,9	86,16 - 87,40
	CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	73,81 - 73,82	75,14 - 75,16	76,47 - 76,50	77,79 - 77,83	79,12 - 79,17
		40. Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,34	0,31- 0,31	0,27- 0,26	0,22- 0,21	0,17 - 0,16

5.2.6. Sasaran 6. Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana

Keberlanjutan proses pembangunan dipengaruhi oleh daya dukung dan daya tampung yang dapat terwujud hanya apabila sumber daya alam dan lingkungan hidup dijaga, dipelihara, dan dilestarikan. Dengan terjaganya sumber daya alam dan lestarnya lingkungan hidup akan mengurangi potensi terjadinya bencana. Dalam rangka mewujudkan sasaran pokok terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana difokuskan pada tiga arah pembangunan beserta arah kebijakan meliputi sebagai berikut.

CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas

Kebijakan dalam upaya terwujudnya lingkungan hidup berkualitas dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) pencegahan dan perlindungan wilayah yang memberikan jasa lingkungan tinggi/fungsi ekologi/keanekaragaman hayati di daratan, pesisir dan laut, 2) pemulihan wilayah yang mengalami degradasi

kualitas dan fungsi lingkungan hidup, 3) kepatuhan pemanfaatan wilayah sesuai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidupnya dan instrumen lingkungan hidup, 4) pencadangan wilayah dengan potensi sumber daya alam (termasuk konservasi kawasan karst dan pengembangan *geopark*), 5) peningkatan kualitas dan optimalisasi nilai tambah sumber daya alam di suatu wilayah, 6) pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup terintegrasi hulu hilir melalui pengelolaan sanitasi aman, pengelolaan sampah, pengelolaan *landscape-seascape* terintegrasi dan berbasis masyarakat, pengelolaan bentang lahan dengan pendekatan *landscape-seascape* terpadu berbasis masyarakat, dan 7) peningkatan peran serta masyarakat dalam mengembangkan dan menjaga kearifan lokal (*indigenous knowledge*) untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup.

CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Upaya perwujudan ketahanan energi dan air di Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan diarahkan pada kebijakan: 1) peningkatan akses masyarakat terhadap listrik (termasuk akses masyarakat tidak mampu), 2) perluasan pemanfaatan elektrifikasi dan gas pada lingkup rumah tangga, industri, dan transportasi, 3) mendorong percepatan aksi konservasi energi dari sisi pemanfaatan energi melalui penerapan manajemen energi di daerah, 4) penguatan pengelolaan sumber daya air (keterpaduan pemanfaatan antara air permukaan dan air tanah), serta 5) peningkatan upaya konservasi air tanah dan pengendalian pemanfaatan air tanah.

Selanjutnya, arah kebijakan untuk mewujudkan kemandirian pangan meliputi: 1) pemenuhan hak dasar atas pangan yang cukup, beragam, bergizi, seimbang, dan aman secara berkelanjutan, penguatan sistem rantai pasok, dan penguatan pengendalian harga pangan untuk menjamin aksesibilitas pangan, 2) penyediaan pangan lokal secara mandiri dan berkelanjutan, 3) pencegahan pemborosan pangan (*food loss and waste*), serta 4) peningkatan ketahanan pangan dan gizi hingga tingkat individu melalui pengembangan biofortifikasi dan fortifikasi pangan secara luas (*large scale food fortification/LSFF*).

CJ17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Dalam rangka memperkuat resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, kebijakan Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan diarahkan pada: 1) pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan nonstruktural di daerah rawan bencana tinggi, serta 2) mewujudkan pembangunan rendah karbon melalui penerapan dekarbonisasi pada sektor industri, energi dan transportasi, pengelolaan lahan berkelanjutan dengan mempertahankan tutupan lahan sebagai *net-sink* di masa depan, penanganan limbah dengan meningkatkan daur ulang dan pengomposan limbah padat domestik, pemanfaatan teknologi *Waste to Energy* (WtE), peningkatan infrastruktur sanitasi dan pengolahan sampah, mendorong transisi ke sumber energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batubara, mendorong penggunaan alat transportasi

rendah emisi, 3) peningkatan kapasitas dalam rangka adaptasi perubahan iklim melalui upaya adaptasi dan mitigasi baik struktural maupun nonstruktural yang diprioritaskan pada sektor air, kelautan dan pesisir, pertanian, kesehatan, dan bencana, serta 4) peningkatan upaya perlindungan pesisir dan mitigasi amblesan tanah.

Terwujudnya ketahanan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan bencana di Jawa Tengah tahun 2045 diukur dengan indikator kinerja dan targetnya sebagai berikut.

Tabel 5.7.

Sasaran Pokok, Arah Pembangunan, Indikator Utama Pembangunan, dan Target Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target				
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045	
Terwujudnya Ketahanan Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, dan Bencana	CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Angka	0,482	0,516	0,542	0,558	0,597	
		42. Kualitas Lingkungan Hidup:							
		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	75,68	75,87	76,11	76,36	79,58	
		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	12,50	24,78	32,30	39,79	85,00	
		c) Pengelolaan Sampah:							
		- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,00	22,96	38,96	54,96	90,00	
		- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	25,00	35,00	50,00	70,00	100	
	CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan		43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan						
			a) Ketahanan Energi:						
			- Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	807	1.016	1.346	1.793	2.355
		- Intensitas Energi Primer	SBM/Rp Milyar	92,20	91,98	91,76	90,24	83,19	

Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Satuan	Baseline 2025	Target			
					2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		b) Kemandirian Pangan						
		- Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	%	9,37	7,90	5,71	3,53	0,47
		- Indeks Ketahanan Pangan	Angka	85,34	86,34	87,48	88,54	89,80
		c) Ketahanan Air:						
		- Kapasitas Air Baku	m ³ /detik	5,20	7,70	10,20	12,70	47,32
		- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	39,46	47,53	59,96	75,66	100
		- Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampung Air Kewenangan Provinsi	%	64,31	75,53	80,53	85,53	90,53
		- Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	Angka	69,11	70,17	71,04	71,94	72,22
		- Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi	%	52,41	52,61	52,81	53,01	53,21
	CJ17, Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana	Angka	115,38	99,95	92,40	84,86	94,03 - 75,80
		45. Persentase Penurunan Emisi GRK:						
		a) Kumulatif	%	5,65	8,55	13,55	20,06	30,26
		b) Tahunan	%	12,35	21,53	37,36	52,59	70,91

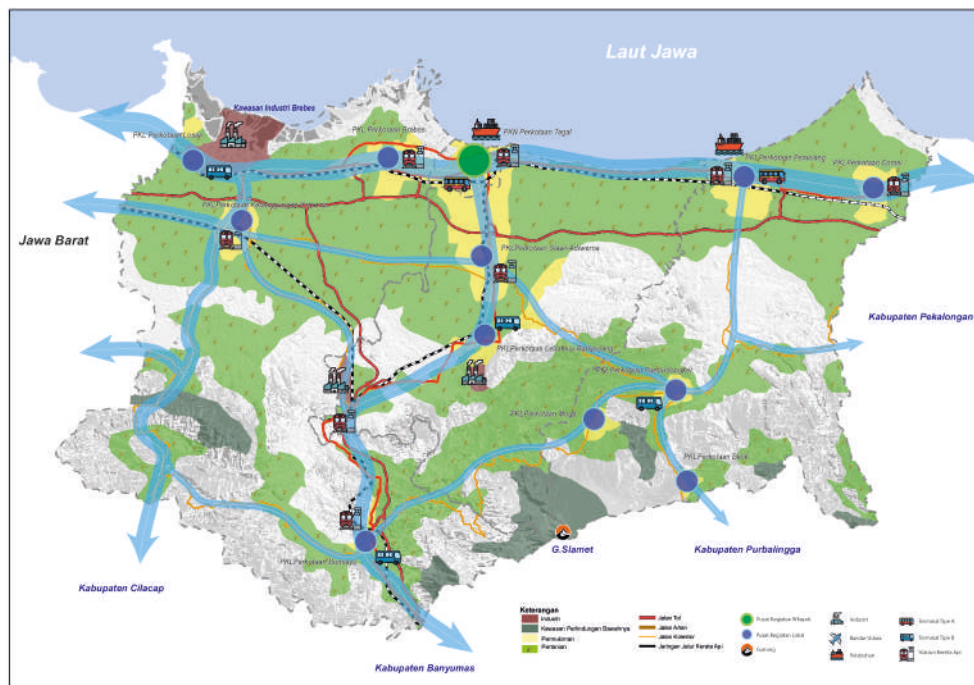
5.3. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan wilayah Jawa Tengah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pembangunan wilayah di Jawa Tengah diarahkan untuk mengembangkan perekonomian wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik masing-masing daerah. Pembangunan perekonomian Jawa Tengah berbasis pada sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah untuk memadukan fungsi budidaya dan lindung serta keterpaduan pengelolaan alam darat dan pesisir.

Pembangunan wilayah di Jawa Tengah dibagi menjadi 10 (sepuluh) Wilayah Pengembangan (WP) dengan mempertimbangkan kesatuan geografis, karakteristik dan interaksi wilayah, serta sistem permukiman. Pembagian wilayah pengembangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah yang dilihat dari tingkat kesejahteraan serta pertumbuhan ekonomi serta berfungsi untuk mengembangkan wilayah-wilayah yang masih berada pada performa pertumbuhan yang rendah dan mendorong kerja sama antardaerah yang saling menguntungkan pada berbagai sektor. Pembagian wilayah pengembangan Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

1. WP Bregasmalang

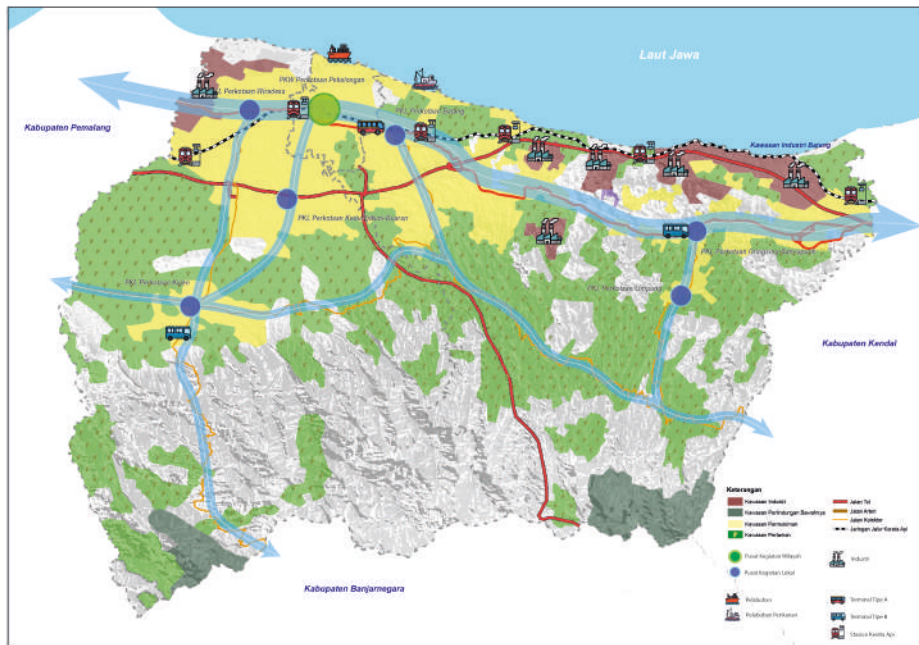
WP Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang dan Kota Tegal diarahkan pengembangannya antara lain untuk memadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Tegal dengan kabupaten di sekitarnya sebagai satu kesatuan sistem permukiman yang saling menunjang secara fungsi dengan memperhatikan penyediaan ruang terbuka hijau perkotaan, serta penanganan bencana dan kawasan terdampak rob. Pada kawasan ini juga akan dikembangkan Kawasan Industri Brebes sebagai salah satu kawasan industri strategis di bagian barat Jawa Tengah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian akan dikembangkan disertai dengan upaya untuk mengendalikan alih fungsi lahan sawah. Selain itu, sebagai salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan Jawa Barat maka akan dilakukan upaya untuk memadukan pengembangan kawasan perbatasan provinsi Jawa Tengah-Jawa Barat dan mendorong kerja sama antardaerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana di berbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah. Sedangkan untuk menjaga kualitas lingkungan hidup setidaknya harus dilakukan pengendalian terhadap alih fungsi lahan terutama yang memiliki fungsi konservasi atau area yang memberikan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi di darat maupun pesisir, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola persampahan, meningkatkan pengendalian dan pemantauan kualitas air dan udara, serta memperkuat ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana khususnya terkait perubahan iklim (terutama pada kawasan pesisir).



Gambar 5.3.
Arah Pengembangan Wilayah WP Bregasmalang

2. WP Petanglong

WP Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan diarahkan pengembangannya antara lain untuk memadukan pengembangan permukiman perkotaan Kota Pekalongan dan kabupaten di sekitarnya sebagai salah satu perkotaan aglomerasi yang saling menunjang dengan penyediaan sarana prasarana perkotaannya dengan mempertimbangkan upaya mitigasi dan penanganan bencana. Pada kawasan ini juga dikembangkan Kawasan Industri Terpadu Batang sebagai salah satu kawasan pusat pengembangan industri manufaktur berteknologi tinggi yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah. Sektor pertanian juga didorong sebagai salah satu sektor unggulan disertai dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah serta peningkatan berbagai upaya dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas serta kualitas hasil pertanian. Pengembangan fasilitas logistik perlu didorong dalam rangka untuk kemudahan pergerakan barang hasil produksi sektor industri maupun sektor pertanian. Selain itu, akan dilakukan upaya peningkatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata dan industri kreatif sebagai salah satu ciri khas kawasan dengan tetap memperhatikan kelestarian alam. Untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan upaya seperti pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi di darat maupun pesisir, pengendalian kegiatan pertambangan, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola persampahan (termasuk limbah dan limbah B3), pengendalian dan pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana khususnya terkait perubahan iklim (terutama pada kawasan pesisir).

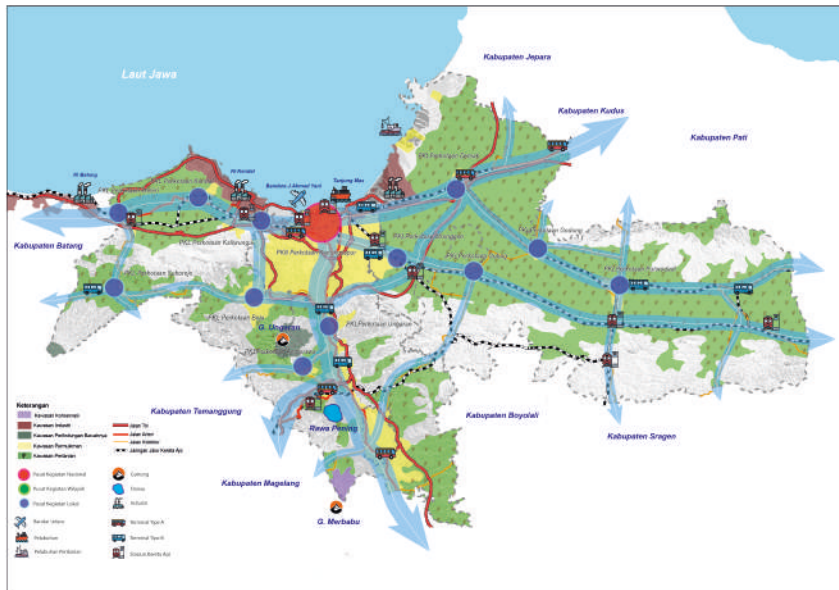


Gambar 5.4.
Arah Pengembangan Wilayah WP Petanglong

3. WP Kedungsepur

WP Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Semarang, Grobogan, Demak, Kota Semarang dan Salatiga diarahkan pengembangannya dengan mendorong peningkatan pengembangan perkotaan Semarang sebagai salah satu kawasan strategis nasional dan pusat pengembangan industri berbasis keunggulan wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Pengembangan industri di Kedungsepur diarahkan pengembangannya pada kawasan industri Semarang, Kendal, dan Demak berdasarkan prinsip mandiri, keberlanjutan, serta kelestarian alam. Selain itu, sektor pertanian terus dikembangkan utamanya pada kawasan penyangga disertai upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah dan pencegahan *urban sprawl*. Dalam rangka peningkatan mobilitas transportasi barang maka perlu upaya pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor Jawa Tengah, pengembangan Bandara Internasional Ahmad Yani yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah *aerocity*, serta upaya untuk mengurangi biaya logistik di Jawa Tengah. Sebagai kawasan perkotaan yang terintegrasi, peningkatan pengelolaan dan pengembangan pariwisata terus dilakukan dengan integrasi di dalam dan antarkawasan, serta mendorong kerja sama antardaerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan dengan reformasi perencanaan dan fiskal serta penyediaan prasarana dan sarana di berbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah. Sebagai upaya menjaga ketahanan ekologis didorong melalui pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, serta ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW (*Food, Energy, Water*) Nexus. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus diupayakan melalui peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas berbasis keunggulan wilayah serta pengembangan sistem dan jangkauan layanan kesehatan perkotaan. Dalam mewujudkan

Metropolitan Semarang sebagai MICE *city* didorong melalui peningkatan produktivitas, daya saing dan inovasi melalui penguatan citra kota, serta penyiapan percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital. Sedangkan untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan upaya-upaya antara lain pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi di darat maupun pesisir, meningkatkan tata kelola persampahan maupun limbah (termasuk limbah B3), pengendalian dan pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana khusus terkait perubahan iklim (terutama pada kawasan pesisir).

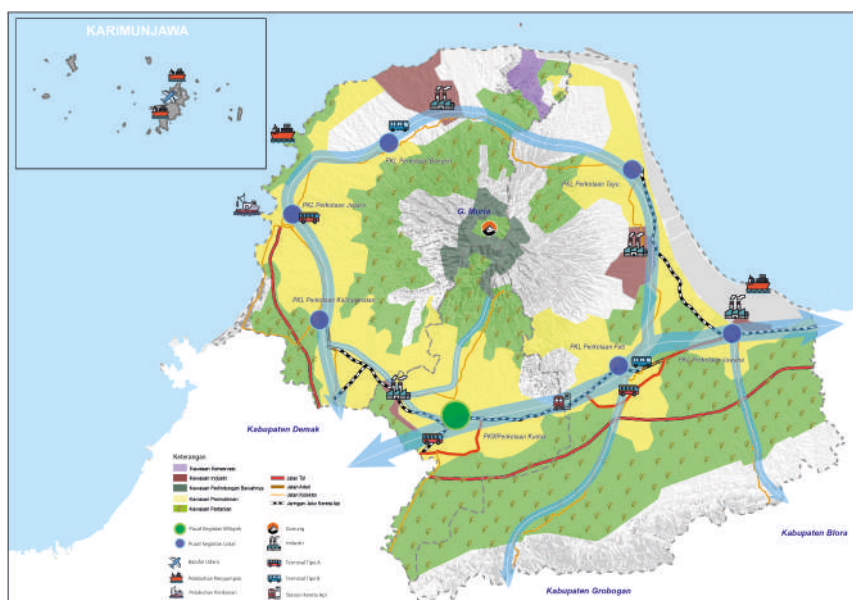


Gambar 5.5.
Arah Pengembangan Wilayah WP Kedungsepur

4. WP Jekuti

WP Jekuti meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati diarahkan pengembangannya antara lain untuk memadukan pembangunan kawasan perkotaan Kudus-Jepara-Juwana-Pati. Pengembangan pengelolaan industri khususnya kerajinan berada di Kabupaten Jepara, dan industri pengelolaan tapioka berada di Kabupaten Pati. Pengembangan sektor pertanian diupayakan melalui peningkatan kualitas dan produktivitas disertai dengan upaya pengendalian alih fungsi lahan sawah di kawasan ini. Sebagai kawasan yang memiliki ancaman bencana utamanya banjir, longsor dan kekeringan yang sangat tinggi maka perlu upaya mitigasi bencana dalam setiap pembangunannya. Selain itu perlu kerja sama antardaerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana di berbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah. Untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan upaya seperti pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi di darat maupun pesisir, meningkatkan tata

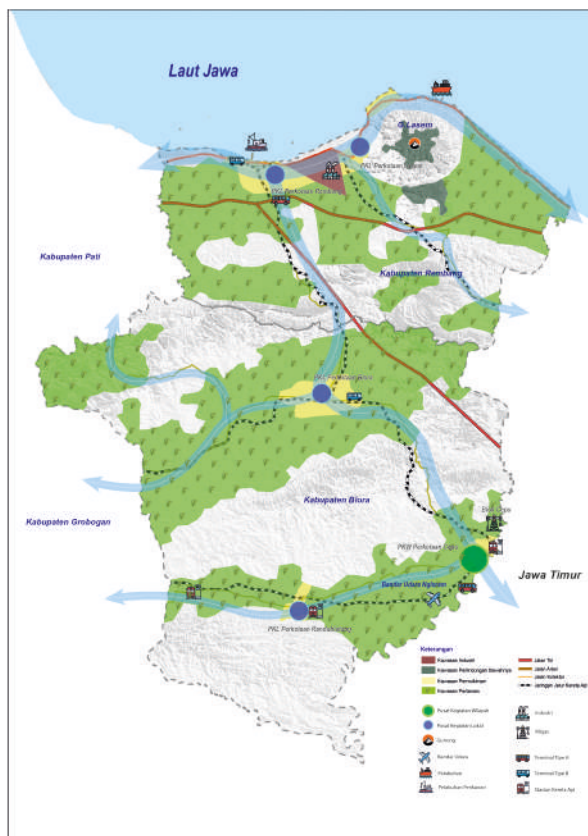
kelola persampahan maupun limbah, pengendalian dan pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana kekeringan.



Gambar 5.6.
Arah Pengembangan Wilayah WP Jekuti

5. WP Banglor

WP Banglor meliputi Kabupaten Rembang dan Blora diarahkan pengembangannya antara lain untuk mendorong pengembangan kawasan perkotaan Rembang sebagai pusat kegiatan wilayah serta meningkatkan aksesibilitas pusat ekonomi Kabupaten Rembang dan Blora. Selain itu dilakukan upaya untuk mendorong kawasan perkotaan Cepu dan sekitarnya sebagai pusat bisnis pertambangan minyak dan gas bumi skala internasional, pengembangan industri di Kabupaten Rembang dan Blora, pengembangan kawasan riset dan pengolahan air laut di Kabupaten Rembang, pengembangan Bandara Ngloram, serta mengembangkan pelabuhan umum dan perikanan di Kabupaten Rembang. Pada sektor pertanian perlu upaya peningkatan prasarana dan sarana dalam rangka untuk peningkatan produktivitas pertanian tanaman di kawasan. Sebagai salah satu kawasan yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur maka akan dilakukan upaya untuk menerpadukan pengembangan kawasan perbatasan provinsi Jawa Tengah-Jawa Timur dan mendorong kerja sama antardaerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana diberbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan limbah. Untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan antara lain upaya pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi di darat maupun pesisir, meningkatkan tata kelola persampahan, pengendalian dan pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana khususnya kekeringan.

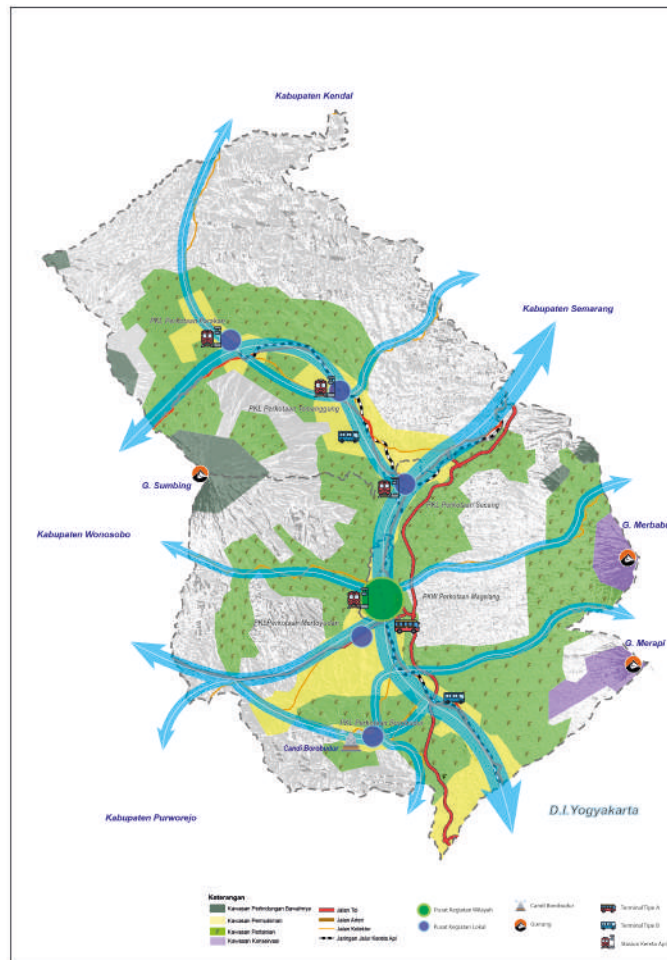


Gambar 5.7.
Arah Pengembangan Wilayah WP Banglor

6. WP Subosukawonosraten

WP Subosukawonosraten meliputi Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, dan Kota Surakarta diarahkan pengembangannya antara lain untuk mendorong pengembangan permukiman perkotaan Metropolitan Surakarta dan kabupaten di sekitarnya secara terpadu dan terintegrasi sesuai dengan fungsi dan potensi masing-masing serta sebagai pusat pelayanan regional. Kawasan ini didorong untuk dapat meningkatkan pengelolaan dan pengembangan pariwisata, industri, dan pertanian dengan memperhatikan kesesuaian peruntukkan lahan dalam rencana tata ruang wilayah. Selain itu sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Tengah maka perlu upaya untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan produktivitas pertanian serta menjaga alih fungsi lahan sawah. Sektor industri didorong melalui pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi serta berorientasi ekspor. Dalam mendukung kemudahan pergerakan barang hasil produksi dari sektor industri dan pertanian maka perlu pengembangan fasilitas logistik di dalam wilayah pengembangan. Selain itu perlu adanya kerja sama antardaerah utamanya untuk pengembangan ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana di berbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah. Peningkatan pariwisata dan kebudayaan diwujudkan dengan pendayagunaan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan melalui hubungan kebudayaan dan industri kreatif untuk memperkuat warisan budaya Jawa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus diupayakan melalui peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas berbasis

ekonomi daerah yang saling menguntungkan serta penyediaan prasarana dan sarana di berbagai bidang seperti transportasi, air minum, persampahan, drainase, dan pengelolaan limbah. Untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan upaya seperti pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola persampahan maupun limbah (termasuk limbah B3), serta pengendalian dan pemantauan kualitas air.



Gambar 5.9.
Arah Pengembangan Wilayah WP Gelangmanggung

8. WP Wonobanjar

WP Wonobanjar meliputi Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara yang diarahkan pengembangannya pada peningkatan kualitas lingkungan hidup dataran tinggi Dieng dalam rangka pengendalian risiko kerusakan Daerah Aliran Sungai Serayu serta sebagai kawasan penyangga di sekitarnya. Dalam rangka mendorong pengembangan KSPN Dieng dan *Geopark* Dieng perlu dilakukan peningkatan akses kawasan serta kualitas destinasi wisata dengan tetap memperhatikan kesesuaian tata ruang wilayah. Pengembangan pusat permukiman dan perekonomian diarahkan melalui pengembangan koridor kawasan perkotaan Kertek–Wonosobo–Banjarnegara–Klampok dengan memperhatikan fungsi antarkawasan serta upaya mitigasi bencana alam seperti erupsi gunung api dan gerakan tanah. Peningkatan produksi hasil pertanian dan kehutanan terus dilakukan pada wilayah ini karena berfungsi sebagai penyangga kebutuhan pengembangan wilayah sekitarnya serta

pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana.



Gambar 5.11.
Arah Pengembangan Wilayah WP Keburejo

10. WP Cibalingmas

WP Cibalingmas meliputi Kabupaten Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas yang diarahkan pengembangannya antara lain untuk peningkatan pengelolaan Pacangsanak sebagai salah satu Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup. Kawasan perkotaan diarahkan pengembangannya secara terpadu pada koridor kawasan perkotaan Cilacap–Purwokerto–Purbalingga sebagai koridor pertumbuhan ekonomi serta menyelaraskan pengembangan industri Cilacap-Banyumas berbasis keunggulan wilayah serta sebagai pusat pelayanan regional. Sebagai kawasan yang berbatasan dengan Jawa Barat maka dilakukan pengembangan kawasan perbatasan secara sinergis dengan pusat pengembangan di kawasan perkotaan Majenang. Untuk meningkatkan pergerakan distribusi wilayah maka perlu mendorong pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan dan pelabuhan darat (*dryport*) secara terpadu sebagai pintu ekspor dan impor di wilayah selatan, pengembangan akses menuju Bandar Udara Jenderal Soedirman dan pengembangan pelabuhan perikanan Samudra Cilacap sebagai sentra pengolahan hasil perikanan tangkap dan budidaya. Beberapa industri yang dikembangkan pada kawasan ini antara lain adalah industri hasil pertanian, perikanan, kehutanan, serta pertambangan dan energi dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam. Sedangkan pengembangan potensi wisata unggulan dilakukan dengan mengintegrasikan kawasan khususnya kawasan ekosistem mangrove Segara Anakan dan kawasan pariwisata Baturaden. Untuk mempertahankan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan upaya seperti pengendalian terhadap alih fungsi lahan yang memiliki fungsi konservasi atau area yang menghasilkan jasa lingkungan tinggi, melakukan rehabilitasi hutan/lahan kritis/terdegradasi, memperbaiki dan meningkatkan tata kelola persampahan maupun limbah, pengendalian dan pemantauan kualitas air, serta meningkatkan ketahanan terhadap risiko dan mitigasi bencana

BAB VI

PENUTUP

RPJPD Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam dua puluh tahun ke depan, termasuk sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah dalam menyusun RPJPD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2045. RPJPD Tahun 2025-2045 juga dijadikan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah untuk turut andil dalam pembangunan daerah Jawa Tengah selama kurun waktu dua puluh tahun ke depan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Guna menjaga kesinambungan pembangunan berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045, maka pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 memperhatikan **kaidah pelaksanaan** meliputi:

1. **konsistensi perencanaan dan pendanaan**, disertai manajemen risiko untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya, serta ketersediaan pendanaan dan pemanfaatannya secara optimal, didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level keluaran dan memastikan pelaksanaannya, serta penguatan mekanisme proses utamanya yang dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan termasuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial;
2. **keterkaitan perencanaan pembangunan** daerah dengan nasional yang digambarkan dengan RPJPN sebagai dokumen perencanaan nasional tertinggi yang dijabarkan dalam RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dimana perencanaan pembangunan daerah jangka panjang (RPJPD) disusun berpedoman pada RPJPN dan selanjutnya dijabarkan dalam RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD;
3. **penerapan Kerangka Kerja Logis (KKL)** dalam penyusunan RPJPD dan dokumen perencanaan penjabarannya agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan, disusun dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, disertai indikator kinerja pembangunan yang disusun dengan memenuhi kriteria *specific, measureable, achievable, result oriented/relevant*, dan *time-bound* (SMART), dimana seluruh indikator RPJPD akan dijabarkan dalam RPJMD dan Renstra PD;
4. **kerangka pengendalian** yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan, dengan ruang lingkup meliputi: (a) pengendalian perencanaan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah mencakup penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD, integrasi dokumen RPJMD ke dokumen Renstra PD, kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya, serta jangka pendek mencakup penjabaran

dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja PD, kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan, konsistensi perencanaan dan penganggaran, identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya, dan (b) pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, serta pemantauan terhadap rencana tindak pengendalian dalam proses manajemen risiko;

5. **penjabaran sasaran pokok** pembangunan daerah termasuk di dalamnya penjabaran pembiayaan alternatif dalam bentuk dokumen peta jalan atau *road map* yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD dan Renstra PD;
6. **sistem insentif** untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah seperti dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan kelompok masyarakat lainnya, melalui pemberian insentif bagi unsur pemerintah yang diintegrasikan di dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran, serta pemberian insentif bagi nonpemerintah berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya;
7. **mekanisme perubahan** yang dapat dilakukan pada saat terjadi dinamika pembangunan akibat terjadinya faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan tetap berdasar pada evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang dilakukan melalui pemutakhiran target dalam RPJMD; penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan sistem elektronik terpadu dan tata kelola pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan, dimana sistem elektronik terpadu bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD, dan tata kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama;
8. **komunikasi publik** untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang dinamis, transparan, responsif, dan komunikatif melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan, dimana komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat termasuk pihak swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan lansia.

Pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045 akan lebih optimal dalam mewujudkan visi dan misi jangka panjang didukung dengan **kapasitas pembiayaan** yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan daerah dilakukan melalui pengembangan pembiayaan daerah alternatif dan kreatif, serta optimalisasi layanan jasa sektor keuangan.

Selanjutnya sebagai **pedoman transisi**, pada saat RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2046–2065 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan, serta mengisi kekosongan RPJMD setelah RPJPD berakhir, maka RPJPD ini menjadi pedoman penyusunan RPJMD dan RKPD periode berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, peran aktif, serta komitmen, berbagai pihak di Jawa Tengah dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan. Harapan ke depan dengan terwujudnya visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2025-2045 yaitu **“Jawa Tengah Sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional Yang Maju, Sejahtera, Berbudaya, dan Berkelanjutan”** akan dapat mendukung perwujudan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

NANA SUDJANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



Ditandatangani secara elektronik oleh:

IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003



**Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah**